

Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung



Pemerintah Daerah Propinsi Lampung
2000

**RENCANA STRATEGIS
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG**

Kerjasama:

Pemerintah Daerah Propinsi Lampung

dengan

Proyek Pesisir Lampung



PKSPL - IPB

PENYUSUN

TIM KERJA RENSTRA PESISIR :

PRAYITNO
TOLE DAILAMI
FAHRIZAL DARMINTO
GAMAL PASYA
EDIYANTO
HERZA YULIANTO
PRIYANTO PUTRO
SUGENG P. HARYANTO
TONNY O.L TOBING
EDISON
ELVIZAR
BUDY WIRYAWAN

TIM CRMP :

BUDY WIRYAWAN
HANDOKO ADI SUSANTO
ALI KABUL MAHI
MARIZAL AHMAD
IAN M. DUTTON
JOHN P. DUFF
BILL MARSDEN

TIM PKSPL - IPB :

DIETRIECH G. BENGEN
M. FEDI A. SONDITA
NEVIATY P. ZAMANI
AMIRUDDIN TAHIR

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID sebagai bagian dari USAID/BAPPENAS Program NRM dan USAID - CRC/URI Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir (CRMP)

Citation :

Pemda Propinsi Lampung. 2000. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dengan Proyek Pesisir Lampung dan PKSPL - IPB. Bandar Lampung. Indonesia. 96 pp.

Cover : CRMP Lampung

Peta : Tim GIS, PKSPL - IPB

Layout : Budy Wiryawan, Handoko A.S

Finishing Layout : Pusus Legowo, Pepen S. Abdullah (Production House, Gd. Marine Center Lt.5, PKSPL-IPB, Bogor)

ISBN : 979-9336-03-1

Keterangan gambar Cover : Pencucian Kerang Hijau hasil panen (kiri), Teluk Lampung (tengah), survei terumbu karang (kanan)

SAMBUTAN GUBERNUR

Disadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan pengalaman sukses dan kegagalan yang sangat mempengaruhi kesadaran serta interpretasi tentang makna pembangunan. Kesadaran dan interpretasi tersebut bersifat dinamis sehingga mempengaruhi dan menyebabkan pergeseran-pergeseran dalam orientasi pembangunan.

Salah satu orientasi pembangunan yang berkembang adalah konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dapat diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek sosio ekonomis, dan kultur. Dalam kerangka inilah diperlukan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) yang dapat menyeimbangkan proses perubahan, sehingga eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dapat konsisten dengan kebutuhan saat ini dan masa datang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyambut baik disusunnya Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung yang dilakukan atas kerjasama Pemerintah Propinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung (khususnya yang memiliki kawasan pesisir), Tim Kerja/Tim Pengarah Propinsi (*Provincial Steering Team*) Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, dan Proyek Pesisir Lampung (*Coastal Resources Management Project*, Program USAID-BAPPENAS-PKSPL IPB).

Selanjutnya, dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan masukan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam kerangka pembangunan daerah secara menyeluruh.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat secara aktif mulai dari tahapan perencanaan sampai selesainya dokumen Renstra ini. Khusus kepada Sdr. Dr. Rokhmin Dahuri (Direktur PKSPL-IPB/Dirjen Pesisir, Pantai, dan Pulau-pulau Kecil DELP), Dr. Budy Wiryawan (Pimpinan Proyek Pesisir - CRMP Lampung), kami sampaikan penghargaan dan salut atas segenap partisipasi dan keterlibatan yang intensif dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhirnya, kami berharap seluruh *stakeholders* dapat mendayagunakan secara optimal dokumen ini untuk membangun daerah Lampung yang kita cintai.

Bandar Lampung, Mei 2000
Gubernur Lampung,



Drs. H. Oemarsono

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Renstra ini merupakan kelanjutan dari kegiatan inventarisasi potensi sumberdaya wilayah pesisir Lampung, yang telah dituangkan dalam Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung. Dokumen ini tersusun melalui rangkaian kegiatan yang cukup panjang dan intensif mulai dari tahapan *Renstra Training, Workshop, Pembentukan Tim Kerja, Konsultasi Publik, Rapat Tim Kerja, Penulisan Draft Renstra*, hingga penulisan akhir dan pencetakan.

Dalam dokumen RENSTRA ini dipaparkan secara komprehensif kondisi umum wilayah pesisir Lampung, isu-isu pokok pengelolaan wilayah pesisir, visi daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, sasaran, indikator, dan strategi pengelolaan serta rencana implementasinya.

Berbagai pihak telah terlibat secara aktif mulai dari tahapan perencanaan sampai formulasi akhir penulisan dokumen ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami menyampaikan salut dan terima kasih kepada Proyek Pesisir Lampung (CRMP – *Coastal Resources Management Project*) sebagai fasilitator, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) – IPB, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir (CRC – *Coastal Resources Center*) Universitas Rhode Island, Tim Pengarah Propinsi (PST – *Provincial Steering Team*), Tim Kerja Renstra Pesisir, Dinas/Instansi terkait Propinsi Lampung, Pemda Kabupaten/Kota Pesisir. Peran yang cukup besar juga telah diberikan oleh kalangan media massa cetak dan elektronik, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat yang juga turut mewarnai dan memperkaya substansi dokumen Renstra ini.

Dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka, sehingga segenap kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan sangat bermanfaat dalam proses implementasinya. Mudah-mudahan secara bersama kita dapat mewujudkan “hari esok” Lampung yang lebih baik.

Bandar Lampung, Mei 2000
Ketua Bappeda Propinsi Lampung



Ir. Harris Hasyim, MA.

PETUNJUK PENGGUNAAN DOKUMEN RENSTRA

Dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, disusun berdasarkan isu utama enam kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir (Lampung Selatan, Lampung Barat, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Tanggamus, dan Lampung Timur), yang proses penggaliannya dimulai dari isu yang ada pada Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, lalu dikonfirmasi kembali pada masyarakat, tokoh adat, dinas/instansi terkait, dan *stakeholders* lainnya di kabupaten/kota bersangkutan. Dari isu-isu tersebut disusun isu utama dan visi untuk masing-masing kabupaten/kota dan akhirnya isu utama dan visi propinsi.

Dokumen ini terdiri dari enam bab, yaitu (1) Pendahuluan, (2) Kondisi Wilayah Pesisir Lampung, (3) Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Terpadu, (4) Proses Implementasi, (5) Proses Kaji Ulang dan Evaluasi, (6) Informasi Lebih Lanjut.

Bab I Pendahuluan, membahas (1) Latar Belakang, (2) Tujuan dan Manfaat, (3) Ruang Lingkup Daerah Perencanaan, (4) Proses Perencanaan, dan (5) Siklus Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pada bab ini dibahas juga tentang posisi Renstra dalam konteks perencanaan, dan proses pembuatan dokumen Renstra itu sendiri yang dimulai dari penyamaan visi dan pengumpulan data (Pelatihan Renstra, Workshop, pembentukan tim kerja, konsultasi publik/survei lapang), analisis dan evaluasi, rapat tim kerja, dan perumusan *draft* Renstra (Workshop, Penulisan Draft Renstra, Dokumen Renstra).

Bab II Kondisi Wilayah Pesisir Lampung, membahas (1) Profil Wilayah Pesisir Lampung, yang sebagian besar datanya diambil dari laporan teknis dalam pembuatan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, (2) Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Alam dan Manusia, dan (3) Isu-isu Pengelolaan Pesisir, yang mencakup isu setiap kabupaten/kota, isu pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, serta isu prioritas pengelolaan pesisir Propinsi Lampung.

Bab III Rencana Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Terpadu membahas tentang (1) Visi dan Tujuan Renstra Pesisir Propinsi Lampung, (2) Isu-isu pengelolaan, kebijakan, dan strategi, serta (3) Pengelolaan pulau dan perairan sekitarnya. Bab ini merupakan inti dokumen Renstra, yang secara detail membahas masing-masing isu utama pengelolaan wilayah pesisir yang berhubungan dengan gambaran/fakta

yang ada saat ini, penyebab dan akibat masing-masing isu utama tersebut. Selanjutnya, dari gambaran tersebut disusun sasaran yang ingin dicapai, indikator pencapaian sasaran, dan strategi pencapaian sasaran untuk masing-masing isu yang dibahas. Pada bab ini, dibahas pula secara khusus isu utama pengelolaan pulau kecil dan perairan sekitarnya, seperti wilayah pesisir lainnya, sedangkan proses implementasi masing-masing strategi dibahas pada Bab IV.

Bab IV Proses Implementasi membahas tentang dinas/instansi penanggung jawab yang terlibat dalam pelaksanaan masing-masing strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sebagai solusi masing-masing isu utama yang dibahas. Prioritas dan waktu pelaksanaan yang diharapkan, dibahas pula dalam bab ini.

Bab V Proses Kaji Ulang dan Evaluasi, membahas tentang kaji ulang dan evaluasi yang terdiri dari dua bentuk tinjauan, yaitu review dokumen setiap tiga tahun dan revisi setiap lima tahun. Review dan revisi ini berhubungan dengan substansi dokumen dan tim yang melakukan kajian ulang tersebut. Pada bab ini dibahas pula mengenai proses revisi jika hal ini harus dilakukan.

Bab VI Informasi Lebih Lanjut, memuat tentang badan yang bertanggung jawab dan dapat dihubungi secara langsung mengenai dokumen Renstra tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan dokumen Renstra ini, dilampirkan daftar istilah dan penjelasannya, daftar hasil analisis Kecepatan (SWOT) kelembagaan masing-masing kabupaten/kota, daftar *stakeholders*, dan daftar kegiatan konsultasi publik. Untuk kelengkapan visual, dokumen ini disertai pula dengan peta-peta, yaitu Peta Wilayah Perencanaan Strategis Pesisir Lampung, Peta Lokasi Konsultasi Publik dengan *stakeholders* dalam Proses Renstra Pesisir, Peta Isu Utama Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tanggamus, Peta Isu Utama Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Barat, Peta Isu Utama Kota Bandar Lampung, dan Peta Isu Utama Pulau dan Perairan Sekitarnya.

Tim Kerja Renstra Pesisir

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumberdaya wilayah pesisir Lampung terbentang di sepanjang 1.105 km garis pantai, dengan luas perairan pesisir 16.625,3 km², dicirikan dengan produktivitas ekosistem yang tinggi, sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama ini. Telah terbukti bahwa komoditi dari sumberdaya alam pesisir tahan terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di lain pihak eksploitasi terhadap sumberdaya tersebut telah menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang kompleks dan terlihat adanya indikasi telah terlampauinya daya dukung ekologis. Dari permasalahan di wilayah ini telah diangkat 10 (sepuluh) isu-isu pengelolaan dan isu pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) di wilayah pesisir, yaitu :

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
4. Degradasi habitat wilayah pesisir
5. Pencemaran wilayah pesisir
6. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan Cagar Alam Laut
7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)
10. Ancaman intrusi air laut
11. Isu pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya

Untuk menangani isu-isu tersebut, diperlukan rencana strategis yang memuat visi, tujuan, sasaran, dan strategi pengelolaan yang terpadu dan diakui bersama oleh *stakeholders*. Rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir ini disebut Renstra Pesisir.

Renstra ini disusun melalui proses yang cukup panjang dengan partisipasi aktif *stakeholders*. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, kemudian pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas lembaga dan perorangan,

dan konsultasi publik dalam bentuk workshop, seminar dan diskusi-diskusi selama survei lapang. Informasi yang didapatkan melalui proses penggalan isu-isu pengelolaan dikaji secara seksama dengan melakukan *cross-check* (verifikasi) kepada *stakeholders* untuk mendapatkan keabsahan dan penjelasan isu yang lebih rinci serta spesifik di kabupaten/kota pesisir.

Renstra Pesisir adalah dasar dari pengelolaan secara terpadu, yang berisi landasan untuk penyusunan perencanaan yang lebih rinci, seperti rencana zonasi (rencana tata-ruang pesisir), rencana pengelolaan suatu kawasan, dan rencana-rencana aksi lintas lembaga untuk pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan di wilayah pesisir. Renstra ini mengkomodasi visi pengelolaan pesisir dari 6 (enam) kabupaten/kota pesisir di propinsi Lampung. Renstra Pesisir ini merupakan komitmen dari segenap *stakeholders* di wilayah pesisir Lampung untuk mengelola sumberdaya secara optimum. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan tergantung dari kesungguhan *stakeholders* sendiri.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang dinamis yang harus dikaji ulang setiap tahun. Renstra ini perlu direview setiap tiga tahun, sesuai dengan kesepakatan para *stakeholders*, untuk mengantisipasi perubahan dan penyesuaian akibat dari pembangunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan milik masyarakat Lampung. Implementasi dari rencana-rencana yang tertuang di dalamnya merupakan acuan dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Jika ada kritik dan saran untuk perbaikan atau revisi silakan menghubungi:

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Propinsi Lampung
Jalan R.W.Monginsidi No.69, Teluk Betung
Bandar Lampung 35401
Telp. 0721-481166**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR LAMPUNG	i
KATA PENGANTAR	ii
PETUNJUK PENGGUNAAN DOKUMEN RENSTRA PESISIR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Ruang Lingkup Daerah Perencanaan	2
1.4 Proses Perencanaan	2
1.5 Siklus Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu	5
II. KONDISI WILAYAH PESISIR DI LAMPUNG	
2.1 Profil Wilayah Pesisir Lampung	9
2.2 Potensi dan Masalah Sumberdaya Alam dan Manusia	9
2.3 Isu-isu Pengelolaan Kabupaten, Kota, dan Pulau-pulau Kecil	17
III. RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU	
3.1 Visi Rencana Strategis Propinsi Lampung	24
3.2 Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi	24
A. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia	24
B. Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum	26
C. Belum adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir	28
D. Degradasi Habitat Wilayah Pesisir	29
E. Pencemaran Wilayah Pesisir	34
F. Kerusakan Hutan, Taman Nasional, dan Cagar Alam Laut	36
G. Potensi dan Obyek Wisata Bahari Belum Dikembangkan secara Optimal	37
H. Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya	40
I. Rawan Bencana Alam (Gempa, Tanah Longsor, Banjir)	42

J. Ancaman Intrusi Air Laut	43
3.3 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya	43
1. Perlunya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya	43
2. Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan dan Strategi	43
IV. PROSES IMPLEMENTASI	47
V. PROSES KAJI ULANG DAN EVALUASI	62
VI. INFORMASI LEBIH LANJUT	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Analisis SWOT Kelembagaan di Kabupaten/Kota Pesisir Propinsi Lampung	65
Lampiran 2 : Ucapan terima kasih	71
Lampiran 3 : Tabel kegiatan Proses Penyusunan Renstra Pesisir Lampung	75
DAFTAR ISTILAH	79
INDEKS	83

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
APPU	: Asosiasi Pengusaha Pembenuhan Udang	Dephub	: Departemen Perhubungan
Bakosurtanal	: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Menegkumdang	: Menteri Negara Hukum dan Perundangan
Bapedal	: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Depnaker	: Departemen Tenaga Kerja
Bapedalda	: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	Diknas	: Pendidikan Nasional
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinsos	: Dinas Sosial
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Diparda	: Dinas Pariwisata Daerah
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal	Ditjen Bangda	: Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
BKSDA	: Balai Konservasi Sumberdaya Alam	Dishut	: Dinas Kehutanan
BOD	: <i>Biological Oxygen Demand</i> (kebutuhan oksigen untuk proses biologi)	Diskan/DELP	: Dinas Perikanan/Dinas Eksplorasi Laut dan Perikanan
BPN	: Badan Pertanahan Nasional	Diskes	: Dinas Kesehatan
BPS	: Badan Pusat Statistik	Diperta	: Dinas Pertanian
BRLKT	: Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
BT	: Bujur Timur	DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CITES	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species</i> (Suatu konvensi internasional mengenai perdagangan flora dan fauna langka)	DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
COD	: <i>Chemical Oxygen Demand</i> (kebutuhan oksigen untuk proses kimia)	FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i> (Organisasi pangan dan pertanian PBB)
CPB	: PT Central Pertiwi Bahari	GAPPINDO	: Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia
CRC	: <i>Coastal Resources Center</i> (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir, Universitas Rhode Island, Amerika Serikat)	GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
CRMP	: <i>Coastal Resources Management Project</i> (Program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, kerjasama USAID – Bappenas, dikenal dengan Proyek Pesisir)	HNSI	: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
DAS	: Daerah Aliran Sungai	ICM	: <i>Integrated Coastal Management</i> (Pengelolaan wilayah pesisir terpadu)
DCD	: PT Dipasena Citra Darmaja	IPB	: Institut Pertanian Bogor
DELP	: Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan	Kanwil	: Kantor Wilayah
Depag	: Departemen Agama	Kekepan	: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman
Depkembangwil	: Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah	Keppres	: Keputusan Presiden
		KTF	: <i>Kabupaten Task Force</i> (Gugus Kerja Kabupaten di Lampung Selatan)
		LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
		LIPi	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
		LIT	: <i>Line Intercept Transect</i> (Metode survei terumbu karang dengan transek garis)

LREP	: <i>Land Resources Evaluation and Planning</i> (Evaluasi dan Perencanaan Sumberdaya Lahan)	PT	: Perguruan Tinggi
LS	: Lintang Selatan	Renstra	: Rencana Strategis
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat	Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
MBV	: <i>Mesodermal Baculo Virus</i> (Suatu penyakit pada udang yang disebabkan oleh virus <i>Bacilliform</i>)	Repelitada	: Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
MCK	: Mandi cuci kakus	RIPPDA	: Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
MCMA	: <i>Marine and Coastal Management Area</i> (Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Laut)	RTRWK	: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> (Perjanjian Kerjasama)	RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
MREP	: <i>Marine Resources Evaluation and Planning</i> (Evaluasi dan Perencanaan Sumberdaya Kelautan)	SD	: Sekolah Dasar
MSY	: <i>Maximum Sustainable Yield</i> (Hasil tangkapan lestari maksimum yang secara ekologis berkelanjutan)	SDA	: Sumberdaya Alam
P3O	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi	SDM	: Sumberdaya Manusia
Pantura	: Pantai Utara Jawa	SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa	SMU	: Sekolah Menengah Umum
Pemda	: Pemerintah Daerah	SWOT	: <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> (Analisis mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman)
PKA	: Perlindungan dan Konservasi Alam	TKPRD	: Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
PHRI	: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia	TN	: Taman Nasional
PJM	: Pembangunan Jangka Menengah	TN BBS	: Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
PJP	: Pembangunan Jangka Panjang	TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
PKSPL - IPB	: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB	TN WK	: Taman Nasional Way Kambas
PKT	: Perhutanan dan Konservasi Tanah	TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
PMA	: Penanaman Modal Asing	TSS	: <i>Total Suspended Solid</i> (Total padatan terlarut)
PMD	: Pemerintah Masyarakat Desa	TVRI	: Televisi Republik Indonesia
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri	UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan
Poldas	: Pola Dasar	UNILA	: Universitas Lampung
Prokasih	: Program Kali Bersih (Bapedalda)	UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
PSL	: Pusat Studi Lingkungan (Universitas Lampung)	URI	: <i>University of Rhode Island</i>
PST	: <i>Provincial Steering Team</i> (Tim Pengarah Propinsi untuk program pengelolaan pesisir)	USAID	: <i>United States Agency for International Development</i> (Badan khusus pemerintah Amerika Serikat untuk pengembangan internasional)
		ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif



1.1 Latar Belakang

Secara yuridis formal daerah Lampung ditetapkan sebagai Propinsi dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1964. Sebelumnya daerah ini merupakan salah satu wilayah karesidenan dari Propinsi Sumatera Selatan. Daerah ini terletak pada posisi geografis antara 3° 45' LS – 6° 45' LS dan 103° 40' BT – 105° 50' BT, di sebelah paling ujung tenggara Pulau Sumatera.

Kondisi topografi Propinsi Lampung sangat bervariasi mulai dari dataran rendah dan berawa sampai dengan perbukitan dan pegunungan yang tinggi. Daerahnya dibagi dalam 5 unit topografi, yaitu (1) berbukit sampai bergunung, dengan kemiringan 25%; (2) berombak sampai bergelombang, dengan kemiringan 8 – 15 %; (3) dataran alluvial, dengan kemiringan 0 – 3 %; (4) daerah dataran rawa pasang surut, dan (5) river basin.

Secara keseluruhan daerah Lampung memiliki luas daratan 35.376,5 km², panjang garis pantai Lampung 1.105 km (termasuk 69 pulau kecil) dengan dua teluk besar yaitu Teluk Lampung dan Teluk Semangka, serta 184 desa pantai dengan luas total 414.000 ha. Mengacu pada Pasal 3 UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah Lampung memiliki luas wilayah perairan pesisir lebih kurang 16.625,3 km² sehingga secara keseluruhan Propinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8 km².

Potensi wilayah pesisir tersebut sampai saat ini belum dikelola secara optimal, karena pemanfaatan yang dilakukan cenderung eksploitatif dan bersifat sektoral. Oleh karenanya dalam jangka panjang perlu dilakukan re-orientasi kebijaksanaan terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir. Salah satu tahapan dalam re-orientasi tersebut adalah diperlukan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pendayagunaan dan



Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera (foto:Pasus L.)

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Dengan Renstra ini tidak saja akan dicapai keterpaduan pengelolaan, tetapi akan diperoleh manfaat ganda bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Secara khusus ditetapkan 4 (empat) tujuan utama penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung (disingkat **Renstra Pesisir**), yang mengakomodasi :

- ♦ Tujuan Pembangunan Sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan
- ♦ Tujuan Konservasi Ekologis, yaitu melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir Lampung
- ♦ Tujuan Pembangunan Ekonomi, yaitu mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan
- ♦ Tujuan Administrasi, yaitu meminimalkan adanya konflik pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir, sehingga dapat dicapai suatu keterpaduan dan keberlanjutan program.

Sedangkan peran Renstra Pesisir adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional secara menyeluruh
2. Memberikan landasan yang konsisten bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi
3. Mengidentifikasi tujuan, dan sasaran dari setiap permasalahan serta mencari strategi penyelesaiannya

1.3 Ruang Lingkup Daerah Perencanaan

Secara administratif, Propinsi Lampung dibagi dalam 8 Kabupaten dan 2 Kota. Dari keseluruhan wilayah tersebut, hanya 6 (enam) kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir, yaitu: Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang

Bawang, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan 4 (empat) kabupaten lainnya, yaitu: Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro hanya terdiri dari wilayah daratan.

Sampai dengan tahun 1999, penduduk yang bermukim di Propinsi Lampung berjumlah lebih kurang 7 juta jiwa, terdiri dari 3,55 juta laki-laki dan 3,45 juta perempuan. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk berjalan konstan, maka diproyeksikan pada tahun 2000 penduduk Lampung akan berjumlah lebih kurang 7,11 juta jiwa.

Peta Wilayah Perencanaan Strategis Wilayah Pesisir Lampung dapat dilihat pada **Gambar 1**.

1.4 Proses Perencanaan

Rencana Strategis Pengelolaan wilayah Pesisir disusun dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional. Posisi Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung dalam konteks perencanaan dapat dilihat pada **Gambar 2**.

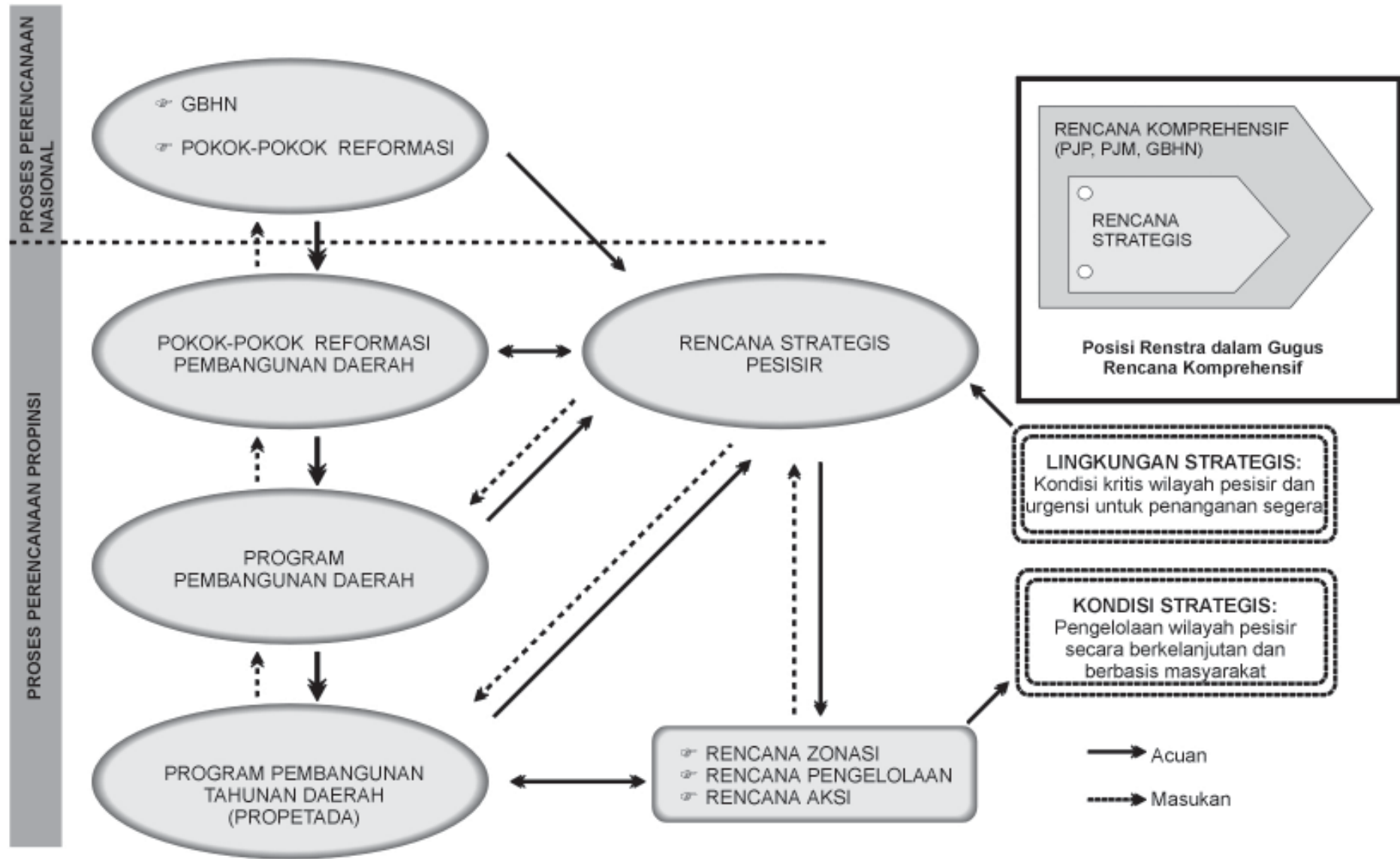
Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan dari proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di wilayah pesisir Lampung. Gambaran mengenai potensi dan permasalahan wilayah pesisir Lampung telah dipublikasikan dalam bentuk **Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung**.

Penyusunan Renstra Pesisir dilaksanakan melalui suatu proses koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara instansi terkait mulai dari propinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Secara khusus di tingkat propinsi, dibentuk Tim Kerja Renstra (*Renstra Working Group*) yang dibentuk oleh Tim Pengarah Propinsi (*Provincial Steering Team*).

Penjaringan dan pengumpulan data, informasi serta isu-isu prioritas dalam pengelolaan wilayah pesisir, dilakukan melalui beberapa tahapan



Gambar 1.Peta wilayah perencanaan strategis Pesisir Lampung.



Gambar 2. Posisi Renstra Pesisir Lampung dalam Proses Perencanaan



Workshop Renstra Pesisir di Gedung Pusiban, Bandar Lampung (foto: CRMP Lampung)

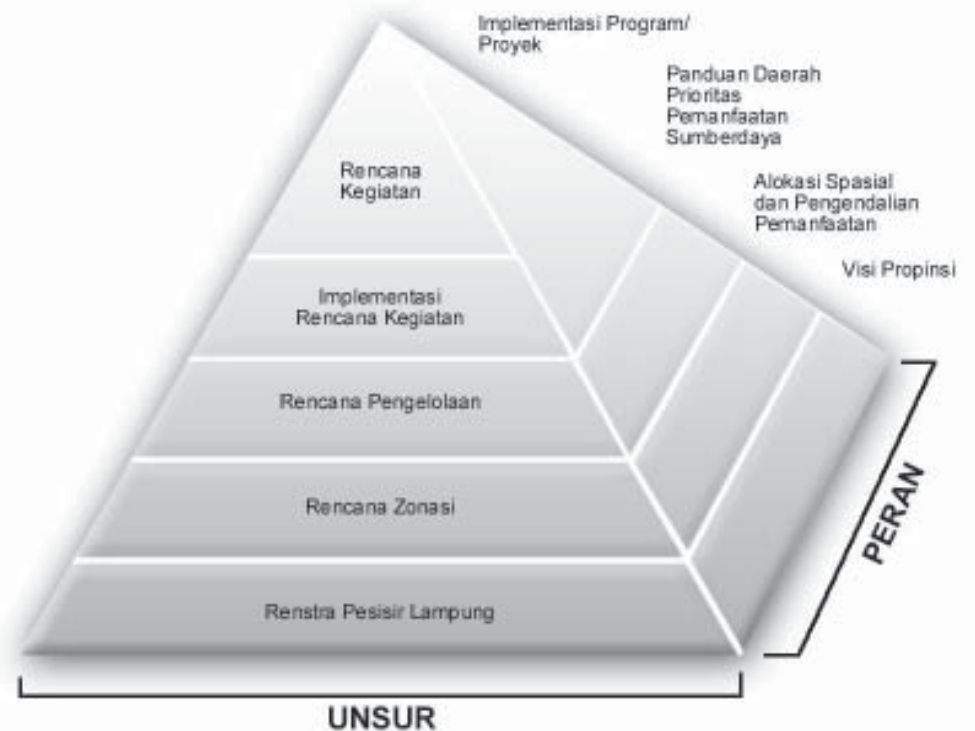
dengan mekanisme konsultasi publik berupa tatap muka, diskusi, dan dengar pendapat dengan seluruh *stakeholders* (masyarakat dan instansi terkait di daerah). Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut maka dirumuskan visi Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Lampung.

Renstra Pesisir ini merupakan suatu acuan dan kerangka dasar dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Berdasarkan Renstra ini dapat dikembangkan penyusunan perencanaan yang lebih rinci, seperti Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi untuk pemanfaatan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir (**Gambar 3**).

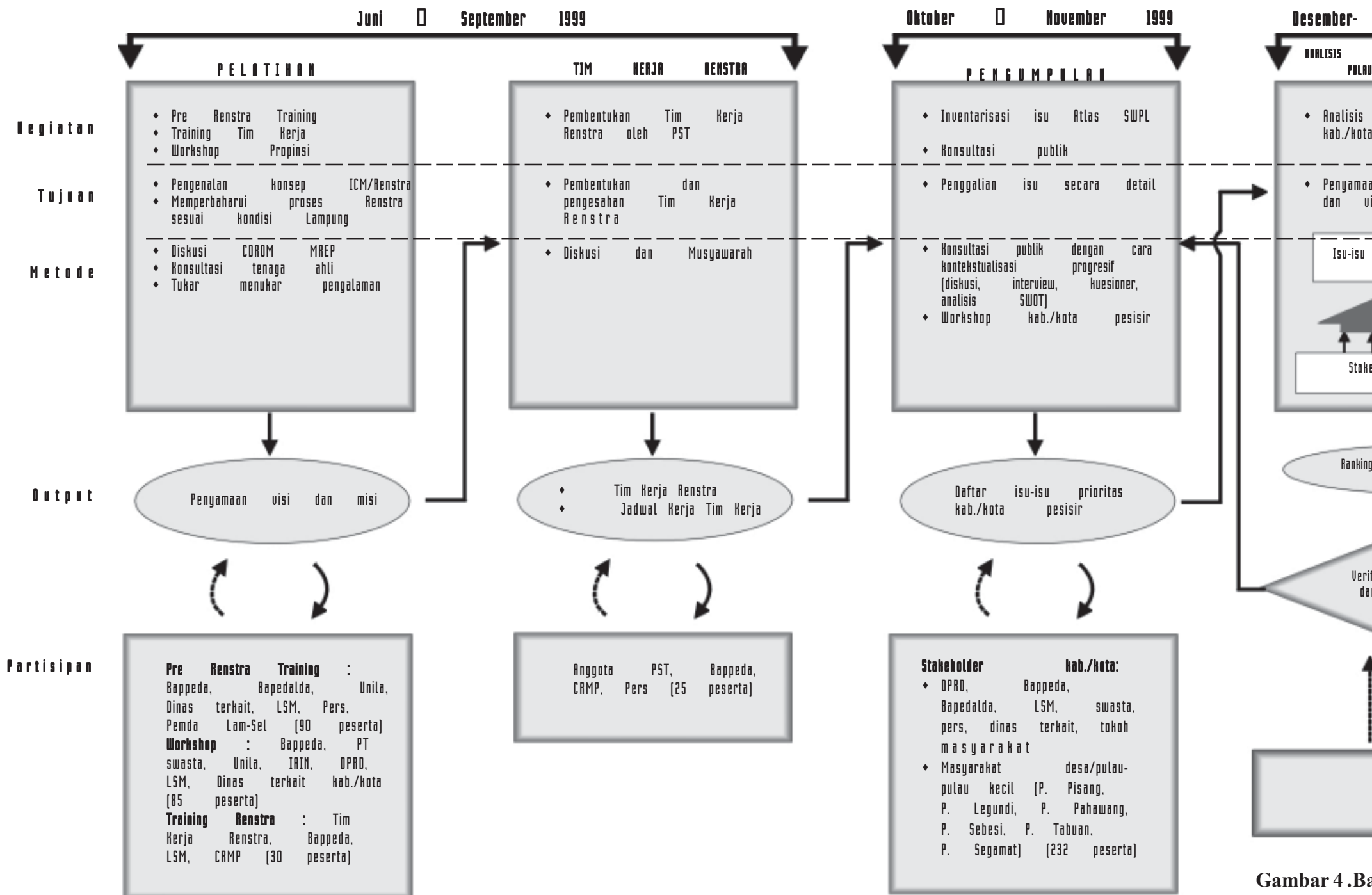
Bagan Alir Proses Pembuatan Renstra Pesisir Propinsi Lampung dapat dilihat pada **Gambar 4**.

1.5 Siklus Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

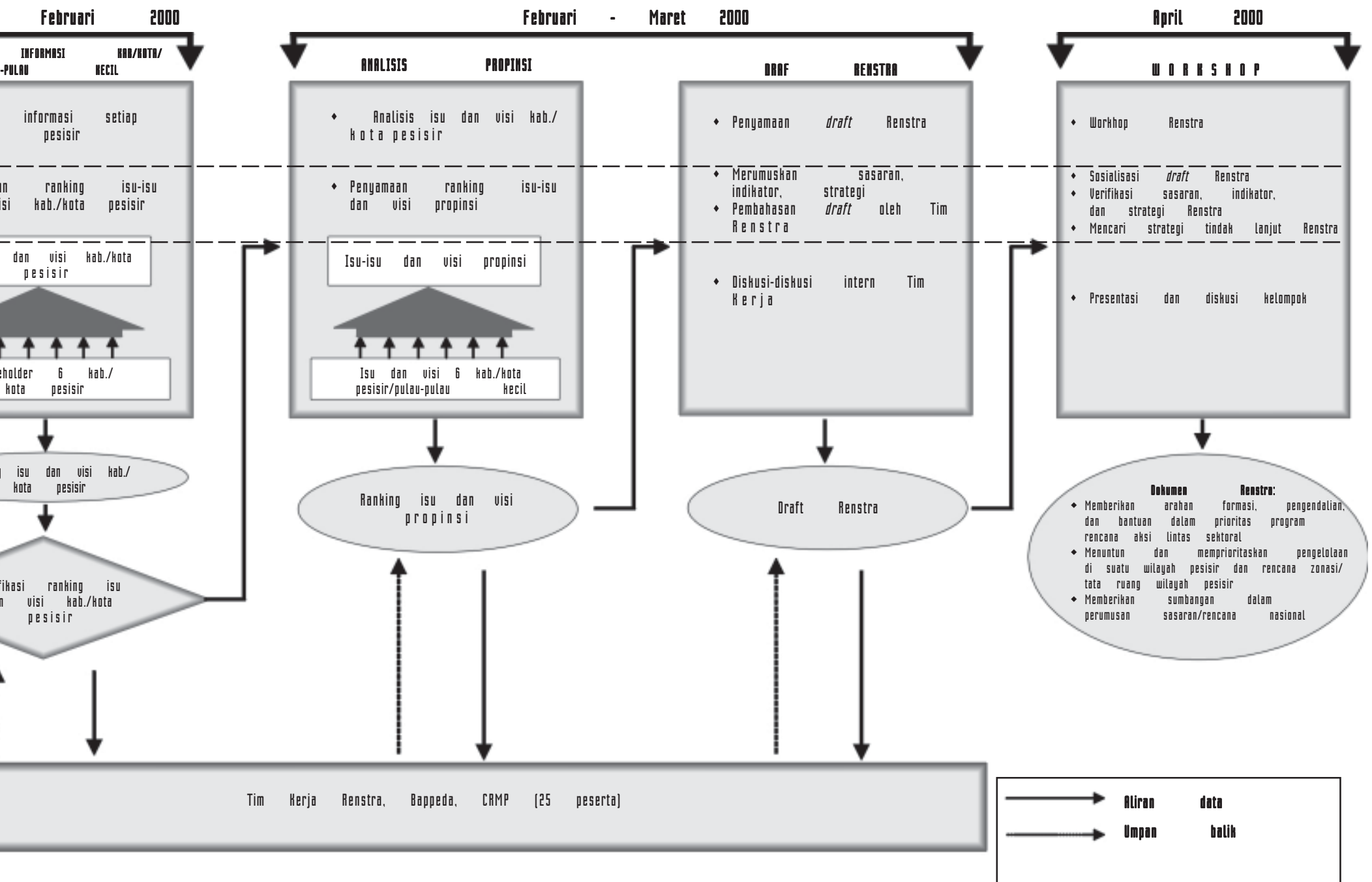
Berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU No. 22/1999 dinyatakan bahwa wilayah daerah propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dan kewenangan daerah kabupaten/kota sejauh sepertiga dari batas laut daerah propinsi. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, maka daerah dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir, termasuk jasa-



Gambar 3. Kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir Lampung (modifikasi dari: Hunt, Dutton, and Duff (1998))



Gambar 4. Ba



Proses Renstra Pesisir Lampung

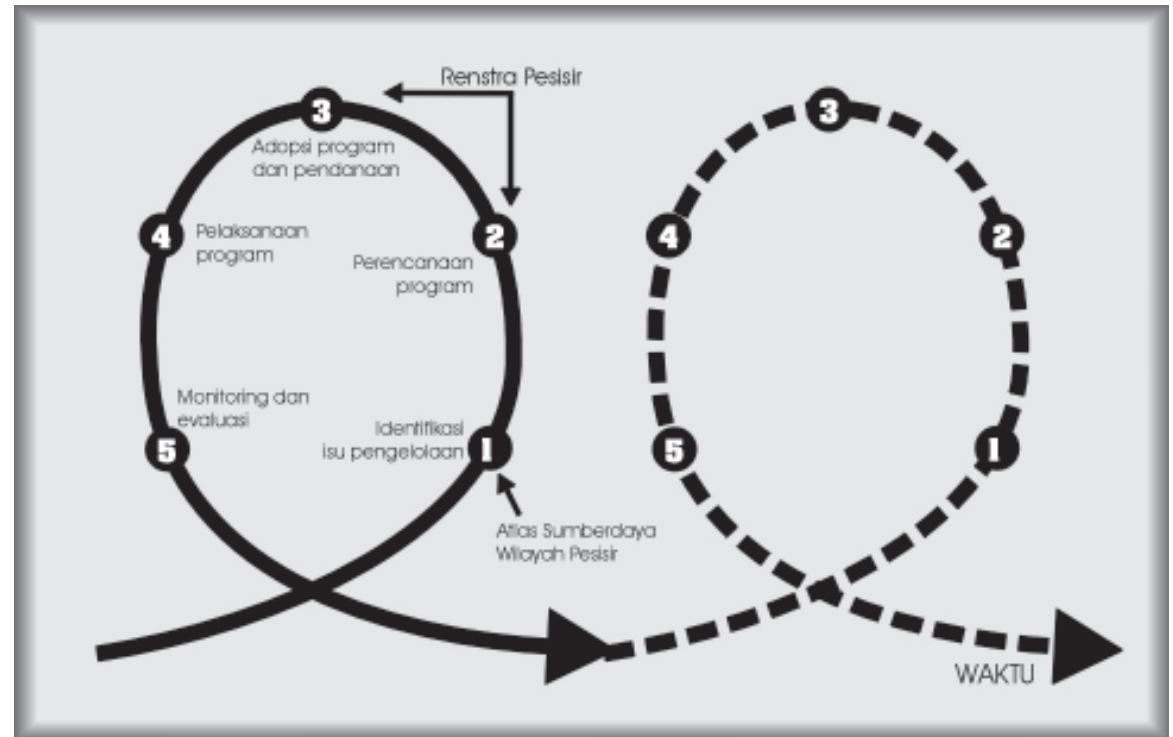
jasa lingkungan lainnya bagi kepentingan pembangunan daerah.

Sesuai dengan letak geografisnya, wilayah pesisir Lampung memiliki keragaman potensi sumberdaya pesisir dan laut. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pendaayagunaannya maka perlu ada satu keterpaduan pengelolaan. Secara khusus terdapat 3 (tiga) jenis keterpaduan yang diharapkan dalam implementasi konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu, yaitu : 1) keterpaduan sistem (dimensi spasial dan temporal), 2) keterpaduan fungsi (harmonisasi antar lembaga), dan 3) keterpaduan kebijakan (konsistensi program daerah dan pusat).

Berdasarkan kesepakatan internasional, proses pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan (**Gambar 5**). Siklus tersebut terdiri dari lima langkah berikut:

1. Identifikasi isu-isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir
2. Persiapan atau perencanaan program
3. Adopsi program dan pendanaan
4. Pelaksanaan program
5. Monitoring dan evaluasi

Pengalaman negara-negara tetangga (Sri Lanka, Thailand, dan Filipina) membuktikan bahwa dalam menerapkan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dibutuhkan waktu beberapa tahun, bahkan hanya untuk kawasan tertentu. Belajar dari pengalaman negara-negara tersebut, diharapkan diperoleh pencapaian waktu yang efektif bagi Propinsi Lampung untuk menyelesaikan satu siklus kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pengalaman juga menunjukkan, program akan menjadi lebih matang dan didukung *stakeholders* apabila telah berhasil melewati satu siklus. Biasanya, satu siklus kebijakan disebut satu generasi program.



Gambar 5 . Siklus Kebijakan Pengelolaan Pesisir Terpadu (Olsen *et al*, 1998)

Propinsi Lampung telah berhasil melewati tahap kedua dalam siklus kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang ditempuh dalam waktu yang relatif cepat.

Dokumen Renstra Pesisir yang merupakan langkah kedua dari siklus kebijakan, merupakan suatu dokumen dasar. Sehingga rencana-rencana yang lebih spesifik, seperti rencana zonasi (*zonation plan*), rencana pengelolaan (*management plan*), dan rencana aksi (*action plan*) disusun menjadi turunannya dan berisi visi serta tujuan yang menjadi arahan bagi ketiga tingkat perencanaan.

2.1 Profil Wilayah Pesisir Lampung

Wilayah pesisir Lampung merupakan pertemuan antara dua fenomena, yaitu *laut* (Laut Jawa dan Samudra Hindia) dan *darat* (pegunungan Bukit Barisan Selatan dan dataran rendah alluvial di bagian timur propinsi ini). Wilayah pesisir ini bermula dari daratan pasang air tinggi sampai ke pinggiran paparan benua (*continental shelf*). Semua itu menunjukkan perbedaan dua dunia dengan perbedaan flora dan fauna. Fenomena alam tersebut memberikan pengembangan proses di wilayah pesisir yang sangat unik dan spesifik. Dengan demikian, secara ekologis wilayah pesisir ini tidak berdiri sendiri, melainkan terpengaruh oleh faktor eksternal.

Wilayah pesisir Propinsi Lampung dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu Pantai Barat (210 km), Pantai Timur (270 km), Teluk Semangka (200 km), dan Teluk Lampung (160 km). Keempat wilayah tersebut mempunyai karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Keadaan alam daerah Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut: sebelah Barat dan Selatan, di sepanjang pantai, merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai lanjutan dari jalur pegunungan Bukit Barisan. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah, sedangkan ke dekat pantai sebelah Timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke Utara, merupakan daerah rawa-rawa perairan yang luas.

Terdapat perbedaan yang jelas antara wilayah pesisir Barat dengan wilayah pesisir Timur. Pantai Barat merupakan jalur wilayah pesisir yang sempit, berlereng hingga terjal (*cliffs; rocky shores*), sedangkan Pantai Timur merupakan hamparan *peneplein* atau dataran pantai yang landai dan luas, jauh ke pedalaman.

Iklim di perairan pesisir, terutama Pantai Barat Lampung dipengaruhi oleh Samudera Hindia yang dicirikan oleh adanya angin munson dan curah hujan yang tinggi, sekitar 2.500 - 3.000 mm/tahun. (Stasiun Kalianda, 1991). Angin berhembus dari arah Selatan selama bulan Mei sampai

September, dan dari arah yang berlawanan selama bulan November sampai Maret.

Gelombang besar di Pantai Timur dan Teluk Lampung terjadi pada bulan Juni-November. Tinggi gelombang berkisar antara 0,50 - 1,00 meter.

Pertumbuhan penduduk mempunyai efek balik yang serius terhadap lingkungan pesisir karena migrasi dari daerah lain terutama di tempat-tempat yang padat populasinya seperti Bandar Lampung (4.500 jiwa/km²)

2.2 Potensi dan Masalah Sumberdaya Alam dan Manusia

Potensi dan Peluang Sumberdaya Alam

Propinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera, yang sarat dengan aliran penumpang dari Jawa ke Sumatera melalui 46 kapal



Penangkapan ikan menggunakan payang di Teluk Lampung (foto: CRMP Lampung)



Akibat pengeboman, perlu waktu puluhan tahun terumbu karang tumbuh kembali
(foto: Tanjung Putus, CRMP Lampung)

Ferry Merak- Bakauheni, serta aliran barang sekitar 75.000 peti kemas/tahun melalui kapal laut yang bongkar-muat di Pelabuhan Panjang. Kondisi tersebut menjadikan Lampung sebagai daerah ‘*spill over*’ pembangunan di Pulau Jawa. Pada sisi lain, posisi strategis ini memberi peluang pada perkembangan Lampung sebagai propinsi yang sedang giat melaksanakan pembangunan.

Wilayah pesisir Lampung dicirikan dengan produktifitas ekosistem yang tinggi, sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian Propinsi

Pentingnya Terumbu Karang bagi masyarakat adalah:

- Menyediakan tempat untuk rekreasi dan penelitian
- Menyediakan habitat bagi ikan-ikan ekonomis penting
- Melindungi garis pantai dari erosi pada musim Timur di Pantai Timur Lampung
- Memperkaya pantai yang berpasir putih
- Menyediakan bahan farmasi dan kimia
- Menyediakan perlindungan bagi habitat langka

Lampung selama ini. Ditinjau dari segi ekonomi, sumberdaya alam dan jasa lingkungan pesisir Lampung cukup tahan terhadap pengaruh krisis total yang melanda negara ini.

Terumbu karang, terutama di Teluk Lampung, merupakan aset sumberdaya alam pesisir yang mampu menopang kelestarian perikanan serta jasa lingkungan, baik keindahannya maupun fungsi perlindungan pantainya, merupakan kekuatan yang spesifik untuk menunjang perekonomian di propinsi ini. Hasil survei (CRMP, 1998) menunjukkan bahwa potensi terumbu karang sebagai obyek wisata dan habitat ikan masih cukup besar, dengan penutupan lebih dari 50% di kawasan Teluk Lampung. Walaupun demikian, di beberapa lokasi menunjukkan penutupan karang yang sangat rendah, seperti di luar kawasan Teluk/gugus Krakatau yang kurang dari 10%. Potensi terumbu karang di Lampung terdiri dari jenis karang tepi (*fringing reef*) dengan luasan relatif 20-60 m² sampai kedalaman maksimum 17 m. Sejumlah terumbu karang menyebar (*patch reef*) tumbuh dengan baik di sisi Barat Teluk Lampung. Terumbu karang di kawasan Selat Sunda (termasuk Teluk Lampung) memiliki sekitar 113 jenis, dengan rata-rata keanekaragaman per lokasi agak rendah (49 jenis). Sementara itu terdapat sekitar 1.600 unit perikanan bagan yang menggantungkan penghasilan tangkapannya di sekitar terumbu karang.

Penangkapan ikan di laut merupakan kegiatan ekonomi yang penting untuk propinsi ini, karena kontribusinya dalam penyediaan protein hewani. Produksi perikanan laut yang didaratkan di Teluk Lampung sekitar 51.000 ton/tahun, di Pantai Timur sekitar 43.000 ton/tahun, dan di Pantai Barat sekitar 10.000 ton/tahun (data 1997). Pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan Pantai Barat diduga baru mencapai 62 %, sehingga peluang pengembangan perikanan tangkap di perairan ini masih besar apalagi untuk daerah lepas pantai dan ZEE. Sampai saat ini, perairan Pantai Barat merupakan habitat berbagai jenis lobster (*Panulirus* spp.) yang merupakan produk dari nelayan lobster di Pantai Barat. Sedang potensi sumberdaya ikan di perairan Pantai Timur Lampung cukup kecil, karena tingkat pemanfaatannya telah mencapai sekitar 90 %. Walaupun estimasi MSY (*Maximun Sustainable Yield*) dengan pendekatan “*surplus production model*” tersebut kurang begitu akurat karena keterbatasan data, namun pengelolaan terhadap sumberdaya ikan di perairan Lampung sudah waktunya diupayakan, hal ini karena telah ada indikasi terjadinya “*over fishing*” (tangkap lebih). Indikasi ini terlihat di Pusat Pendaratan Ikan, yaitu mengecilnya ukuran hasil tangkapan ikan.

Pantai yang indah dengan batuan-batuan bulatnya (di Tebaka, Lampung Barat) serta gelombang yang sangat besar hampir di sepanjang Pantai Barat, merupakan daya tarik tersendiri bagi pengembangan pariwisata di masa datang. Potensi pariwisata tersebut dikaitkan dengan keindahan 69 pulau-pulau kecil serta cagar alam lautnya (Krakatau dan TNBBS), akan merupakan daya tarik yang kuat bagi wisatawan untuk berkunjung ke propinsi ini.

Mangrove yang berkembang dengan baik akan memberikan fungsi dan keuntungan yang besar, baik untuk mendukung sumberdaya perikanan laut dan budidaya, memberi pasokan bahan bangunan dan produk-produk lain, maupun untuk melindungi pantai dari ancaman erosi. Potensi mangrove di Lampung mengalami penurunan sangat drastis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sebagai akibat konversi dan pembabatan hutan mangrove yang tidak terkendali. Saat ini, hanya sekitar 2.000 ha mangrove yang

tersisa dari 20.000 ha mangrove yang pernah ada (tahun 1990-an). Menumbuh-kembangkan luasan mangrove merupakan tantangan bagi masyarakat Lampung, untuk meningkatkan manfaat mangrove bagi kehidupan.

Vegetasi mangrove di Pesisir Lampung:

- Biasanya berasosiasi dengan terumbu karang:
Bakau (*Rhizophora mucronata*)
- Pada lahan yang baru terbentuk : Api-api (*Avicennia marina* dan *Avicennia alba*)
- Di daerah hulu : Nipah (*Nypa fruticans*), Pedada (*Sonneratia caseolaris*) dan *Xylocarpus granatum*
- Di daerah muara : Buta-buta (*Bruguiera parviflora* dan *Excoecaria agallocha*)

Fauna penting yang tinggal di mangrove di Pantai Timur dan Kawasan Teluk:

- Burung air Pecuk Ular (*Anhinga melanogaster*)
- Bangau Tontong (*Leptotilus javanicus*)
- Milky Stork (*Mycteria cinerea*)
- Storm's Stork (*Ciconia storm*)
- Kuntul atau Pacific Reef Egret (*Egretta sacra*)
- Itik (*Anas gibberifrons* dan *Anas querquedula*)
- Kepiting bakau (*Scylla serrata*)
- Udang dan berbagai jenis ikan



Habitat Padang Lamun di Padang Cermin, Lampung Selatan
(foto: CRMP Lampung)

Habitat padang lamun dan rumput laut alami menyediakan fungsi ekologis sebagai pelindung pantai dari gelombang dan berfungsi sebagai filter alami yang menjaga kualitas perairan supaya tetap jernih, dengan mengendapkan material tersuspensi dari pelumpuran (siltasi) di daratan. Selain itu, padang lamun merupakan daerah asuhan bagi ikan-ikan kecil dan anak-anak penyu (tukik) yang baru menetas.

Eksploitasi rumput laut alami, seperti yang terjadi di sepanjang Pantai Barat, cenderung tidak berwawasan lingkungan, karena metode pemanenan yang merusak. Survei CRMP di tingkat pedagang didapatkan, bahwa Pantai Barat menyumbang sekitar 4 ton rumput laut alami (*Gelidium* sp.) kering per bulan. Untuk menjamin kelangsungan usaha tradisional masyarakat setempat, perlu dilakukan pengkajian tentang potensi lestari rumput laut alami di wilayah tersebut.

Rumput laut jenis *Euchema cottonii* dibudidayakan di kawasan Teluk Lampung, yaitu di pantai Padang Cermin, sedang yang alami dipanen nelayan di pantai Kalianda, Teluk Lampung dan daerah Bengkuntat, Pantai Barat.

Potensi perairan khususnya Teluk Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut (mutiara dan ikan) seluas 56.000 ha (Winanto, 1994). Dari potensi tersebut, seluas 5.000 ha telah diberikan sebagai wilayah konsesi kepada tiga PMA yaitu PT. Hikari, PT. Kyokko Shinju, dan PT. Lampung Indah Mutiara. Produksi mutiara setiap tahunnya dari ketiga PMA tersebut diperkirakan 500.000 butir mutiara. Budidaya ikan kerapu dan ikan karang lainnya belum diusahakan secara optimal, sehingga peluang pengembangannya masih terbuka. Pilot proyek budidaya Kerapu Bebek dan Kerapu Macan sedang dilakukan antara Dinas Perikanan, Bappeda, Balai Budidaya Laut dan swasta di Tanjung Putus. Namun masih terdapat kendala teknologi yang cukup besar. Perlu adanya survei potensi-potensi lokasi budidaya dan juga teknologi budidaya yang tepat untuk pengembangan pilot proyek ini.

Propinsi Lampung memiliki 1,3 juta ha kawasan hutan, seluas 422.500 ha (12,8%) telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Selain kawasan konservasi hutan, Lampung memiliki kawasan konservasi laut dengan pulau-pulauanya. Beberapa lokasi yang diusulkan sebagai taman buru, suaka marga satwa dan cagar alam rawa air tawar sebagai habitat berbagai jenis burung air (Rawa Kandis dan Rawa Pacing). Pusat keanekaragaman hayati yang utama terdapat di kawasan-kawasan konservasi, yang sebagian arealnya meliputi wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan laut. Kawasan konservasi tersebut antara lain Taman Nasional, Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Pantai Barat (di Tanjung Keramat, di perbatasan Bengkulu) seluas 1.500 ha dan Tanjung Cina, Bengkuntat (seluas 20.000 ha) dan Taman Nasional Way Kambas (seluas 130.000 ha) di Pantai Timur, dan Cagar Alam Laut Gugus Kepulauan Krakatau (daratan seluas 2.535 ha dan laut seluas 12.000 ha) di Selat Sunda.

Kecuali tipe vegetasi alami, maka pesisir Lampung memiliki berbagai ragam komoditas tumbuhan dari jenis tanaman budidaya, antara lain : (1) Perkebunan kelapa (*Cocos nucifera*), terutama di wilayah Padang Cermin, (2) Komunitas tanaman dalam areal kebun talun, dengan jenis utama Lada (*Piper nigrum*) dan Pisang (*Musa sp.*), dan (3) persawahan padi (*Oryza sp.*).

Kelemahan dan Ancaman Sumberdaya alam

Propinsi Lampung dengan penduduknya yang meningkat pesat pada periode 1970 sampai 1990-an (lebih dari 5 % per tahun), menyebabkan penyebaran penduduk tidak merata dan berubahnya pola hidup masyarakat. Namun, dengan berkurangnya program transmigrasi, baik spontan maupun pemerintah, pertumbuhan penduduk Lampung selama 10 tahun terakhir ini hanya 1.02%. Jumlah penduduk di 6 kabupaten pesisir yang diperkirakan sebesar 4,7 juta jiwa (BPS, 1998), satu juta jiwa diantaranya merupakan penduduk Kota Bandar Lampung.

Terdapat 184 desa pantai dari 2024 desa yang ada di Lampung (Wirawan, dkk 1999; BPS, 1998). Sebagian besar masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya secara langsung di wilayah ini. Tetapi apa yang dapat dilihat adalah makin terpuruknya kualitas hidup mereka. Eksploitasi secara besar-besaran yang terjadi di masa lalu dengan pembangunan telah menyebabkan daya dukung ekologis wilayah pesisir terlampaui, sehingga dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya berpengaruh langsung kepada masyarakat desa pesisir. Akses masyarakat ke daerah pantai pun banyak tertutup oleh pengembangan di wilayah ini.

Proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) dan bertambah dangkalnya perairan pantai (sedimentasi/pengendapan), pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara alami. Demikian pula halnya dengan yang terjadi di beberapa garis pantai Propinsi Lampung. Namun demikian, khusus di kawasan Pantai Timur Lampung, kecepatan dan akibat yang ditimbulkannya, juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang telah membat tanaman pelindung pantai (mangrove) dan ‘membangun’



Tambah semi intensif di Teluk Lampung
(foto: CRMP Lampung)

di daerah yang secara geologi masih labil. Di kawasan Pantai Timur, erosi yang kuat ditemui antara Labuhan Maringgai (garis pantai mundur 300 meter sejak tahun 1992), Ketapang hingga Bakauheni. Menurut penuturan beberapa tokoh masyarakat, kondisi yang parah akibat erosi seperti yang terjadi pada saat sekarang (terutama pada musim Timur), hampir sama dengan kondisi tahun 1950-an atau tahun 1970-an, hal ini menunjukkan kondisi garis pantai yang dinamis (CRMP, 1998). Masalah erosi pantai yang terjadi di Pantai Timur (khususnya Labuhan Maringgai) tersebut telah menyebabkan kerugian material, seperti lenyapnya bangunan-bangunan masyarakat dan fasilitas umum serta menimbulkan rasa tidak aman/nyaman bagi penduduk setempat.

Di Pantai Barat, proses abrasi terjadi hampir di sepanjang pantai, meliputi Curup-Siging, Teluk Krui dan Negeri (CRMP, 1998). Proses

alami ini relatif kecil dan berskala lokal, dan masyarakat telah mengantisipasi dengan tidak membangun di daerah labil tersebut. Namun demikian, penambangan batu hitam di pantai, di perkirakan akan mempercepat laju erosi pantai dan akan mengancam jalan utama di sepanjang Pantai Barat. Kawasan erosi pantai yang lain terjadi di Teluk Lampung (di antara kaki Gunung Rajabasa dengan Ketapang, Kalianda), selain itu, erosi juga terdapat di Teluk Semangka antara Kota Agung dan Sukabanjat sepanjang sekitar 1,5 km.

Sesuai dengan hukum keseimbangan, selain terjadi proses erosi akan ada kawasan pantai lain yang bertambah (tanah timbul) terutama di dekat muara-muara sungai. Hal ini terjadi di muara Tulang Bawang, Muara Seputih, dan muara Sekampung. Masalah yang muncul dengan adanya tanah timbul biasanya tentang kepemilikan tanah, status tanah, penggarapan dan penjualan illegal oleh oknum-oknum aparat desa atau institusi lainnya.

Rehabilitasi tanaman pelindung pantai (mangrove) oleh Kanwil/



Abrasi di Labuhan Maringgai, masalah yang serius di Pantai Timur Lampung
(foto: CAMP Lampung)

Dinas Kehutanan Propinsi Lampung di beberapa desa di Pantai Timur, namun kendala keberhasilannya masih besar. Hasil reboisasi bersama masyarakat masih dapat terlihat di Desa Margasari di daerah tanah timbul. Reboisasi juga telah dilaksanakan oleh pihak Tambak Inti Rakyat (PT.DCD dan CPB) untuk melindungi areal pertambakan dengan memelihara 'jalur hijau' mangrove. Sedang penanganan secara fisik (*hard structure*) dengan membuat tanggul penahan gelombang, seperti di Labuhan Maringgai telah dilaksanakan oleh penduduk setempat. Dinas PU Pengairan mengusulkan serta dalam proses pembuatan proyek percontohan penanggulangan erosi pantai dengan masyarakat.

Sampai saat ini belum ada kajian secara komprehensif tentang fenomena erosi pantai dan belum ada penanganan secara terpadu tentang isu ini.

Terhadap pengrusakan terumbu karang, telah dilakukan penindakan secara tegas berupa penangkapan dan operasi laut yang dilaksanakan oleh TNI AL. Namun demikian, belum ada upaya penanganan secara terpadu untuk menyelesaikan permasalahan pengrusakan habitat pesisir.

Kerusakan sumberdaya alam di wilayah pesisir Lampung adalah sepenuhnya buatan manusia, karena:

- ♦ Manusia pada umumnya lebih menyukai permukiman, lokasi industri dan industri pariwisata massal di kawasan pantai
- ♦ Pola penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun dan trawl, terutama di kawasan terumbu karang (Teluk Lampung) dan gejala tangkap lebih (*over fishing*) dapat dibuktikan dengan makin mengecilnya ukuran hasil tangkapan ikan yang didaratkan di TPI
- ♦ Penggalan batu karang untuk pembangunan rumah, jalan, dan reklamasi di Teluk Lampung dan penambangan batu apung di Cagar Alam Laut Krakatau
- ♦ Menjadikan pantai dan laut sebagai tempat pembuangan limbah, baik dari rumah tangga maupun dari industri. Ancaman terhadap pencemaran perairan teluk Kota Bandar Lampung berasal dari limbah domestik sekitar sejuta penduduk dan dari sekitar 42 industri di kota ini.

Proses pengrusakan sumberdaya alam di wilayah pesisir Lampung masih belum berhasil dikendalikan dan diatasi pemerintah, apalagi pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan sekarang ini. Kalau dicermati, krisis ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan sub-sektor perikanan yang berorientasi ekspor, seperti tambak udang dan perikanan tuna, pada awalnya. Tetapi pada saat harga sarana produksi juga sudah naik, maka dampak positifnya pun mengecil.

Di sepanjang garis pantai Timur telah mengalami suksesi pemanfaatan lahan, terutama oleh petambak-petambak skala kecil sendiri atau perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan tambak. Survei CRMP bulan Mei 1999 dengan pemetaan bersama masyarakat mendapatkan informasi bahwa luas tambak di kawasan Rawa Sragi yaitu dari Labuhan Maringgai (desa Karya Makmur) sampai Palas (desa Pematang Pasir) sekitar 4.600 ha. Secara ekologis, keberlanjutan usaha tambak tersebut sangat rentan. Walaupun dalam jangka pendek usaha tambak mereka sangat menguntungkan, namun ancaman terhentinya usaha pertambakan masih besar. Pola pengembangan pertambakan udang (khusus udang windu, *Penaeus monodon*) yang terjadi di Lampung hampir sama dengan pola pengembangan tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura), yaitu mengandalkan produksi satu jenis komoditi tanpa pengelolaan air yang terpadu dan mengkonversi mangrove secara besar-besaran ditambah lagi dengan pencemaran pantai. Penurunan kualitas air tersebut telah menyebabkan wabah virus (MBV), misal pada tahun 1996.

Pengalaman di masa krisis ekonomi menunjukkan bahwa pertambakan udang merupakan bidang usaha yang tidak terpengaruh oleh krisis moneter. Pengalaman ini akan memicu pembukaan lahan tambak baru dengan mengkonversi sawah di Rawa Sragi ataupun mengkonversi mangrove secara tidak terkendali. Investor tidak segan-segan membatat jalur hijau (*green belt*) di Pantai Timur. Hal ini menyebabkan usaha budidaya udang di Lampung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Tekanan terhadap wilayah pesisir karena konversi mangrove juga flora pantai lainnya akan menyebabkan perubahan yang cepat dan tidak dapat

diprediksi, seperti erosi Pantai Timur yang semakin besar dan meluas serta hilangnya tanah-tanah produktif untuk pertanian dan perkebunan.

Jadi jelas bahwa wilayah ini mempunyai karakteristik ekologi yang khas dan sangat rentan terhadap perubahan akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Budidaya udang dalam jangka waktu panjang adalah mustahil, jika perhatian terhadap pengelolaan aspek lingkungan diabaikan.

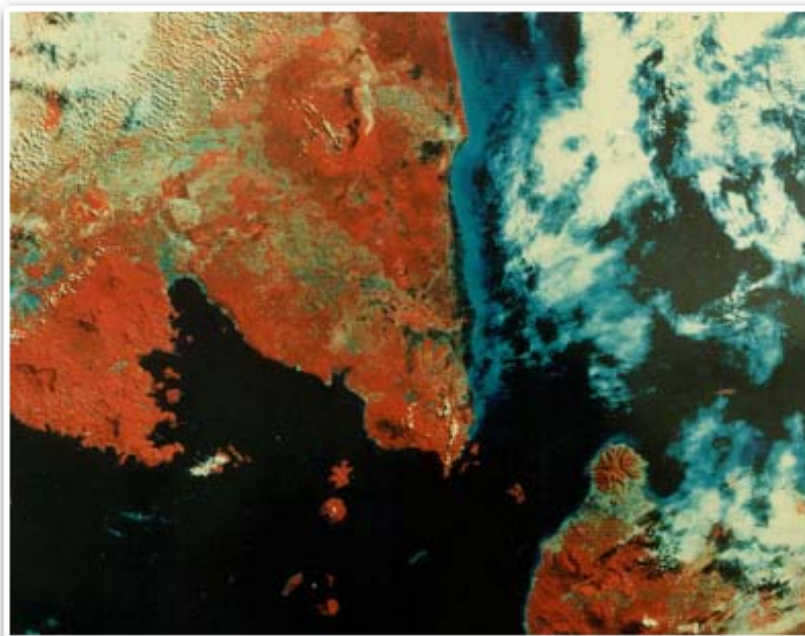
Ancaman terhadap usaha perikanan laut, baik budidaya maupun penangkapan, menjadi semakin besar karena degradasi lingkungan yang menyebabkan penurunan stok ikan dan adanya konflik sosial di antara pengguna sumberdaya ikan (nelayan). Persoalan nyata dalam perikanan tangkap adalah persaingan antar nelayan di daerah penangkapan ikan, karena sumberdaya dan daerah operasinya menjadi terbatas, sementara jumlah unit penangkapan ikan yang beroperasi semakin meningkat (1989 terdapat 2 juta upaya sedang 1997 terdapat 3 juta trip). Pengoperasian *trawl* yang ilegal masih terdapat di wilayah pesisir, menyebabkan konflik sosial dengan nelayan tradisional terutama di muara sungai Mesuji, Teluk Lampung, dan Tulang Bawang. Konflik sosial lain terjadi antara nelayan tradisional di Teluk Lampung dengan budidaya mutiara yang berkaitan dengan alur pelayaran mereka.

Masih terdapatnya armada perikanan yang menggunakan bahan peledak, seperti yang dilakukan beberapa nelayan bagan merupakan ancaman yang besar terhadap kelestarian sumberdaya ikan terutama di kawasan Teluk dan Lampung Barat. Penggunaan bom ikan, telah menyebabkan kerusakan terumbu karang di Teluk Lampung rusak 70% (estimasi dari survei *Manta tow* dan LIT, 1998).

Penurunan kualitas perairan akibat pencemaran di wilayah Pantai Timur dan Teluk Lampung merupakan ancaman bagi pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa-jasa lingkungannya. Di propinsi ini terdapat 160 unit industri PMDN dan 33 unit industri PMA skala menengah dan besar (BKPM, 1997). Berdasar jenisnya, sebagian besar merupakan agroindustri, yang didominasi oleh 35 unit industri tapioka. Limbah industri tersebut telah menyebabkan penurunan kualitas perairan, baik di

sungai maupun di wilayah pesisir sekitar muara sungai. Tiga sungai besar (Way Pangubuan, Way Sekampung dan Way Tulang Bawang) secara intensif dialiri oleh limbah industri, dengan kisaran BOD dan COD-nya masing masing 123-296 mg/l dan 220-389 mg/l (Prokasih 1995-1998).

Selain degradasi lingkungan pesisir oleh pencemaran industri yang terdapat di hulu, wilayah ini terkena dampak yang serius akibat degradasi 4 DAS utama yang mengalir ke Pantai Timur (Mesuji, Tulang Bawang, Seputih dan Sekampung) dan 2 DAS yang mengalir ke kawasan Teluk (Semangka dan Ulubelu-Siring-Napal). Degradasi DAS tersebut telah menyebabkan kekeruhan dan sedimentasi di kawasan Teluk Semangka, yang diidentifikasi dari tingginya padatan tersuspensi (TSS) dari citra Landsat 1996-1998.



Citra Landsat TM pesisir Timur Lampung, tahun 1998 (foto: CRMP Lampung)

Kekuatan dan Kelemahan Kelembagaan

Secara kelembagaan, usaha pengembangan wilayah pesisir propinsi ini memiliki beberapa kekuatan. Dengan dasar UU No. 22 tahun 1999, kewenangan daerah akan menjadi lebih besar dalam mengurus wilayahnya sendiri.

Adanya komitmen instansi terkait, seperti Bappeda, Dinas Perikanan, Kehutanan, Bapedalda, PU Pengairan dan Perguruan Tinggi dikoordinasikan oleh Bappeda untuk melaksanakan pengembangan di wilayah pesisir, merupakan kekuatan yang dapat diandalkan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Komitmen dari institusi pemerintah

yang ingin membangun bersama wilayah pesisir bersama dengan *stakeholders* dari non-pemerintah, diharapkan masing-masing instansi terkait akan membuat program yang terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung.

Selain faktor-faktor eksternal yang mengancam kesejahteraan mereka, ditinjau dari sumberdaya manusianya, para pengguna sumberdaya pesisir sebagian besar mempunyai keterampilan dan modal usaha yang lemah. Keterampilan mereka biasanya hanya bertani dan nelayan. Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sumberdaya alam

secara lestari, karena minimnya sarana dan prasarana pendidikan di desa-desa pesisir, juga merupakan ancaman terhadap kesejahteraan hidup mereka. Sedang penanganan terhadap kebutuhan pendidikan dan kesehatan dasar dari pemerintah masih kurang.

Kurangnya koordinasi dan prioritas pembangunan dari lembaga-lembaga pengelola wilayah pesisir masih terjadi, sehingga pengembangan wilayah pesisir masih tertinggal dibanding dengan wilayah lain.

Kelemahan yang cukup menonjol dari sudut kelembagaan antara lain:

- ♦ Jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir sangat minim
- ♦ Masih lemahnya pemahaman tentang hukum lingkungan baik di tingkat masyarakat maupun aparat
- ♦ Koordinasi antar instansi terkait masih lemah

- ♦ Pengusulan program penanganan pesisir masih egosektoral
- ♦ Koordinasi dan pengawasan dalam penertiban kegiatan perikanan belum berjalan dengan baik
- ♦ Mekanisme perencanaan belum dilaksanakan secara *bottom-up*
- ♦ Sistem pembinaan profesi sumberdaya aparatur belum konsisten
- ♦ Masih terbatasnya/kurangnya laporan instansi terkait tentang potensi yang ada di daerah
- ♦ Rencana tata ruang wilayah pesisir belum ada
- ♦ Sarana dan prasarana operasional masih kurang (Kompilasi hasil *Workshop* Renstra 1999).

2.3 Isu-isu Pengelolaan Kabupaten, Kota, dan Pulau-pulau Kecil

Berdasarkan hasil identifikasi isu pengelolaan wilayah pesisir yang dimuat dalam Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung dan hasil konsultasi publik yang telah dilaksanakan pada Bulan Oktober – November 1999 dan pada Bulan Januari – Maret 2000, didapatkan 6 (enam) - 10 (sepuluh) isu yang menjadi prioritas untuk setiap kabupaten (isu prioritas) dan kota pesisir, serta 5 (lima) isu prioritas untuk pulau-pulau kecil. Isu-isu pengelolaan tersebut adalah:

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Isu Prioritas:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
4. Degradasi habitat wilayah pesisir
5. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
6. Ancaman intrusi air laut
7. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
8. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut
9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, dan banjir)
10. Pencemaran wilayah pesisir

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Isu Prioritas:

1. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
4. Degradasi habitat wilayah pesisir
5. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut
6. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
7. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)
8. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

KOTA BANDAR LAMPUNG

Isu Prioritas:

1. Pencemaran wilayah pesisir
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
5. Ancaman intrusi air laut dan langkanya air bersih
6. Degradasi habitat wilayah pesisir
7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya

KABUPATEN TULANG BAWANG

Isu Prioritas:

1. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Pencemaran wilayah pesisir
4. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
5. Degradasi habitat wilayah pesisir
6. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia



Gambar 6. Peta lokasi konsultasi publik dengan *stakeholders* dalam proses Renstra Pesisir Lampung.



Gambar 6. Peta isu utama Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan dan Lampung Timur.

KABUPATEN TANGGAMUS

Isu Prioritas:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
4. Degradasi habitat wilayah pesisir
6. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
7. Pencemaran wilayah pesisir
8. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut
9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Isu Prioritas:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Degradasi habitat wilayah pesisir
4. Pencemaran wilayah pesisir
5. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
6. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
7. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut
8. Ancaman intrusi air laut

PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA

Isu Prioritas:

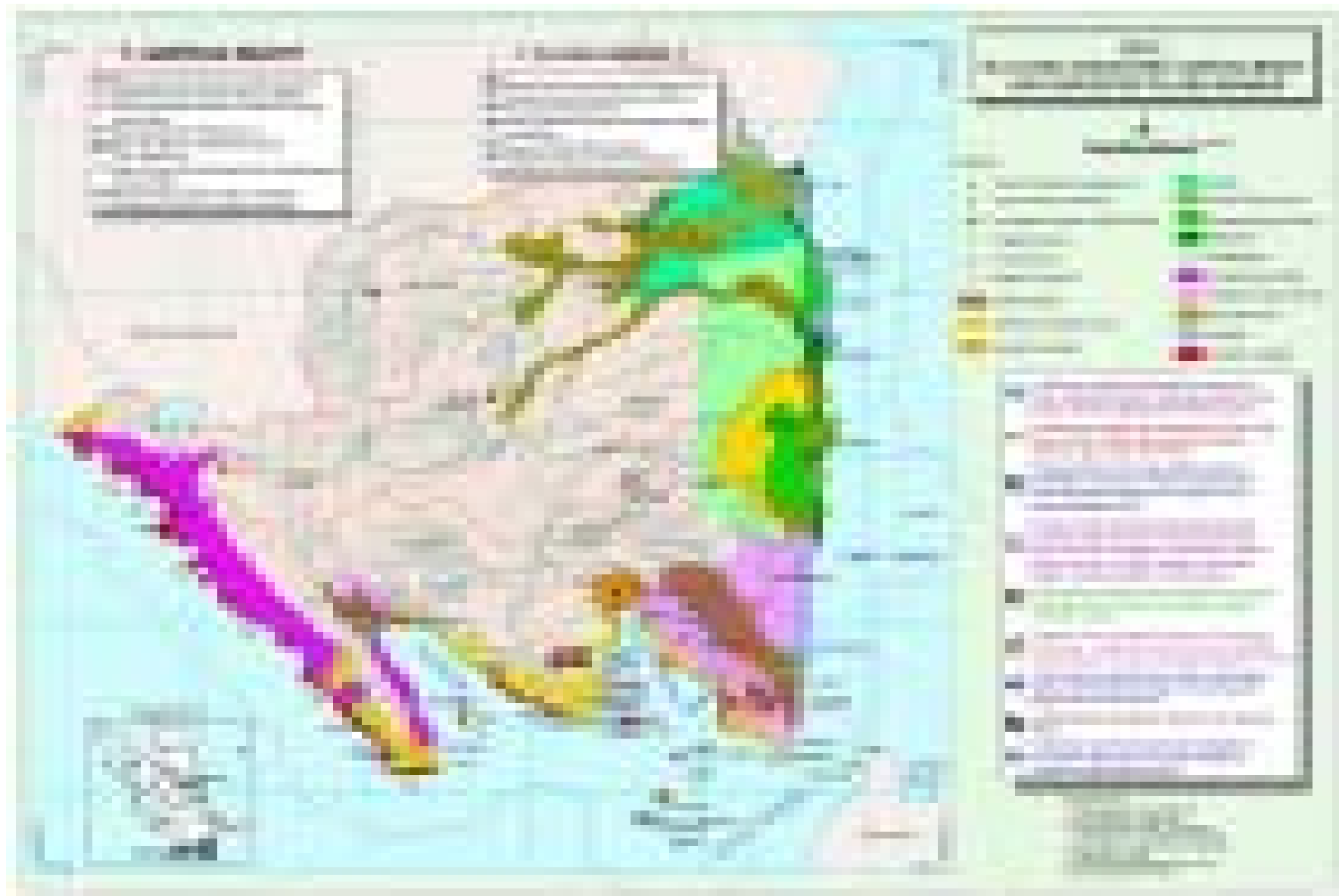
1. Minimnya sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan
2. Kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya
3. Belum adanya penataan ruang yang mencakup pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata rakyat di pulau kecil
5. Potensi pencemaran minyak di Teluk Semangka

Isu-isu prioritas dari setiap kabupaten/kota pesisir tersebut merupakan dasar dalam menentukan 10 (sepuluh) isu prioritas propinsi. Penentuan isu prioritas propinsi menggunakan metode ranking frekuensi (sering muncul):

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum
3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir
4. Degradasi habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang, rumput laut, padang lamun, dan pantai berpasir)
5. Pencemaran wilayah pesisir
6. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan cagar alam laut
7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal
8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya
9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)
10. Ancaman intrusi air laut



Kepulauan Krakatau dan cagar alam laut, salah satu obyek wisata bahari
(foto: CRMP Lampung)



Gambar 7. Peta isu utama Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang.



Gambar 8. Peta isu utama Bandar Lampung.



Gambar 9. Peta isu utama pulau dan perairan sekitarnya.

3.1 Visi Rencana Strategis Propinsi Lampung

Dengan mempertimbangkan kecenderungan global dan kebijakan pembangunan nasional sebagai unsur peluang atau ancaman serta kondisi sarana – prasarana, sumberdaya manusia, sumberdaya alam wilayah pesisir sebagai unsur kekuatan atau kelemahan, maka disusun visi pengelolaan wilayah pesisir Lampung serta visi pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya. Visi ini merupakan sari dari visi-visi kabupaten/kota pesisir dan isu pengelolaan pulau-pulau kecil yang diformulasikan berdasarkan konsultasi publik dengan berbagai *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah).

Visi Propinsi :

Untuk terwujudnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan dan penegakan hukum, serta penataan ruang untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Perairan sekitarnya :

Untuk terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan lingkungan perairan sekitarnya secara adil dan lestari yang berbasis masyarakat melalui penataan ruang, peningkatan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, serta penataan dan penegakan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan, dan Strategi

Isu-isu propinsi dan isu-isu pengelolaan pulau tersebut secara rinci dijelaskan berikut ini:

ISU A RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

Rendahnya kualitas SDM di wilayah pesisir tidak hanya terjadi pada masyarakat pesisir saja, tetapi juga terjadi pada SDM instansi terkait. Untuk masyarakat pesisir, rendahnya kualitas SDM tersebut erat hubungannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baik pendidikan formal maupun non-formal. Hal tersebut ternyata ditunjang pula oleh masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kualitas SDM masyarakat pesisir, yang selama ini sebagian besar merupakan daerah-daerah yang terisolir. Wilayah yang terisolir tersebut antara lain wilayah Pantai Barat, Teluk Semangka, dan Pantai Timur.

Rendahnya pendidikan masyarakat pesisir juga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat, dan ternyata permasalahannya sama dengan proses pendidikan. Secara keseluruhan pengembangan tingkat pendidikan dan kesehatan tersebut sangat tersendat-sendat karena sangat minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang tersedia di wilayah pesisir. Kondisi ini sangat mencolok terjadi di wilayah pulau-pulau kecil. Penyebab utama rendahnya kualitas SDM adalah :

- ♦ Rendahnya taraf pendidikan masyarakat
- ♦ Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya tenaga guru baik di SD maupun SLTP.
- ♦ Rendahnya tingkat kesehatan lingkungan permukiman
- ♦ Minimnya sarana dan prasarana kesehatan, serta kurangnya tenaga medis
- ♦ Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- ♦ Masih kurangnya prioritas pemerintah untuk memacu peningkatan kualitas SDM masyarakat pesisir.

Akibat yang ditimbulkannya :

- ♦ SDA wilayah pesisir belum dimanfaatkan secara optimal
- ♦ Pola pemanfaatan yang berkembang tidak memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan
- ♦ Kesempatan kerja di wilayah pesisir terbatas
- ♦ Sanitasi lingkungan permukiman masyarakat pesisir masih buruk, limbah rumah tangga justru mencemari pantai, dan rendahnya inisiatif masyarakat untuk memiliki MCK
- ♦ Penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir rendah
- ♦ Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih rendah
- ♦ Kapasitas instansi terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir masih rendah dan kurang efisien

SASARAN	A-1	:Peningkatan dan	taraf non-formal	pendidikan masyarakat	formal
----------------	------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------

Indikator A-1:

- Meningkatnya jumlah lulusan sampai tingkat SLTP
- Tercapainya rasio guru dan siswa
- Meningkatnya frekuensi pelatihan dan keterampilan masyarakat
- Diterimanya usul untuk memasukkan materi pengelolaan wilayah pesisir pada kurikulum tingkat SD
- Membaiknya pola hidup nelayan
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas staf di institusi yang membidangi wilayah pesisir

Strategi A-1:

- ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan SLTP
- ✓ Memenuhi kebutuhan tenaga guru (sesuai rasio guru – siswa) di Sekolah Dasar dan SLTP
- ✓ Mengembangkan program pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir
- ✓ Mengusulkan, menyiapkan, dan implementasi materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal SD
- ✓ Mengintensifkan dan meningkatkan bimbingan mental kemasyarakatan
- ✓ Meningkatkan pelatihan teknis pengelolaan pesisir
- ✓ Mengembangkan program studi tentang pengelolaan wilayah pesisir di Perguruan Tinggi/UNILA

SASARAN	A-2	: Peningkatan	taraf	kesehatan	masyarakat
----------------	------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------

Indikator A-2:

- Menurunnya jumlah wabah penyakit dan masyarakat yang sakit
- Tercapainya rasio tenaga medis dan jumlah penduduk
- Membaiknya kondisi sanitasi permukiman dan lingkungan

Strategi A-2:

- ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
- ✓ Memenuhi kebutuhan tenaga medis (sesuai rasio tenaga medis – penduduk)
- ✓ Mengembangkan rencana perbaikan sistem sanitasi permukiman, dan lingkungan dalam program penyuluhan kesehatan

SASARAN A-3 : Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu

Indikator A-3:

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai proses perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi
- Meningkatnya masyarakat yang peduli dan tanggungjawab terhadap sumberdaya wilayah pesisir
- Meningkatnya perhatian *stakeholders* dalam pengelolaan pesisir

Strategi A-3:

- ✓ Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
- ✓ Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat /Perguruan Tinggi/ Sekolah/Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
- ✓ Mengimplementasikan rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu



Reklamasi menggunakan terumbu karang untuk perumahan dan obyek wisata (foto: CRMP Lampung)

Beberapa masalah yang sering muncul antara lain banyaknya nelayan yang menangkap ikan dengan cara-cara merusak seperti pengeboman atau dengan potas (racun sianida), belum dipatuhinya batas/jalur penangkapan yang telah dibuat, dan banyaknya penebangan hutan mangrove di daerah sempadan pantai.

Dari sudut penegakan hukum masalah pengeboman merupakan masalah yang kompleks, baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada maupun sarana dan prasarana yang dimiliki penegak hukum yang sangat terbatas, sehingga pelaksanaan patroli pengawasan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Penyebab utama rendahnya penataan dan penegakan hukum adalah:

- ♦ Rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama yang berhubungan dengan pengetahuan nelayan tentang hukum.

ISU B RENDAHNYA PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Rendahnya penataan dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum yang berada di wilayah pesisir. Lemahnya penataan dan penegakan hukum ini antara lain tercermin dari sikap dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang masih rendah, khususnya yang berhubungan dengan UU No. 5/90 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta UU No.23/97 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

- ♦ Terlalu diutamakannya kepentingan sektoral
- ♦ Tidak transparannya proses pembuatan produk hukum
- ♦ Terbatasnya sarana dan prasarana petugas penegak hukum
- ♦ Masih lemahnya pelaksanaan sosialisasi produk hukum

Akibat yang ditimbulkan adalah:

- ♦ Menurunnya keamanan laut
- ♦ Meningkatnya pengeboman dan penggunaan trawl
- ♦ Terjadinya konflik kepentingan antar pengguna SDA wilayah pesisir,
- ♦ Terjadinya konflik kewenangan antar instansi
- ♦ Berkurangnya hutan mangrove karena ulah manusia
- ♦ Reklamasi pantai yang tidak berwawasan lingkungan, dan tidak dilengkapi studi AMDAL yang baik
- ♦ Pelanggaran proses perizinan oleh petambak besar (perusahaan)
- ♦ Pencemaran air laut

SASARAN B-1: Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum

Indikator B-1:

- Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum lingkungan untuk aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan
- Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum
- Meningkatnya jumlah personil, sarana, dan prasarana penegak hukum
- Terciptanya kesamaan persepsi dalam penegakan hukum pada tingkat aparat
- Berkurangnya pengrusakan sumberdaya alam wilayah pesisir

Strategi B-1:

- ✓ Mengadakan pelatihan-pelatihan hukum lingkungan untuk aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah (pejabat)

- ✓ Penambahan jumlah personil, sarana, dan prasarana penegak hukum
- ✓ Mengadakan pelatihan dan simulasi proses peradilan yang sederhana

SASARAN B-2: Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum, penataan, dan penegakan hukum

Indikator B-2 :

- Menurunnya jumlah kasus perusakan lingkungan dan pelanggaran hukum
- Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum
- Terangkatnya kasus pelanggaran hukum sampai ke pengadilan
- Meningkatnya keamanan di laut
- Meningkatnya hasil tangkapan nelayan dan hasil pertanian/perikanan di wilayah pesisir
- Berkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir antar *stakeholders*
- Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum

Strategi B-2 :

- ✓ Mengintensifkan sosialisasi *draft* dan produk hukum
- ✓ Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan
- ✓ Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan di laut
- ✓ Menentukan jalur-jalur penangkapan ikan dan penggunaan lainnya dengan rambu dan pemetaan yang disepakati bersama
- ✓ Mengatur kembali konsesi pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat mengakomodasi kepentingan semua pengguna
- ✓ Membentuk balai penyuluhan pesisir dan kelautan
- ✓ Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum

SASARAN B-3: Peningkatan keterpaduan dan koordinasi wewenang antar instansi terkait

Indikator B-3 :

- Semakin jelasnya peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi terkait
- Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait
- Semakin sederhananya prosedur penindakan terhadap pelanggaran hukum
- Berkurangnya konflik kewenangan di antara instansi terkait
- Semakin terbukanya akses masyarakat ke pantai
- Semakin membaiknya kondisi lingkungan wilayah pesisir

Strategi B-3 :

- ✓ Mengadakan pengkajian kelembagaan
- ✓ Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir
- ✓ Mengembangkan operasi pengamanan laut secara terpadu

ISU C BELUM ADANYA PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR

Penyusunan rencana tata ruang yang telah dilakukan selama ini belum mengintegrasikan wilayah pesisir, baik dalam RTRW Propinsi maupun RTRW Kabupaten. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir telah banyak terjadi pelanggaran, misalnya pendirian bangunan dan atau perusahaan tambak di sempadan pantai yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove di jalur hijau (*green belt*).

Belum adanya penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir berkaitan erat dengan belum adanya peraturan yang mendukung secara tegas upaya penataan ruang wilayah pesisir tersebut. Hal ini ternyata



Kota Bandar Lampung tampak dari atas (foto: Anshori J.)

merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik kepentingan yang berkepanjangan. Konflik kepentingan terjadi antara sektor kehutanan dengan perikanan yang berhubungan dengan pemanfaatan jalur hijau untuk tambak, perikanan dengan pertanian yang berhubungan dengan alih fungsi lahan sawah menjadi tambak, keduanya banyak terjadi di Pantai Timur. Sebagai contoh, konflik kepentingan antara nelayan dengan nelayan, nelayan dengan sektor perhubungan, nelayan dengan pengusaha kerang mutiara seperti yang terjadi di Teluk Lampung.

Penataan ruang merupakan salah satu usaha untuk menekan terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan ruang, termasuk pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada saat ini aktivitas dan jumlah orang yang ingin memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir semakin hari semakin meningkat, sedangkan sumberdaya wilayah pesisir tetap atau cenderung berkurang. Di sisi lain pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang ada saat ini kurang ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini akhirnya akan menurunkan daya dukung sumberdaya wilayah pesisir.

Penyebab utama belum adanya penataan ruang wilayah pesisir adalah :

- ♦ Belum adanya peraturan yang tegas tentang penataan ruang wilayah pesisir, baik pedoman pelaksanaannya maupun peraturan penunjang lainnya

Akibat yang ditimbulkan adalah :

- ♦ Konflik kewenangan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir semakin tajam, kegiatan yang tumpang tindih
- ♦ Pelanggaran hukum oleh pengguna sumberdaya semakin luas, misalnya dalam perusakan hutan mangrove di jalur hijau (*green belt*), rusaknya terumbu karang (*coral reef*) karena penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan atau menggunakan bahan kimia beracun (*potasium sianida*)
- ♦ Pemanfaatan wilayah pesisir tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, seperti hilangnya estetika pantai, pola pembangunan yang membelakangi pantai, adanya pembangunan di sempadan pantai, hilangnya akses masyarakat ke pantai, sehingga kawasan pantai menjadi eksklusif

SASARAN C-1: Penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir

Indikator C-1:

- Tersusunnya rencana tata ruang kawasan pesisir berbasis masyarakat dan ramah lingkungan

Strategi C-1:

- ✓ Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir
- ✓ Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir

SASARAN C-2: Mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah pesisir dalam RTRWK dan RTRWP

Indikator C-2:

- Tersusunnya rencana tata ruang wilayah kabupaten dan propinsi yang mencakup wilayah pesisir

Strategi C-2:

- ✓ Revisi RTRWK dan RTRWP dengan mensyaratkan RTRW pesisir menjadi bagiannya
- ✓ Memberdayakan tim penataan ruang secara optimal dengan mengikutsertakan institusi non-pemerintah

ISU D DEGRADASI HABITAT WILAYAH PESISIR

(Mangrove, Terumbu karang, Padang Lamun, Rumput Laut, dan Pantai Berpasir)

Habitat penting di sepanjang pesisir Lampung meliputi mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir dan hutan pantai. Pantai Barat hampir seluruhnya didominasi oleh pantai berpasir, hutan pantai tipe *Barringtonia*, dengan sisipan tanaman perkebunan rakyat, dan dataran rendah berhutan Meranti (*Dipterocarpaceae*) sebagai kelanjutan dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

D.1 Mangrove

Saat ini, vegetasi mangrove di Pantai Timur Lampung telah mengalami penurunan luasan. Lebar luasan mangrove yang tersisa bervariasi dari 0 hingga 100. Hamparan vegetasi mangrove di kawasan ini membujur dari daerah Way Sekampung bagian Selatan hingga ke Utara sampai ke perbatasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Konversi

lahan untuk budidaya dan permukiman secara besar-besaran telah menyebabkan luas vegetasi mangrove di Pantai Timur tersisa hanya 1.700 ha (CRMP, 1999a, b).

Penyebab utama hilangnya mangrove adalah :

- ♦ Pembabatan dan pengulitan pohon mangrove untuk kayu/pengawet.
- ♦ Konversi lahan mangrove untuk tambak udang.
- ♦ Pengelolaan pertambakan tidak berwawasan lingkungan
- ♦ Penggunaan tanah timbul menjadi tambak
- ♦ Pencemaran pantai (limbah industri dan minyak)
- ♦ Urbanisasi di Teluk Lampung

Akibat yang ditimbulkan adalah:

- ♦ Penurunan luasan vegetasi mangrove
- ♦ Penurunan kualitas air
- ♦ Penurunan hasil tangkapan, terutama kepiting, kerang, dan udang
- ♦ Penurunan pendapatan pengguna mangrove
- ♦ Erosi pantai meluas karena penurunan fungsi alami perlindungan pantai

SASARAN D.1-1: Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove

Indikator D.1-1:

- Meningkatnya pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola mangrove
- Meningkatnya budidaya tambak berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- Meningkatnya nilai tambah ekosistem mangrove

Strategi D.1-1:

- ✓ Mengembangkan program pelestarian mangrove berbasis masyarakat
- ✓ Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan erosi pantai

- ✓ Mengembangkan program pengelolaan tambak rakyat berwawasan lingkungan
- ✓ Membentuk kelompok masyarakat dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan mangrove

SASARAN D.1-2: Rehabilitasi mangrove

Indikator D.1-2:

- Menurunnya areal mangrove yang rusak
- Meningkatnya luas tanaman mangrove yang ditanam dan dijaga masyarakat
- Meningkatnya hasil tangkapan nelayan baik jenis maupun jumlahnya

Strategi D.1-2:

- ✓ Mengembangkan program dan melaksanakan rehabilitasi mangrove bersama masyarakat
- ✓ Membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove
- ✓ Mengembangkan program penelitian untuk mendukung inisiatif pengelolaan mangrove
- ✓ Membuat atau mengadopsi panduan praktis pengelolaan mangrove dan mengadakan bimbingan kepada masyarakat

SASARAN D.1-2: Pemanfaatan tanah timbul untuk jalur hijau

Indikator D.1-3:

- Tidak ada lagi penguasaan dan pengusahaan tanah timbul oleh masyarakat
- Meningkatnya luas tanaman mangrove di tanah timbul yang tumbuh secara alami dan dijaga masyarakat

Strategi D.1-3 :

- ✓ Penegasan terhadap status penggunaan dan penguasaan tanah timbul
- ✓ Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keberadaan tanah timbul

D.2 Terumbu Karang

Terumbu karang jenis karang tepi (*fringing reefs*) terdapat di Teluk Lampung, Teluk Semangka dan Pantai Barat. Terumbu karang tersebar (*patch reefs*) tumbuh dengan baik pada kedalaman 10-17 meter dan dapat dijumpai di sisi barat Teluk Lampung. Ada sekitar 213 jenis karang keras di perairan sekitar Selat Sunda (termasuk kepulauan Krakatau, Teluk Lampung, pulau-pulau di pesisir barat Pulau Jawa). Hasil survei menunjukkan bahwa hampir di semua lokasi, kecuali Teluk Lampung, terumbu karang memiliki penutupan karang keras/batu yang rendah (10 %), sedang di kawasan Teluk Lampung, penutupan karang mencapai 75 % (CRMP(c), 1998).

Kegiatan seperti penebangan mangrove di P.Rimau Balak, P.Mundu, P.Seram Besar/kecil, P.Kuali dan P.Panjurit akan mengakibatkan kerusakan terumbu karang karena sedimentasi, yang pada saat ini penutupannya sangat rendah (0-10%).

Terumbu karang di Teluk Lampung sangat mendukung usaha-usaha perikanan yang produktif, sehingga sekitar 1.600 bagan menggantungkan penghasilannya dari keberadaan terumbu karang. Namun sangat disayangkan, ada indikasi nelayan bagan juga menggunakan bom ikan jenis kecil (bom dodol) untuk membantu aktivitas penangkapan ikan.

Penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah :

- ♦ Penggunaan bom dan potas (di Teluk Lampung, pesisir Lampung Barat dan Teluk Semangka)
- ♦ Penggunaan *mini trawl* dan sejenisnya
- ♦ Belum adanya pelampung tambat (*mooring buoy*) dan dermaga di pulau-pulau kecil
- ♦ Perusakan oleh wisatawan berupa penginjakan (*trampling*)

- ♦ Pengambilan rumput laut alami (*gleaning*) yang merusak di pesisir Lampung Barat
- ♦ Sedimentasi akibat reklamasi pantai di sepanjang 18 km garis pantai Bandar Lampung dan siltasi degradasi DAS, terutama di Teluk Semangka
- ♦ Pencemaran oleh limbah industri, rumah tangga, dan minyak
- ♦ Gempa bumi dan penyebab alami lain seperti pemanasan global
- ♦ Pengambilan karang untuk bahan bangunan dan hiasan

Akibat yang ditimbulkan adalah:

- ♦ Kerusakan habitat dan berkurangnya keanekaragaman hayati
- ♦ Penurunan kunjungan wisata bahari dan penurunan pendapatan sektor pariwisata
- ♦ Penurunan hasil tangkapan ikan
- ♦ Kestabilan pantai berkurang dan bertambahnya erosi/abrasi pantai di Pantai Timur dan Pantai Barat
- ♦ Populasi penyu berkurang, yang diperparah dengan eksploitasi telur penyu di Tampang Belimbing, Tanjung Cina, P. Sertung, dan P. Segamat, serta beberapa lokasi lainnya di Pantai Barat
- ♦ Populasi lobster dan ikan karang berkurang, seperti di pesisir Barat yang saat sekarang “miskin ikan karang akibat rusaknya terumbu karang” (Expedisi Zooxanthellae V, 1999)

SASARAN D.2-1: Melindungi terumbu karang

Indikator D.2-1:

- Meningkatnya hasil tangkapan dalam jumlah dan ukuran ikan
- Meningkatnya luasan dan keanekaragaman terumbu karang
- Berkurangnya frekuensi penggunaan bom dan potas oleh nelayan

Strategi D.2-1:

- ✓ Sosialisasi keberadaan dan fungsi cagar alam laut Krakatau dan Bukit Barisan Selatan
- ✓ Membuat rencana pengelolaan dan rencana zonasi cagar alam laut dan pemetaan kondisi terumbu karang
- ✓ Mengembangkan daerah perlindungan laut (*marine sanctuary*) berbasis masyarakat
- ✓ Menetapkan pembatasan penangkapan ikan karang
- ✓ Mengembangkan pengelolaan rumpon oleh masyarakat (nelayan)

SASARAN D.2-2: Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang

Indikator D.2-2:

- Adanya kelompok masyarakat peduli dan pelindung terumbu karang
- Makin luasnya daerah yang dilindungi oleh masyarakat
- Meningkatnya penyuluhan tentang fungsi dan manfaat terumbu karang

Strategi D.2-2:

- ✓ Mengembangkan program terpadu dalam rangka penguatan kelembagaan lokal
- ✓ Mengadakan sosialisasi pelestarian terumbu karang
- ✓ Mengadakan pelatihan pembuatan terumbu buatan

SASARAN D.2-3: Pengelolaan terumbu karang sesuai dengan manfaat ekologi dan ekonomi

Indikator D.2-3 :

- Meningkatnya kunjungan wisatawan yang menikmati estetika terumbu karang
- Tersedianya tambatan perahu nelayan dan transportasi antar pulau kecil

Strategi D.2-3:

- ✓ Mengembangkan program pendidikan dan pengalihan alternatif mata pencaharian bagi nelayan pengebom ikan (misalnya: budidaya rumput laut, keramba apung)
- ✓ Mengadakan tambatan apung di lokasi terumbu karang yang potensial untuk dilindungi

SASARAN D.2-4: Peaduserasian antara program pengelolaan terumbu karang daerah dengan program nasional

Indikator D.2-4 :

- Adanya program pengelolaan terumbu karang terpadu di Lampung
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara institusi terkait dalam menangani permasalahan degradasi terumbu karang

Strategi D.2-4:

- ✓ Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan terumbu karang
- ✓ Pembentukan kelompok kerja antar lembaga dan antar kabupaten dalam pengelolaan terumbu karang

D.3 Padang Lamun, Rumput Laut dan Pantai Berpasir

Padang lamun dan rumput laut alami biasanya tumbuh berasosiasi dengan terumbu karang, sehingga habitat padang lamun dapat ditemui di kawasan Teluk, sedang habitat rumput laut alami tumbuh di kawasan Teluk Lampung (Kalianda) dan di sepanjang Pantai Barat. Pantai berpasir dan berbatu-batu bulat terdapat di Kalianda, Lampung Selatan dan Tebaka, Pantai Barat, merupakan daya tarik luar biasa bagi pengembangan pariwisata di masa datang.

Kecuali tipe vegetasi tersebut di atas, pesisir Lampung memiliki berbagai komunitas tumbuhan yang terdapat di pantai berpasir. Umumnya komunitas tumbuhan di pantai berpasir berupa tanaman budidaya.

Sampai saat ini belum ada kajian secara komprehensif tentang fenomena erosi pantai dan belum ada penanganan secara terpadu tentang isu ini.

Beberapa penyebab erosi pantai adalah:

- ♦ Penurunan kualitas perairan seperti kekeruhan dan pencemaran
- ♦ Pengambilan rumput laut alami secara berlebihan
- ♦ Reklamasi pantai
- ♦ Konstruksi bangunan pantai yang kurang tepat
- ♦ Degradasi DAS dan meluasnya DAS kritis
- ♦ Penambangan batu hitam (Lampung Barat) dan batu gunung
- ♦ Penggalian pasir pantai untuk bangunan

Sebagai konsekuensinya maka,

- ♦ Fungsi perlindungan alami terhadap erosi pantai menurun
- ♦ Habitat sebagai daerah pemijahan penyu dan biota lainnya hilang
- ♦ Penghasilan nelayan tidak berkelanjutan
- ♦ Hilangnya estetika pantai pasir

A. Padang Lamun dan Rumput Laut

SASARAN D.3.A-1: Perlindungan padang lamun sebagai ekosistem pendukung sumberdaya kelautan

Indikator D.3.A-1:

- Meningkatnya populasi ikan dan biota lainnya di daerah padang lamun
- Meningkatnya kualitas air di perairan pantai
- Terlindunginya padang lamun dan rumput laut

Strategi D.3.A-1:

- ✓ Mengadakan penyuluhan fungsi dan manfaat padang lamun
- ✓ Mengendalikan penangkapan ikan di areal padang lamun

SASARAN D.3.A-2: Pengelolaan padang lamun dan rumput laut sesuai manfaat ekologi dan ekonomi

Indikator D.3.A-2:

- Menurunnya kegiatan eksploitasi rumput laut/padang lamun yang tidak berwawasan lingkungan
- Bertambah luasnya kawasan padang lamun dan rumput laut
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan padang lamun dan rumput laut
- Meningkatnya pemanfaatan estetika padang lamun dan rumput laut untuk kegiatan pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya

Strategi D.3.A-2:

- ✓ Mengadakan inventarisasi jenis dan potensi padang lamun/rumput laut untuk tujuan konservasi
- ✓ Mengembangkan program kerjasama antar lembaga terkait untuk mengimplementasikan pengelolaan padang lamun dan rumput laut
- ✓ Mengadakan bimbingan pengelolaan padang lamun dan rumput laut yang berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat

B. Pantai Berpasir

SASARAN D.3.B-1: Pengelolaan pantai berpasir sesuai manfaat ekologi dan ekonomi

Indikator D.3.B-1:

- Adanya upaya perlindungan pantai terhadap erosi secara terpadu
- Adanya lokasi-lokasi perlindungan untuk peneluran penyu yang disepakati bersama

Strategi D.3.B-1:

- ✓ Mengembangkan program penanggulangan erosi pantai secara terpadu
- ✓ Sosialisasi dan standarisasi konstruksi bangunan pengaman pantai
- ✓ Mengendalikan dan mengatur penambangan batu hitam dan pasir besi
- ✓ Mengadakan inventarisasi dan pemetaan lokasi-lokasi peneluran penyu

ISU **E** PENCEMARAN WILAYAH PESISIR

Wilayah pesisir merupakan tempat terakumulasinya segala macam limbah yang dibawa melalui aliran air, baik limbah cair maupun padat. Sampah sering ditemukan berserakan di sepanjang pantai dan semakin banyak di dekat permukiman, khususnya permukiman yang membelakangi pantai. Permukiman seperti itu dikategorikan sebagai permukiman kumuh yang fasilitas sanitasi dan kebersihan lingkungannya sangat buruk.

Dengan berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan sepanjang DAS di Pesisir Timur Lampung, kasus pencemaran aliran sungai (Tulang Bawang dan Seputih) semakin meningkat dan mempengaruhi sumberdaya perairan laut sekitarnya. Sebagian besar masyarakat petani tambak udang menduga bahwa kegagalan usaha mereka tidak terlepas dari dampak limbah industri di sepanjang daerah aliran sungai.

Penyebab utama pencemaran wilayah pesisir adalah:

- ♦ Masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir terhadap sistem pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan umum.
- ♦ Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait
- ♦ Belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar isi dokumen Amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP 27/99 tentang Amdal dan UU 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- ♦ Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan yang

membelakangi pantai.

- ♦ Sampah dari kegiatan pariwisata massal
- ♦ Penangkapan ikan dengan potas (racun sianida)
- ♦ Buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan, dsb

Akibat yang ditimbulkan adalah :

- ♦ Menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir
- ♦ Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata.
- ♦ Menurunnya kualitas sumber air tanah dan meningkatnya wabah penyakit menular terhadap kehidupan masyarakat di pesisir.
- ♦ Semakin menurunnya tingkat keberhasilan budidaya perikanan (tambak dan *mariculture*) dan kegiatan ekonomi lainnya (pariwisata).



Limbah padat (sampah), merupakan salah satu masalah utama Kota Bandar Lampung (foto: CRMP Lampung)

SASARAN E-1: Melindungi penduduk di desa-desa pesisir terhadap gangguan kesehatan sebagai akibat kontaminasi sumber air tanah

Indikator E-1:

- Terbebasnya sumber air tanah yang digunakan penduduk dari asam sulfida, amonia, dan bakteri *coliform* sesuai baku mutu nasional untuk air minum

Strategi E-1:

- ✓ Mengembangkan bimbingan masyarakat atau kampanye tentang resiko kesehatan karena pencemaran air tanah
- ✓ Perbaiki sistem drainase dan sanitasi lingkungan di areal pemukiman

SASARAN E-2: Terciptanya kawasan pantai yang bebas dari limbah padat (sampah) baik organik maupun non-organik

Indikator E-2:

- Semakin bersihnya kawasan pantai dari limbah padat
- Terbebasnya kawasan pemukiman pantai dari genangan banjir
- Semakin baiknya mekanisme penanganan sampah di kawasan pantai

Strategi E-2:

- ✓ Mengadakan program kampanye-kampanye penanganan sampah
- ✓ Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa-desa pantai
- ✓ Meningkatkan pengelolaan sampah di areal permukiman pesisir

SASARAN E-3: Peningkatan kualitas perairan pesisir sesuai dengan baku mutu nasional

Indikator E-3:

- Terpenuhinya standar baku mutu air laut sesuai peruntukannya

Strategi E-3:

- ✓ Penguatan kelembagaan
- ✓ Mengefektifkan operasionalisasi pemantauan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran di daerah hulu ke hilir (*early warning system*)
- ✓ Mengembangkan penelitian pencemaran air laut
- ✓ Menyusun standar emisi buangan ke laut

SASARAN E-4: Peningkatan kepedulian *stakeholders* terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir yang sehat

Indikator E-4:

- Meningkatnya tuntutan dan kepedulian masyarakat akan kualitas lingkungan sekitar yang baik
- Menurunnya wabah penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat

Strategi E-4:

- ✓ Mengembangkan program penyuluhan sanitasi lingkungan kepada masyarakat di desa pantai

Sebagian besar kawasan ekosistem alami yang terdapat di sepanjang pesisir Lampung telah berubah menjadi kawasan hunian dan budidaya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin luasnya areal budidaya tambak di Pesisir Timur, permukiman dan perkebunan di Pesisir Barat, permukiman dan industri di Teluk Lampung. Kawasan pesisir yang masih alami hanya terdapat di sepanjang Taman Nasional Way Kambas dan sebagian dari wilayah Pantai Barat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

TN Way Kambas

Kawasan ini terletak di Pesisir Timur Lampung dengan luas 130.000 ha dan berbatasan langsung ke laut memanjang garis pantai sepanjang 68 km antara Way Penet di Selatan dengan Way Seputih di Utara. Keadaan fisik kawasan berupa hutan rawa dan dilalui oleh dua sungai. Sebagian besar kawasan ini akan tergenang air pada waktu musim hujan.

TN Way Kambas pada saat ini adalah satu-satunya perwakilan dari ekosistem rawa di Pantai Timur yang masih alami dan dihuni oleh banyak jenis tumbuhan dan hewan langka, dilindungi ataupun terancam punah. Upaya konservasi kawasan ini sudah seharusnya menjadi pemikiran bersama dan bersifat lintas sektoral, serta melibatkan masyarakat

TN Bukit Barisan Selatan (TNBBS)

Kawasan ini berbatasan langsung dengan laut di Way Menula/ Tanjung Keramat dan wilayah pesisir antara Bengkuntan sampai Tanjung Cina di Teluk Semangka. Kondisi fisik pesisir TNBBS bervariasi dari pantai berpasir, berbatu, berkarang dan bersambung dengan daratan yang berbukit.

Kondisi hutan yang berbatasan dengan pemukiman sebelah barat relatif baik karena terdapat zona penyangga berupa repong damar yang

telah dikembangkan masyarakat pesisir Lampung Barat. Sisi bagian Barat TN.BBS sebagian besar terancam oleh pembuka hutan untuk kebun kopi dan wilayah ini merupakan hulu DAS yang akan mengalir ke Pantai Timur Lampung.

Wilayah pesisir TNBBS juga telah ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut yang luasnya 21.600 ha dengan potensi berbagai jenis ikan hias, lobster, rumput laut, dan penyu laut.

Cagar Alam Laut Gugus Kepulauan Krakatau

Luas perairan Cagar Alam ini sekitar 12.000 ha dan terdiri dari empat buah pulau dan telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan sejak tahun 1919. Masalah-masalah yang terjadi di wilayah ini berupa pengambilan batu apung, pembiusan & pengeboman ikan, pengambilan telur penyu, dan gangguan lainnya oleh nelayan pendatang.

Hutan Lindung dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Terdapat 4 DAS besar di Lampung yang mengalir ke Pantai Timur yaitu DAS Way Tulang Bawang, DAS Way Seputih, DAS Mesuji, dan DAS Way Sekampung. Satu DAS yang cukup penting lainnya adalah DAS Way Semangka yang mengalir ke Teluk Semangka. Kerusakan hutan bagian hulu DAS telah menimbulkan kekeruhan air laut pada wilayah DAS tersebut dan tingginya variasi debit air musiman.

Penyebab utama kerusakan kawasan konservasi :

- ♦ Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya konservasi
- ♦ Pengawasan terhadap kawasan konservasi masih terbatas, karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- ♦ Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi
- ♦ Belum tertatanya batas kawasan konservasi berupa patok/tanda permanen yang diakui oleh semua pihak

- ♦ Adanya oknum aparat yang tidak disiplin dan menyalahgunakan wewenang

Akibat yang ditimbulkan adalah:

- ♦ Adanya tekanan terhadap populasi dan habitat satwa liar yang dilindungi
- ♦ Menurunnya fungsi ekologis kawasan lindung dan cagar alam laut
- ♦ Konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat
- ♦ Masih berlangsungnya eksploitasi sumberdaya alam di dalam kawasan yang dilindungi

SASARAN F-1: Terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

Indikator F-1:

- Penurunan kegiatan perburuan liar di dalam kawasan lindung dan kawasan konservasi
- Keanekaragaman sumberdaya hayati semakin terpelihara
- Adanya patok batas kawasan di lapangan dan peta kawasan yang jelas
- Penurunan jumlah kegiatan pengrusakan/penjarahan di kawasan konservasi

Strategi F-1 :

- ✓ Rehabilitasi kawasan-kawasan hutan yang vegetasinya mengalami kerusakan
- ✓ Pemantapan zonasi dalam kawasan konservasi
- ✓ Memperketat pengawasan dan perizinan untuk semua aktivitas di dalam kawasan konservasi
- ✓ Resolusi konflik bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi
- ✓ Membuat dan sosialisasi rencana pengelolaan kawasan konservasi

SASARAN F-2: Peningkatan dukungan *stakeholders* terhadap program konservasi

Indikator F-2:

- Berkembangnya program pengelolaan kawasan konservasi
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat kawasan konservasi
- Berkurangnya konflik antar *stakeholders*

Strategi F-2:

- ✓ Sosialisasi fungsi dan pentingnya peran kawasan konservasi terhadap masyarakat
- ✓ Pendampingan usaha masyarakat di zona penyangga kawasan taman nasional dan cagar alam laut
- ✓ Mengembangkan forum komunikasi antar *stakeholders*

ISU G POTENSI DAN OBYEK WISATA BAHARI BELUM DIKEMBANGKAN SECARA OPTIMAL

Wilayah pesisir Lampung memiliki banyak obyek wisata yang menarik karena memiliki ciri khas tersendiri, seperti yang terdapat di Pesisir Barat, Teluk Semangka, Teluk Lampung dan sebagian kecil wilayah Pesisir Timur. Pengembangan wisata bahari tidak hanya tergantung dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan dan sikap masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjung.

Teluk Lampung memiliki 18 lokasi wisata bahari, baik yang memiliki fasilitas maupun yang tidak. Waktu kunjungan yang cukup banyak adalah pada Hari Minggu dan umumnya pengunjung datang dari Bandar Lampung,

sedangkan puncak keramaian akan terlihat pada tahun baru.

Penyebab utamanya adalah:

- ♦ Usaha pariwisata bahari masih belum memberikan nilai ekonomi yang cukup memadai
- ♦ Atraksi yang ditampilkan masih kurang menarik
- ♦ Belum terpadunya pengembangan paket wisata bahari
- ♦ Kurang tersedianya fasilitas wisata bahari yang terjangkau oleh masyarakat dan penyebaran panduan potensi wisata bahari sangat terbatas
- ♦ Menurunnya kualitas pantai, perairan dan terumbu karang yang menjadi andalan utama untuk pengembangan wisata bahari
- ♦ Adanya dampak krisis ekonomi dan keamanan
- ♦ Belum disepakatinya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
- ♦ Masih adanya sikap dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung dalam menerima kunjungan wisata



Salah satu obyek wisata bahari di Lampung Selatan
(foto: CRMP Lampung)

Akibat yang ditimbulkan adalah:

- ♦ Industri rumah tangga/kerajinan tangan tidak berkembang
- ♦ Potensi dan obyek wisata kurang berkembang
- ♦ Adanya kegiatan pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan
- ♦ Salah arah investasi dan kerugian bagi pengembang pariwisata
- ♦ Pendapatan daerah dan masyarakat dari bidang pariwisata rendah
- ♦ Akses masyarakat ke daerah pantai tertentu terbatas/tidak ada

SASARAN G-1: Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan

Indikator G-1:

- Tersedianya pusat-pusat informasi pariwisata
- Tersusunnya basis data potensi dan informasi kepariwisataan yang dapat digunakan untuk perencanaan
- Tersusunnya RIPPDA Lampung yang disepakati bersama

Strategi G-1:

- ✓ Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasi kepariwisataan
- ✓ Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, dan pemasaran pariwisata
- ✓ Mengkaji ulang RIPPDA Lampung untuk disepakati bersama

SASARAN G-2: Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal

Indikator G-2:

- Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar pariwisata bahari
- Berkembangnya ciri lokal sebagai daya tarik lokasi kunjungan wisata bahari

- Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat lokal dari pengembangan pariwisata bahari
- Meningkatnya jumlah usaha-usaha ekonomi (kecil dan menengah) dalam bidang ekowisata bahari

Strategi G-2:

- ✓ Memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pariwisata bahari
- ✓ Mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari
- ✓ Menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan
- ✓ Mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat
- ✓ Mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan

SASARAN G-3: Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata bahari

Indikator G-3:

- Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam usaha wisata bahari
- Meningkatnya jumlah usaha kecil masyarakat yang mendukung kegiatan usaha wisata bahari
- Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengembangan wisata bahari

Strategi G-3:

- ✓ Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari terpadu

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata bahari :

- ❑ **Diarahkan** untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penduduk setempat dengan mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan
- ❑ **Didasarkan** atas penelitian dan perencanaan terpadu, mengikuti kaidah-kaidah ekologis, sistem zonasi, dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan yang dianut penduduk setempat
- ❑ **Dikendalikan** sedemikian rupa sehingga tidak melampaui daya dukung lingkungan dan tidak merusak persahabatan dan persaudaraan

(Kelompok Insan Pariwisata Berkelanjutan)



Kegiatan pasar ikan di PPI Lempasang, Kota Bandar Lampung
(foto: CRMP Lampung)

- ✓ Mengembangkan program untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari

ISU **H** BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA

Di Propinsi Lampung terdapat paling sedikit 55.000 rumah tangga nelayan. Alat tangkap yang digunakan mulai dari pancing dan seser sampai dengan berbagai jenis jaring, baik legal maupun yang ilegal, dengan kapal motor hingga berukuran 5 GT.

Analisis sumberdaya ikan yang dilakukan oleh Proyek Pesisir (1999), menyimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Perairan

Barat Lampung telah mencapai 62% dan di Perairan Timur Lampung telah mencapai 88%. Produksi perikanan laut yang didaratkan di Teluk Lampung, Pantai Timur, dan Pantai Barat masing-masing 51.000 ton, 43.000 ton, 10.000 ton setiap tahunnya.

Salah satu permasalahan yang menonjol di perairan Teluk Lampung dalam kegiatan perikanan tangkap adalah semakin berkurangnya areal penangkapan, antara lain karena adanya alokasi eksklusif perairan untuk usaha budidaya kerang mutiara dan adanya kawasan TNI-AL. Namun demikian, pengamatan terhadap kondisi terumbu karang di perairan Teluk Lampung menunjukkan bukti bahwa pengawasan yang ketat akibat alokasi eksklusif untuk budidaya mutiara dan TNI-AL dapat menyelamatkan terumbu karang dari kehancuran akibat pemboman ikan dan penggunaan potas. Terumbu karang yang masih baik ini akan mendukung pertambahan populasi ikan di perairan tersebut.

Usaha perikanan budidaya di Propinsi Lampung telah berkembang dengan pesat sejak awal tahun 90-an. Selain tambak udang yang dimiliki oleh masyarakat, dua kawasan tambak intensif telah dikembangkan di Pesisir Timur dengan pola tambak inti rakyat oleh PT. DCD dan PT CPB. Luas keseluruhan lokasi tambak di Lampung telah mencapai 60.000 ha. Berkembangnya usaha tambak akhirnya juga telah menumbuhkan kegiatan usaha baru untuk mendukung pertambakan seperti usaha pembenihan udang di Kalianda, Lampung Selatan.

Selain usaha budidaya kerang mutiara yang dikelola oleh dua perusahaan PMA pada areal perairan seluas 5.000 ha, telah dikembangkan juga budidaya rumput laut oleh masyarakat nelayan dan usaha budidaya ikan kakap dan kerapu oleh beberapa pengusaha yang didukung keberadaan Balai Budidaya Laut di Hanura, Padang Cermin.

Penurunan kualitas perairan laut dan lingkungan budidaya perikanan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan produksi perikanan di Lampung. Peningkatan produktivitas lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungannya telah menurunkan produktifitas tambak udang di

Pantai Timur seperti yang terjadi di Pantura.

Penyebab isu perikanan tangkap adalah:

- ♦ Rendahnya kegiatan pembinaan dan sarana pengawasan
- ♦ Tidak terkontrolnya peningkatan jumlah dan jenis alat tangkap
- ♦ Belum tersedianya sarana penampungan dan pengolahan hasil tangkapan
- ♦ Rendahnya kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga nelayan
- ♦ Tidak dipatuhinya jalur-jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan
- ♦ Program pembangunan sarana/prasarana perikanan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan

Akibat yang ditimbulkan:

- ♦ Aktivitas penangkapan secara ilegal seperti penggunaan jaring trawl, bahan peledak, potas.
- ♦ Konflik antara nelayan dengan usaha budidaya mutiara, perhubungan dan nelayan lain yang menyalahi jalur penangkapan.
- ♦ Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap sehingga produktifitasnya rendah

Penyebab utama isu perikanan budidaya adalah:

- ♦ Kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap pengelolaan usaha budidaya perikanan.
- ♦ Kurangnya dukungan analisis data ilmiah yang berkaitan dengan fluktuasi pola arus air laut dan kecenderungan sumber-sumber penyakit dalam budidaya tambak

Akibat yang ditimbulkan:

- ♦ Produktivitas lahan untuk menghasilkan ikan cenderung menurun
- ♦ Adanya konflik sosial dalam pengelolaan Tambak Inti Rakyat (TIR)
- ♦ Menurunnya kualitas perairan untuk budidaya kerang mutiara

- ♦ Konflik pemanfaatan perairan laut antara nelayan dengan usaha budidaya mutiara

SASARAN H-1: Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya

Indikator H-1:

- Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan
- Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha perikanan
- Berkembangnya pemasaran usaha perikanan

Strategi H-1:

- ✓ Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan
- ✓ Mengembangkan skim-skim perkreditan usaha perikanan yang sederhana
- ✓ Mengembangkan pemasaran usaha perikanan

SASARAN H-2: Peningkatan pendapatan hasil usaha perikanan

Indikator H-2:

- Meningkatnya nilai tambah usaha perikanan
- Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha perikanan

Strategi H-2:

- ✓ Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang lebih higienis dan menghindari penggunaan bahan pengawet yang berlebihan.
- ✓ Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasar
- ✓ Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga
- ✓ Mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayan tradisional dengan pola kemitraan

SASARAN H-3: Peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan usaha perikanan

Indikator H- 3:

- Berkurangnya konflik kepentingan/kewenangan antar lembaga
- Tersedianya data dan informasi untuk pengelolaan usaha perikanan

Strategi H-3:

- ✓ Mengembangkan sistem informasi perikanan
- ✓ Mengembangkan forum komunikasi antar instansi terkait dalam pengelolaan usaha perikanan

ISU RAWAN BENCANA ALAM (GEMPA, TANAH LONGSOR, BANJIR)

Bencana alam gempa banyak terjadi di wilayah Bukit Barisan yang mencakup wilayah administrasi Lampung Barat, Tanggamus, dan Bandar Lampung, terutama di daerah patahan Semangka yang memanjang dari Teluk Semangka sampai ke utara Pulau Sumatera. Bencana alam tanah longsor banyak terjadi di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan yang lerengnya curam, seperti yang terdapat di wilayah Lampung Barat dan Tanggamus, sedangkan bencana alam banjir banyak terjadi di wilayah sebelah timur Lampung yaitu di wilayah Kabupaten Tulang Bawang (Way Tulang Bawang), Kabupaten Lampung Selatan (Way Sekampung).

Bencana alam banjir dan tanah longsor sangat erat kaitannya dengan kerusakan bagian hulu daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Lampung, seperti DAS Semangka, DAS Tulang Bawang, DAS Seputih, DAS Sekampung, dan DAS Mesuji, sehingga pada musim hujan secara insitu akan terjadi erosi dan aliran permukaan yang cukup tinggi, dan pada akhirnya secara eksitu akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor.

Penyebab bencana alam :

- ♦ Gempa tektonik di sepanjang patahan Semangka, dan patahan yang terdapat di wilayah Bandar Lampung.
- ♦ Terjadinya proses degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai)
- ♦ Adanya pembukaan lahan yang tidak terkendali di daerah hulu

Akibat yang ditimbulkan adalah:

- ♦ Terjadinya gempa, banjir, dan tanah longsor
- ♦ Kerugian material dan jiwa manusia
- ♦ Rasa tidak aman
- ♦ Berjangkitnya wabah penyakit.

SASARAN I-1: Meminimalkan kerugian jiwa dan material

Indikator I-1:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam
- Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat terhadap program mitigasi bencana alam
- Adanya program mitigasi bencana alam

Strategi I-1:

- ✓ Menyusun perencanaan mikro zonasi daerah rawan bencana alam
- ✓ Mengembangkan program peringatan dini bencana alam
- ✓ Menggali dan mengembangkan pengetahuan lokal dalam mitigasi bencana alam
- ✓ Menyusun *contingency plan* (rencana tanggap darurat) pasca bencana
- ✓ Standarisasi dan sosialisasi konstruksi bangunan tahan gempa

Intrusi air laut ke arah persawahan, khususnya di daerah Rawa Sragi, akibat konversi sawah ke tambak udang secara besar-besaran yang telah mencapai sekitar 4000 Ha. Perlu upaya penanganan yang serius tentang permasalahan alih fungsi lahan, karena keberlanjutan usaha tambak udang di daerah Rawa Sragi tidak dapat dijamin masa depannya apabila tidak ada upaya pengelolaan yang baik, sedang bekas tambak sangat sulit untuk dikembalikan lagi menjadi sawah.

Penyebab utama intrusi air laut adalah :

- ♦ Penebangan mangrove untuk permukiman dan pertambakan di Pantai Timur
- ♦ Masuknya air laut ke sawah
- ♦ Eksploitasi air tanah berlebihan

Sebagai konsekuensinya adalah :

- ♦ Degradasi kualitas air tanah
- ♦ Korosi konstruksi bangunan pipa logam di bawah tanah

SASARAN J-1: Pengendalian intrusi air laut

Indikator J-1:

- Tidak adanya kontaminasi air laut terhadap air tanah dan air permukaan

Strategi J-1:

- ✓ Pengawasan pengambilan air tanah
- ✓ Mengadakan pengkajian tentang alih fungsi lahan
- ✓ Merancang ulang sistem kanal untuk mengatur keperluan sawah dan tambak

3.3 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA

3.3.1 Perlunya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya

Propinsi Lampung memiliki 69 pulau-pulau kecil, dengan 2 pulau di Kabupaten Lampung Barat, 9 pulau di Kabupaten Tanggamus, 2 pulau di Kabupaten Lampung Timur serta sebagian besar berada di Kabupaten Lampung Selatan. Kisaran luas pulau-pulau kecil di propinsi ini antara kurang dari 1 ha dan 7.000 ha (Pulau Tabuan). Walaupun belum ada kesepakatan tentang definisi pulau kecil secara nasional, tetapi dapat dipakai definisi pulau kecil, yaitu pulau dengan luas 10.000 km² atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang (Bell *et al*, 1990 *dalam* Dahuri, 1999).

Pemerintah daerah mengupayakan untuk mengangkat masalah pengelolaan pulau-pulau kecil ke dalam Renstra Pesisir Lampung. Beberapa alasan untuk lebih memfokuskan pengelolaan dan pembangunan pulau-pulau kecil, adalah:

1. Pulau-pulau kecil merupakan aset yang penting
2. Ketersediaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (potensi ekowisata)
3. Perencanaan pembangunan belum mengakomodasi secara proporsional dalam mengelola sumberdaya pulau-pulau kecil

3.3.2 Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan, dan Strategi

Dalam mengelola pulau-pulau kecil diperlukan upaya khusus, karena pulau-pulau ini pada umumnya memiliki sumberdaya alam, aspek lingkungan dan budaya yang khas. Hasil kajian Tim Renstra, dengan mengambil isu hasil konsultasi dengan masyarakat di pulau-pulau (Pisang, Legundi, Puhawang, Tabuan, Sebesi dan Segamat), maka terdapat 5 (lima) isu utama yang muncul, yaitu:

ISU

K.1

MINIMNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN

Penyebab isu tersebut adalah :

- ♦ Rusaknya atau tidak adanya darmaga
- ♦ Kurangnya prioritas pemerintah terhadap pembangunan di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya
- ♦ Anggaran pembangunan untuk pulau-pulau kecil sangat minim
- ♦ Lokasi geografis pulau-pulau kecil relatif terpencil

Akibatnya :

- ♦ Sanitasi pemukiman pesisir buruk
- ♦ Masyarakat menggunakan pantai sebagai WC umum
- ♦ Tidak adanya wisatawan yang berkunjung/ potensi wisata tidak berkembang
- ♦ Rendahnya kualitas pendidikan SDM
- ♦ Rendahnya keterampilan petani/nelayan
- ♦ Komunikasi dengan masyarakat luar tidak lancar
- ♦ Produksi hasil pertanian dan perikanan sulit dipasarkan

SASARAN K.1-1: Peningkatan sarana-prasarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan

Indikator K.1-1:

- Tersedianya sarana dan prasarana transportasi (antar pulau dan di dalam pulau), pendidikan, dan kesehatan yang memadai

Strategi K.1-1:

- ✓ Pengadaan sarana/ prasarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan

- ✓ Penempatan tenaga guru dan tenaga medis sesuai rasio guru - siswa dan rasio tenaga medis - jumlah penduduk

ISU

K.2

KERUSAKAN LINGKUNGAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA

Penyebabnya adalah:

- ♦ Penegakan hukum dan perundang-undangan belum berjalan optimal
- ♦ Penangkapan ikan dengan mini trawl dan pengeboman ikan
- ♦ Keterbatasan sarana pengawasan dan aparat

Akibat yang ditimbulkan:

- ♦ Tangkapan ikan masyarakat pulau semakin sedikit
- ♦ Kerusakan habitat
- ♦ Konflik antara masyarakat pulau dan orang luar yang mengeksploitasi SDA

SASARAN K.2-1: Melindungi keberadaan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun

Indikator K.2-1:

- Berkurangnya frekuensi pengrusakan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun di lingkungan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya
- Peningkatan pendapatan masyarakat pulau-pulau kecil

Strategi K.2-1:

- ✓ Mengembangkan program perlindungan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun secara terpadu
- ✓ Rehabilitasi mangrove
- ✓ Inventarisasi status dan potensi sumberdaya alam pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya

SASARAN K.2-2: Peningkatan partisipasi *stakeholders* terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya

Indikator K.2-2:

- Makin luasnya daerah konservasi yang dikelola oleh masyarakat
- Semakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan
- Terciptanya sistem pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat pulau

Strategi K.2-2:

- ✓ Meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan penyuluhan lingkungan bagi masyarakat pulau
- ✓ Mengembangkan program pendidikan lingkungan bagi anak-anak usia sekolah
- ✓ Mengembangkan sistem pengamanan lingkungan oleh masyarakat pulau

SASARAN K.2-3: Penaatan dan penegakan hukum

Indikator K.2-3:

- Terhindarnya konflik pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat pulau dan orang luar
- Berkurangnya pelanggaran hukum oleh masyarakat
- Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum

Strategi K.2-3:

- ✓ Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang zona-zona pemanfaatan, alat, dan cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan

- ✓ Meningkatkan frekwensi penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terpadu oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah

ISU K.3 BELUM ADANYA PENATAAN RUANG YANG MENCAKUP PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA

Penyebab:

- ♦ Belum ada kebijakan penataan ruang yang mencakup pulau-pulau kecil

Akibat yang ditimbulkan:

- ♦ Tumpang tindih pemanfaatan
- ♦ Ketidakjelasan status lahan
- ♦ Kepemilikan tunggal terhadap pulau kecil
- ♦ Konflik sosial dengan masyarakat dalam maupun luar pulau

SASARAN K.3-1: Rencana tata ruang pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya menjadi bagian RTRWK dan RTRWP

Indikator K.3-1:

- Tersusunnya RTRWK dan RTRWP yang mencakup pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya

Strategi K.3-1:

- ✓ Revisi RTRWK dan RTRWP yang mencakup RTRW pesisir dan pulau-pulau kecil
- ✓ Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Penyebabnya adalah :

- ♦ Rendahnya frekuensi penyuluhan pengembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata di daerah pulau
- ♦ Sulitnya mendapatkan sarana produksi pertanian
- ♦ Keterampilan masyarakat rendah

Akibat yang timbul :

- ♦ Produktivitas lahan pertanian rendah
- ♦ Pendapatan petani pulau rendah

SASARAN K.4-1: Peningkatan pemanfaatan lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pertanian

Indikator K.4-1:

- Meningkatnya produktivitas lahan pertanian

Strategi K.4-1:

- ✓ Intesifikasi dan ekstensifikasi pengembangan lahan pertanian
- ✓ Mengintensifkan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan pariwisata

SASARAN K.4-2: Pengembangan teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan

Indikator K.4-2:

- Meningkatnya teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil pertanian

Strategi K.4-2:

- ✓ Mengembangkan program teknologi tepat guna untuk pengolahan produk pertanian dan perikanan

Penyebabnya adalah :

- ♦ Kebocoran dalam pemindahan minyak di Teluk Semangka (tangi apung)
- ♦ Kebocoran minyak mesin pada kapal nelayan/transpotasi

Akibat yang ditimbulkan adalah:

- ♦ Penurunan kualitas perairan di sekitar pulau
- ♦ Menurunnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan
- ♦ Kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove)

SASARAN K.5-1: Pengendalian pencemaran minyak di perairan pulau-pulau kecil Teluk Semangka

Indikator K.5-1:

- Terhindarnya pencemaran minyak di perairan sekitar pulau
- Terbentuknya tim mitigasi pencemaran

Strategi K.5-1:

- ✓ Memperbaiki prosedur proses pemindahan minyak yang lebih ramah lingkungan dari tanker apung
- ✓ Mengembangkan peralatan program mitigasi pencemaran secara terpadu antara pihak perusahaan, PEMDA, dan masyarakat

Strategi-strategi yang merupakan inti dalam dokumen ini, meliputi strategi pengelolaan wilayah pesisir secara berkesinambungan, melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir, mendukung pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, berkelanjutan serta terpadu.

Rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran dari GBHN dan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Nasional. Sedangkan proses Perencanaan Propinsi meliputi tiga komponen, yaitu :

1. Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Propinsi,
2. Program Pembangunan Daerah (Propeda) dan
3. Program Pembangunan Tahunan Daerah (Propetada).

Di tingkat nasional Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi mengacu pada GBHN dan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Nasional, sedang untuk tingkat daerah mengacu pada Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya Renstra ini menjadi masukan bagi Propeda dan Propetada.

Sesuai dengan kerangka kerja pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, Renstra merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan yang lebih spesifik, seperti : Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.

Renstra merupakan dokumen yang dinamis untuk jangka waktu perencanaan 10 (sepuluh) tahun. Namun demikian, dokumen ini harus direview secara teratur setiap 3 (tiga) tahun, yang mengacu kepada keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Propeda dan Propetada, serta mendapatkan masukan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan

yang berada di tingkat bawahnya, seperti rencana zonasi, pengelolaan dan aksi.

Dalam implementasi program, perlu ditentukan koordinator program (*leading sector*), sedang perencanaan program pengelolaan wilayah pesisir secara keseluruhan dikoordinir oleh Bappeda. Secara umum, tanggung jawab di antara *stakeholders* (institusi yang terkait) perlu disusun. Hal ini dibuat untuk menjamin adanya kejelasan koordinasi dan wewenang saat *stakeholders* berpartisipasi dalam implementasi strategi pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Pembagian tanggung jawab tersebut tercermin dalam **Tabel Proses Implementasi** di bawah ini. Penunjukkan institusi, baik pemerintah dan non-pemerintah, untuk setiap strategi didasarkan pada pertimbangan tugas pokok dan fungsi instansi yang paling relevan. Oleh karena itu, dinas/instansi yang disebutkan pertama kali merupakan dinas/instansi yang bertanggung jawab sebagai *leading sector*.

Prioritas implementasi strategi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- ♦ Prioritas 1: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2001-2002
- ♦ Prioritas 2: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2003-3004
- ♦ Prioritas 3: Program yang dilaksanakan mulai tahun 2005

Dalam penentuan ketiga prioritas tersebut, juga mempertimbangkan kepentingan untuk segera dilaksanakannya program tersebut, sesuai dengan isu pengelolaan wilayah pesisir yang muncul. Misalnya, isu penegakan hukum dimulai dengan pelatihan hukum lingkungan kepada aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah.

TABEL-TABEL PROSES IMPLEMENTASI

A. RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA S A S A R A N N : A-1. Peningkatan taraf pendidikan formal dan non-formal masyarakat A-2. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat A-3. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI A-1: ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan SLTP ✓ Memenuhi kebutuhan tenaga guru (sesuai rasio guru - siswa) di Sekolah Dasar dan SLTP ✓ Mengembangkan program pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir ✓ Mengusulkan, menyiapkan, dan implementasi materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar ✓ Mengintensifkan dan meningkatkan bimbingan mental kemasyarakatan ✓ Meningkatkan pelatihan teknis pengelolaan pesisir ✓ Mengembangkan program studi tentang pengelolaan wilayah pesisir di Perguruan Tinggi/ U N I L A	<u>Dinas Pendidikan</u> <u>Dinas Pendidikan</u> Diskan/DELP, Dishut, LSM, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Departemen tenaga kerja/BLK <u>Dinas Pendidikan</u> , Diskan/DELP, B a p e d a l d a <u>Dinsos</u> , Depag, LSM, PMD, Dinas pendidikan, Bappeda <u>Diklat Propinsi</u> , PT, Diskan/DELP, Bapedalda, LSM <u>U N I L A</u>	1 1 1 1 1 1 1	5 (2001 □ 2005) 2 (2001 □ 2002) 3 (2001 □ 2003) 3 (2002 □ 2004) 5 (2001 □ 2005) 3 (2002 □ 2005) 3 (2002 □ 2005)
STRATEGI A-2: ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan ✓ Memenuhi kebutuhan tenaga medis (sesuai rasio tenaga medis □ penduduk) ✓ Mengembangkan rencana perbaikan sistem sanitasi permukiman, dan lingkungan dalam program penyuluhan kesehatan	<u>Dinkes</u> , swasta <u>D i n k e s</u> <u>Dinas PU Cipta Narga</u> , Dinkes, Dep k i m b a n g w i l	1 1 1	5 (2001 □ 2005) 3 (2001 □ 2003) 3 (2001 □ 2003)
STRATEGI A-3: ✓ Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir ✓ Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat /Perguruan Tinggi/ Sekolah/Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir ✓ Mengimplementasikan rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu	<u>PMD</u> , Diskan/DELP, LSM, Dishut, PT <u>PMD</u> , Dinsos, LSM <u>Bappeda</u> , Bapedalda, PT, Dinas LSM, Dishut, Pendidikan,	1 1 1	3 (2001 □ 2003) 3 (2002 □ 2004) 5 (2001 □ 2005)

B . RENDAHNYA PENAAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM			
SASARAN	: B-1 Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum	B-2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum, penaaatan, dan penegakan hukum	B-3. Peningkatan keterpaduan dan koordinasi wewenang antar instansi terkait
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI B-1: ✓ Mengadakan pelatihan-pelatihan hukum lingkungan untuk aparat penegak hukum dan aparat pemerintah (pejabat) ✓ Penambahan jumlah personil, sarana, dan prasarana penegak hukum ✓ Mengadakan pelatihan dan simulasi proses peradilan yang sederhana	Bapedalda , PT, Kejati, Polda, PPNS, LSM, TNI AL, Dephub, Pengadilan Kejati , Polda, sektoral Bapedalda , PT, Kejati, Polda, Meneg-AL, Kumdang, Polda, Pengadilan, TNI	1 1 1	5 (2000 □ 2004) 2(2001 □ 2002) 3 (2002□ 2004)
STRATEGI B-2: ✓ Mengintensifkan sosialisasi <i>draft</i> dan produk hukum ✓ Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan ✓ Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan di laut ✓ Menentukan jalur-jalur penangkapan ikan dan penggunaan lainnya dengan rambu dan pemetaan yang disepakati bersama ✓ Mengatur kembali konsesi pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat mengakomodasi kepentingan semua pengguna ✓ Membentuk balai penyuluhan pesisir dan kelautan ✓ Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum	Pengadilan , PT, Polda, Diskan/DELP, LSM, Biro hukum Polda , TNI AL, Diskan/ DELP Polda , TNI AL, Diskan/DELP, Dephub. Diskan/DELP , Dishut, Diparda, LSM, HNSI, TNI AL, Bappeda Dephub , Dishut, Diparda, HNSI, LSM, TNI AL, swasta, Bappeda Diskan/DELP , LSM Biro hukum , DPRD, PT, LSM	1 1 1 1 1 1	3 (2001 □ 2003) 3 (2002 □ 2004) 3 (2002 □ 2004) 3 (2002 □ 2004) 3 (2003 □ 2005) 3 (2004 □ 2006) 3 (2004 □ 2006)
STRATEGI B-3: ✓ Mengadakan pengkajian kelembagaan ✓ Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir ✓ Mengembangkan operasi pengamanan laut secara terpadu	Balithangda , PT, Biro organisasi, LSM Bappeda , Dephub, PT, LSM, Diparda, Dishut, Bapedalda, HNSI, TNI AL, swasta, Pengadilan Polda , TNI AL, Diskan/DELP, LSM	2 2 2	3 (2004 □ 2006) 1 (2001) 3 (2001 - 2003)

C. DELUMBUHNYA PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR			
S A S A N A N : C-1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir C-2. Mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah pesisir dalam ATRWK dan ATRWP			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI C-1: ✓ Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir ✓ Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir	<u>Dappeda</u> , LSM, Diskan/DELP, PT, B a p e d a l d a <u>Dappeda</u> , LSM, PT, Diskan/DELP, B a p e d a l d a	1 2	2 (2002 □ 2003) 2 (2004 □ 2005)
STRATEGI C-2: ✓ Revisi ATRWK dan ATRWP dengan mensyaratkan ATRW pesisir menjadi bagiannya ✓ Memberdayakan tim penataan ruang secara optimal dengan mengikutsertakan institusi non pemerintah.	<u>Dappeda</u> , Dinas PU Cipta Karya, PT, L S M <u>Dappeda</u>	1 2	3 (2001 □ 2003) 4 (2003 □ 2007)

D. DEGRADASI	HABITAT	WILAYAH	PESISIR	(Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun, Rumput Laut, dan Pantai Berpasir)		
D.1 MANGROVE						
SASARAN : D.1-1. Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove D.1-2. Rehabilitasi mangrove D.1-3. Pemanfaatan tanah timbul untuk jalur hijau						
STRATEGI			PENANGGUNGJAWAB/LEMBAGA TERKAIT		PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI D.1-1 : ✓ Mengembangkan program pelestarian mangrove berbasis masyarakat			Bappeda, PT, LSM, Dishut, BPN, Diparda, Dishut		1	3 (2001 □ 2003)
✓ Mengembangkan program kerjasama dalam penanggulangan erosi pantai			Dinas PU Pengairan, Bappeda, PT, Bapedalda, Dishut, LSM, Dishan/DELP		1	3 (2000 □ 2002)
✓ Mengembangkan program pengelolaan tambah rakyat berwawasan lingkungan			Dishan/DELP, LSM, PT, CRMP, Bappeda, Dishut, Dinas PU, Bapedalda, Pengairan		1	2 (2001 □ 2002)
✓ Membentuk kelompok masyarakat dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan mangrove			Dishut, LSM, Dinas PU, Dishan/DELP, Pengairan, Bapedalda		1	3 (2001 □ 2003)
STRATEGI D.1-2 : ✓ Mengembangkan program dan melaksanakan rehabilitasi mangrove bersama masyarakat			Dishut, Bappeda, Dishan/DELP, LSM, Bapedalda, CRMP, BPN, PT		1	5 (2001 □ 2005)
✓ Membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove			Dishut, Bappeda, Dishan/DELP, LSM, Bapedalda, CRMP, PT		2	7 (2003 □ 2007)
✓ Mengembangkan program penelitian untuk mendukung inisiatif pengelolaan mangrove			Balitbangda, PT, Hanwil/Dishut, CRMP		1	3 (2003 □ 2005)
✓ Membuat atau mengadopsi panduan praktis pengelolaan mangrove dan mengadakan penyuluhan masyarakat			Balitbangda, CRMP, Hanwil/Dishut, LSM		1	2 (2001 □ 2002)
STRATEGI D.1-3 : ✓ Penegeasan terhadap status penggunaan dan penguasaan tanah timbul			BPN, Dishut, Bappeda, CRMP, DPRD, LSM		1	2 (2001 □ 2002)
✓ Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keberadaan tanah timbul			Dishut, LSM, CRMP		1	2 (2001 - 2002)

D.2 TERUMBU KARANG			
S A S A R A N : D.2-1. Melindungi terumbu karang			
D.2-2. Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang			
D.2-3. Pengelolaan terumbu karang sesuai dengan manfaat ekologi dan ekonomi			
D.2-4. Pemaduserasian antara program pengelolaan terumbu karang daerah dengan program nasional			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI D.2-1: ✓ Sosialisasi keberadaan dan fungsi cagar alam laut Krakatau dan Bukit Barisan Selatan ✓ Membuat rencana pengelolaan dan rencana zonasi cagar alam laut dan pemetaan kondisi terumbu karang ✓ Mengembangkan daerah perlindungan laut (<i>marine sanctuary</i>) berbasis masyarakat ✓ Menetapkan pembatasan penangkapan ikan karang ✓ Mengembangkan pengelolaan rumpon oleh masyarakat pengguna (nelayan)	Dishut, BKSOR, CAMP, LSM Diskan/DELP Bappeda, LSM, Bappedalda, Dishut, Diskan/DELP, PT, CAMP Bappeda, CAMP, Bappedalda, Dishut, Diskan/DELP, LSM, swasta, PT Dishut/DELP, BKSOR, CAMP, LSM, swasta Dishut/DELP, LSM, CAMP	1 2 1 1 1	2 (2001 □ 2002) 3 (2003 □ 2005) 2 (2001 □ 2002) 3 (2002 □ 2004) 5 (2001 □ 2005)
STRATEGI D.2-2: ✓ Mengembangkan program terpadu dalam rangka penguatan kelembagaan lokal ✓ Mengadakan sosialisasi pelestarian terumbu karang ✓ Mengadakan pelatihan pembuatan terumbu buatan	Dishut/DELP, Bappedalda, Dishut, Bappeda, LSM, PT, swasta Dishut/DELP, PT, Bappedalda, LSM, CAMP Dishut/DELP, LSM, PT	2 1 1	3 (2003 □ 2005) 3 (2001 □ 2003) 2 (2001 □ 2002)
STRATEGI D.2-3: ✓ Mengembangkan program pendidikan dan pengalihan alternatif mata pencaharian bagi nelayan pengebom ikan (misalnya: budidaya rumput laut, keramba apung) ✓ Mengadakan tambatan apung di lokasi terumbu karang yang potensial untuk dilindungi	Dishut/DELP, CAMP, PT, LSM, Bappeda, Bappedalda Dephub, Diparda, Dishan/DELP, PT, Bappeda, LSM	1 1	2 (2001 □ 2002) 2 (2001 □ 2002)
STRATEGI D.2-4: ✓ Mengembangkan program kerjasama dalam pengelolaan terumbu karang ✓ Pembentukan kelompok kerja antar lembaga dan antar kabupaten dalam pengelolaan terumbu karang	Bappeda, PT, Dishan/DELP, BKSOR, CAMP, Bappedalda Bappeda, BKSOR, Dishan/DELP, PT, LSM, Bappedalda	1 1	2 (2001 □ 2002) 2 (2001 □ 2002)

D.3.A PADANG LAMUN DAN RUMPUT LAUT							
SASARAN		: D.3.A-1. Perlindungan padang lamun sebagai ekosistem pendukung sumberdaya kelautan D.3.A-2. Pengelolaan padang lamun dan rumput laut sesuai manfaat ekologi dan ekonomi					
STRATEGI				PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT		PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI D.3.A-1:							
✓	Mengadakan	penyuluhan	fungsi	dan	manfaat	padang lamun	Dishon/DELP, Bapedalda, PT, Diparda, LSM, CRMP, 1, 3 (2001 □ 2003)
✓	Pengendalian	penangkapan	ikan	di	areal	padang lamun	Dishon/DELP, LSM, Bapedalda, 1, 3 (2001 □ 2003)
STRATEGI D.3.A-2:							
✓	Mengadakan tujuan	inventarisasi	jenis	dan	potensi	padang lamun/rumput laut untuk konservasi	Dishon/DELP, CRMP, LSM, PT, Balitbangda, Dishut, 1, 1 (2001)
✓	Mengembangkan untuk	program mengimplementasikan	kerjasama pengelolaan	antar padang lamun dan rumput laut	lembaga terkait	padang lamun dan rumput laut	Dishon/DELP, Bapedalda, PT, LSM, Balitbangda, Dishut, 1, 3 (2002 □ 2004)
✓	Mengadakan yang	bimbingan berwawasan	pengelolaan lingkungan dan	padang berbasis	lamun dan rumput laut	dan rumput laut masyarakat	Dishon/DELP, PT, CRMP, LSM, 1, 2 (2001 □ 2002)
D.3.B PANTAI BERPASIR							
SASARAN		: D.3.B-1. Pengelolaan pantai berpasir sesuai manfaat ekologi dan ekonomi					
STRATEGI				PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT		PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI D.3.B-1:							
✓	Mengembangkan	program	penanggulangan	erosi	pantai	secara terpadu	Dishon/DELP, CRMP, Bapedalda, PT, Bappeda, Dinas PU, Dishut, Pengairan, 1, 2 (2001 □ 2002)
✓	Sosialisasi	dan standarisasi	konstruksi	bangunan	pengaman	pantai	Dinas PU Pengairan, Dishon/DELP, 1, 4 (2000 □ 2003)
✓	Mengendalikan	dan mengatur	penambangan	batu hitam dan pasir besi			Dinas Pertambangan, Bapedalda, 1, 2 (2001 □ 2002)
✓	Mengadakan	inventarisasi dan	pemetaan	lokasi-lokasi	peneluran	penyu	BNSD, LSM, PT, Balitbangda, 1, 2 (2001 □ 2002)

E . PENCEMARAN	WILAYAH	PESISIR			
<p>S A S A R A N : E-1. Melindungi penduduk di desa-desa pesisir terhadap gangguan kesehatan sebagai akibat kontaminasi sumber air tanah</p> <p>E-2. Terciptanya kawasan pantai yang bebas dari limbah padat (sampah) baik organik maupun non-organik</p> <p>E-3. Peningkatan kualitas perairan pesisir sesuai dengan baku mutu nasional</p> <p>E-4. Peningkatan kepedulian <i>stakeholders</i> terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir yang sehat</p>					
STRATEGI			PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI E-1: ✓ Mengembangkan bimbingan masyarakat atau kampanye tentang resiko kesehatan karena pencemaran air tanah ✓ Perbaiki sistem drainase dan sanitasi lingkungan di areal pemukiman			<u>Dinbes</u> , PT, LSM, Bapedalda <u>Dinas PU Cipta Karya</u> , Dinkes	1 1	3 (2002-2004) 5 (2001-2005)
STRATEGI E-2: ✓ Mengadakan program kampanye-kampanye penanganan sampah ✓ Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa-desa pantai ✓ Meningkatkan pengelolaan sampah di areal pemukiman pesisir			<u>Mitra Bentala & Watata</u> , PT, CAMP, Bapedalda Dinas Kebersihan, Bappeda, <u>Dinas Kebersihan</u> , Dinas PU Cipta Karya, Pemdes, Diparda, LSM <u>Dinas Kebersihan</u> , Dinas PU Cipta Karya, Pemdes, Diparda, LSM	1 1 1	5 (2000-2004) 4 (2001-2004) 3 (2001 □ 2003)
STRATEGI E-3: ✓ Penguatan kelembagaan ✓ Mengefektifkan operasionalisasi pemantauan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran di daerah hulu ke hilir (<i>early warning system</i>) u Mengembangkan penelitian pencemaran air laut ✓ Menyusun standar emisi buangan ke laut			<u>Bapedalda</u> , PT, LSM, Swasta, PU Pengairan <u>Bapedalda</u> , Bappeda, PT, LSM, Swasta, Diskan/DELP, TNI AL, Polda, Kehakiman <u>Balitbangda</u> <u>Bapedalda</u> , TNI AL, Kehakiman, Bappeda, LSM, Swasta, Polda, Diskan/DELP, Dephub	1 1 1 2	2 (2001-2002) 5 (2001-2005) 2 (2002-2003) 3 (2003-2005)
STRATEGI E-4: ✓ Mengembangkan program penyuluhan sanitasi lingkungan kepada masyarakat di desa pantai			<u>Bapedalda</u> , Bappeda, PT, LSM, Swasta, Diskes, PU Pengairan, PU Cipta Karya	1	2 (2001-2002)

F. KEUSAHAN SASARAN	HUTAN, : F-1. F-2.	TAMAN Peningkatan	NASIONAL, pengelolaan dukungan	DOK stakeholders	CAGAR kawasan stakeholders	ALAM konservasi terhadap	LAUT sesuai program	dengan fungsi dan peruntukannya konservasi		
STRATEGI								PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI F-1: ✓ Rehabilitasi	hawasan-hawasan	hutan	yang	vegetasinya	mengalami	kerusakan		BNSD/BTN, Bappeda, LSM, PT,	1	5 (2001 - 2005)
✓ Pemantapan	zonasi	dalam	hawasan	konservasi				BNSD/BTN, D E L P, Bappeda, LSM, PT, Diskan/	1	3 (2001 - 2003)
✓ Memperketat kawasan	pengawasan konservasi	dan	perizinan	untuk semua	aktivitas di	dalam		BNSD/BTN, D E L P, PT, Bappeda, LSM, Diskan/	1	3 (2001 - 2003)
✓ Resolusi konflik	bagi masyarakat	sekitar	kawasan	konservasi				Kewil/Dishut, Pemda, LSM, BNSD/BTN, Diskan/DELP, PT,	1	3 (2001 - 2003)
✓ Membuat dan sosialisasi	rencana	pengelolaan	kawasan	konservasi				Kewilhut, LSM, BNSD/BTN, PT	1	2 (2001 - 2002)
STRATEGI F-2: ✓ Sosialisasi	fungsi dan	pentingnya	peran	kawasan	konservasi	terhadap	masyarakat	Kewil/Dishut, Bappedalda, BNSD/BTN, Bappeda	1	2 (2001 - 2002)
✓ Pendampingan cagar alam	usaha masyarakat	di	zona	penyangga	kawasan	taman nasional	dan	Kewil/Dishut, Diperta, Diparda, Disbun, LSM, PT, BNSD/BTN, Bappedalda	1	4 (2002 - 2005)
✓ Mengembangkan	forum komunikasi	antar	stakeholders					Kewil/Dishut, Bappedalda, PT, BNSD/BTN, LSM,	1	2 (2002 - 2003)

G. POTENSI DAN OBYEK WISATA BAHARI BELUM DINEMBAHNGAN SECARA OPTIMAL				
SASARAN	:	G-1.	Penyediaan sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan	
		G-2.	Pengembangan obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal	
		G-3.	Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata bahari	
STRATEGI		PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI G-1:				
✓	Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasi kepariwisataan	<u>Diparda</u> , Asita, PHRI	2	5 (2003-2007)
✓	Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, dan pemasaran pariwisata	<u>Diparda</u> , Asita, PHRI	2	2 (2003-2004)
✓	Mengkaji ulang RIPPDA Lampung untuk disepakati bersama	<u>Diparda</u>	2	2 (2003 - 2004)
STRATEGI G-2:				
✓	Memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar pariwisata bahari	<u>Diparda</u> , PHRI, swasta	1	5 (2001-2005)
✓	Mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari	<u>Diparda</u> , PHRI, swasta, Dinas Perindustrian	2	5 (2003-2007)
✓	Menyediakan kredit lunak bagi masyarakat untuk pengembangan usaha kerajinan rakyat yang berwawasan lingkungan	<u>Diparda</u> , PHRI, swasta, Bank, Dinas Perindustrian, LSM	2	5 (2003-2007)
✓	Mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat	<u>Diparda</u> , PHRI, swasta, Bank, LSM, Asita	2	3 (2003-2005)
✓	Mengembangkan dan memperkuat jaringan profesi usaha kepariwisataan	<u>Diparda</u> , PHRI, swasta, Asita, LSM	1	3 (2001-2003)
STRATEGI G-3:				
✓	Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari terpadu	<u>Diparda</u> , PHRI, swasta, Bappeda, LSM	1	3 (2001-2003)
✓	Mengembangkan program untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari	<u>Diparda</u> , PHRI, swasta, LSM	1	3 (2001-2003)

HASIL BELUM SASARAN	OPTIMALNYA : H-1. H-2. H-3.	PENGELOLAAN	PERIKANAN	TANGKAP	DAN	BUDIDAYA usaha perikanan tangkap dan budidaya hasil usaha perikanan antar instansi dalam pengelolaan usaha perikanan		
STRATEGI				PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT		PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)	
STRATEGI H-1: ✓ Pengadaan sarana dan prasarana usaha perikanan ✓ Mengembangkan skim-skim perkreditan usaha perikanan yang sederhana ✓ Mengembangkan pemasaran usaha perikanan						Dishon/DELP, Dephub, Bappeda Dishon/DELP, HNSI, Bank, Koperasi, Bappeda, Dishon/DELP, Koperasi, LSM, PT	1 1 1	2 (2001-2002) 3 (2001-2003) 2 (2002-2003)
STRATEGI H-2: ✓ Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang lebih higienis dan menghindari penggunaan bahan pengawet yang berlebihan ✓ Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasar ✓ Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga ✓ Mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayan tradisional dengan pola kemitraan						Dishon/DELP, Swasta, Dinkes, DinIndustri, Dishon/DELP, Swasta, Bappeda, DinIndustri, Dishon/DELP, DinIndustri, LSM, Swasta, Bappeda, Dishon/DELP, DinIndustri, LSM, Swasta, Bappeda,	1 1 1 1	3 (2001-2003) 3 (2001-2003) 4 (2002-2005) 3 (2001 - 2003)
STRATEGI H-3: ✓ Mengembangkan sistem informasi perikanan ✓ Mengembangkan forum komunikasi antar instansi terkait dalam pengelolaan usaha perikanan						Dishon/DELP, PT, CRMP, LSM Dishon/DELP, PT, swasta	2 1	3 (2003-2005) 3 (2001-2003)

1. RAWAN BENCANA ALAM (GEMPA, TANAN LONGSOR, BANJIR)			
SASARAN : I-1. Meminimalkan kerugian jiwa dan material			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI I-1: ✓ Menyusun perencanaan mikro zonasi daerah rawan bencana alam ✓ Mengembangkan program peringatan dini bencana alam ✓ Menggali dan mengembangkan pengetahuan lokal dalam mitigasi bencana alam ✓ Menyusun <i>contingency plan</i> (tanggap darurat) pasca bencana ✓ Standarisasi dan sosialisasi konstruksi bangunan tahan gempa	Balithangda , PT, LSM, BMG, Geologi Balithangda , Sathorlak, Bappeda, BMG, Geologi Balithangda PT, LSM, Pemda Kab/Kota, Dinas Pu Pengairan Bappeda , PT, Polda, Dinsos, LSM Dinas PU Cipta Karya , PT, LSM, Balitbangda	1 1 2 2 2	5 (2002-2006) 5 (2002-2006) 3 (2003 - 2005) 2 (2003 □ 2004) 2 (2003 □ 2004)
J. ANCAMAN INTRUSI AIR LAUT			
SASARAN : J-1. Pengendalian intrusi air laut			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI J-1: ✓ Pengawasan pengambilan air tanah ✓ Mengadakan pengkajian tentang alih fungsi lahan ✓ Merancang ulang sistem kanal untuk mengatur keperluan sawah dan tambak	Dinas Pertambangan , Bapedalda, Pemda Kab. Dinas PU Pengairan , Balitbangda, PT, LSM, Bapedalda, Dinas PU Pengairan , Bappeda, Diperta, Diskan/OELP, Bapedalda, LSM, P T	1 1 1	3 (2002-2004) 3 (2001-2003) 5 (2000-2004)

K. 1. MINIMAYA							
SARANA	DAN	PRASARANA	TRANSPORTASI,	PENDIDIKAN,	DAN	KESEHATAN	
SASARAN : K.1-1. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan							
STRATEGI				PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT		PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI K.1-1: ✓ Pengadaan sarana dan prasarana transportasi, pendidikan dan kesehatan				Bappeda, Dephub, Diskan/DELP, Dinas Pendidikan, Dinkes		1	5 (2001-2005)
✓ Penempatan tenaga guru dan tenaga medis sesuai rasio guru - siswa dan rasio tenaga medis - jumlah penduduk				Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinkes		1	3 (2001-2003)
K. 2. NEUSARAN							
LINGGUNGAN	PULAU-PULAU	KECIL	DAN	PERAIRAN	SEKITARNYA		
SASARAN : K.2-1. Melindungi keberadaan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun K.2-2. Peningkatan partisipasi <i>stakeholders</i> terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya K.2-3. Penaatan dan penegakan hukum							
STRATEGI				PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT		PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI K.2-1: ✓ Mengembangkan program perlindungan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun secara terpadu				Diskan/DELP, LSM, PT, CRMP, Bapedalda		1	3 (2001 □ 2003)
✓ Rehabilitasi mangrove				Dishut, LSM, Diskan/DELP, PT, CRMP		1	5 (2001 □ 2005)
✓ Inventarisasi status dan potensi sumberdaya alam pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya				Balithangda, Diskan/DELP, PMD, PT, LSM		1	3 (2000 □ 2002)
STRATEGI K.2-2: ✓ Meningkatkan dan mengintensifkan kegiatan penyuluhan lingkungan bagi masyarakat pulau				Bapedalda, LSM, PT, Diskes, Bappeda, PMD, Diskan/DELP		1	5 (2001 □ 2005)
✓ Mengembangkan program pendidikan lingkungan bagi anak-anak usia sekolah				Dinas Pendidikan, Bapedalda, LSM, PT		2	5 (2003 □ 2007)
✓ Mengembangkan sistem pengamanan lingkungan oleh masyarakat pulau				Polda, LSM, TNI AL, Diskan/DELP, HNSI		1	2 (2001 □ 2002)
STRATEGI K.2-3: ✓ Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang zona-zona pemanfaatan, alat, dan cara-cara pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ramah lingkungan				Diskan/DELP, Perhubungan, Polda, Asosiasi Profesi, LSM		1	2 (2001 □ 2002)
✓ Meningkatkan frekwensi penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terpadu oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah				Bapedalda, LSM, PT, Kehakiman, Diskan/DELP, Polda, TNI AL		1	5 (2002 □ 2006)

K. 3 BELUM ADANYA PENATAAN RUANG YANG MENCAKUP PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN SEKITARNYA			
SASARAN : K.3-1. Rencana tata ruang kawasan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya menjadi bagian RTRW dan RTRWP			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI K.3-1: ✓ Revisi RTRW dan RTRWP yang mencakup RTRW pesisir dan pulau-pulau kecil ✓ Sosialisasi rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>Bappeda</u> , Dinas Tata ruang, Diskan/DELP, Diparda, Dishutbun, Dinas PU Cipta Karya, PT	1	2 (2001 □ 2002)
	<u>Bappeda</u> , Dinas Tata ruang, Diskan/DELP, Diparda, Dishutbun, Dinas PU Cipta Karya, PT	1	2 (2002 □ 2003)
K. 4 BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN POTENSI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PARAWISATA RANPAT DI PULAU KECIL			
SASARAN : K.4-1. Peningkatan pemanfaatan lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan pertanian dan perikanan K.4-2. Pengembangan teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI K.4-1: ✓ Intensifikasi dan ekstensifikasi pengembangan lahan pertanian ✓ Mengintensifkan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan pariwisata	<u>Diperta</u> , Diskan/DELP, LSM, PT, Diparda	1	4 (2001 □ 2004)
	<u>Diperta</u> , Bappeda, LSM, PT, Diskan/DELP, PMD, Diparda	1	5 (2001 □ 2005)
STRATEGI K.4-2: ✓ Mengembangkan program teknologi tepat guna untuk pengolahan produk pertanian dan perikanan	<u>Diperta</u> , Balitbangda, Bappeda, LSM, PT	2	4 (2003 □ 2006)

K. 5 POTENSI PENCEMARAN MINYAK DI TELUK SEMANGKA			
SASARAN : K.5-1. Pengendalian pencemaran minyak di perairan pulau-pulau kecil Teluk Semangka			
STRATEGI	PENANGGUNGJAWAB/ LEMBAGA TERKAIT	PRIORITAS	WAKTU (TAHUN)
STRATEGI K.5-1: ✓ Memperbaiki prosedur proses pemindahan minyak yang lebih ramah lingkungan dari tanker apung ✓ Mengembangkan peralatan, program mitigasi pencemaran secara terpadu antara pihak perusahaan, PEMDA, dan masyarakat	Pertamina, Pemda Kab., Bapedalda Pertamina, PT, Bapedalda, LSM	1 1	2 (2001 □ 2002) 2 (2001 □ 2002)

Keterangan : Urutan pertama, garis bawah = penanggung jawab



Perencanaan wilayah pesisir merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam perjalanan waktu, isu-isu pengelolaan wilayah pesisir yang baru akan muncul, sehingga dalam aktivitas perencanaan lebih lanjut akan didapatkan beberapa strategi-strategi tertentu yang tidak relevan lagi. Oleh karena itu, prioritas strategi perlu dievaluasi dan dimodifikasi. Pemantauan atas kinerja rencana-rencana yang telah dibuat, merupakan dasar bagi efektifitas evaluasi pengelolaan. Dalam implementasinya, strategi-strategi pengelolaan wilayah pesisir perlu direview 3 (tiga) tahun sekali oleh Tim Pengarah Propinsi (PST)/Bappeda dan *stakeholders*, yang dilaksanakan oleh Tim Kerja. Juga diperlukan Revisi terhadap strategi dan isi dokumen setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Tim Pengarah Propinsi (PST)/Bappeda dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai pedoman dalam proses kaji ulang dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang diimplementasikan, mengacu kepada indikator-indikator keberhasilan program seperti yang tertera dalam Bab 3.

Kami berharap dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi semua pihak yang berminat dan terlibat dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Propinsi Lampung.

Namun demikian, kami menyadari bahwa dokumen ini masih mengandung berbagai kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala saran perbaikan maupun pertanyaan lebih rinci dari para pembaca yang budiman dapat disampaikan kepada alamat berikut :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

PROPINSI LAMPUNG

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Teluk Betung

Bandar Lampung 35401

Telp. (62-721-481166)

PROYEK PESISIR LAMPUNG

Jl. Sutan Syahrir No. 4, Pahoman

Bandar Lampung 35231

Telp. (62-721-250984), Fax. (62-721-253013)

e-mail: crmp-lpg@indo.net.id

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 1999. Lampung Dalam Angka 1998. Badan Pusat Statistik. Bandar Lampung. Indonesia
- CRMP (a). 1998. Penyelidikan Geologi Lingkungan Pesisir Propinsi Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (b). 1998. Profil Perikanan Tangkap Propinsi Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (c). 1998. Profil Habitat Perairan Pantai Propinsi Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (d). 1988. Kesesuaian dan Arahan Pengembangan Lahan Pertanian Pesisir Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (e). 1998. Sumber-sumber Pencemaran Wilayah Pesisir di Propinsi Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (f). 1998. *An Analysis of Aquaculture in the Coastal Area of Lampung, Evolution, Status, dan Potensial*. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (g). 1998. *Significant Coastal Habitats, Wildlife and Water Resources in Lampung*. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (h). 1998. Pariwisata Bahari di Pesisir Teluk Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (i). 1998. Kondisi Oseanografi Perairan Pesisir Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (j). 1998. Oseanografi dan Kualitas Perairan Teluk Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- CRMP (k). 1998. Pemanfaatan Lahan “Terbuka” di Lampung. Proyek Pesisir Publication, Technical Report. Coastal Resources Center. University of Rhode Island. Jakarta. Indonesia.
- Dahuri, R. 1999. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil. Prosiding Lokakarya Pengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. BPPT - Bangda - CRMP. Jakarta.
- Fisheries Diving Club. 2000. Laporan Ekspedisi Zooxanthellae V di Lampung Barat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hunt, L.J., I.M. Dutton, J.P. Duff. (1998). *Integrated Coastal Zone Planning and Management Manual*. Canora Inc, Vaughan International and BCEOM. Jakarta.
- Olsen, S.B., K. Lowry, J. Tobey. 1998. *A Manual for Assessing Progress in Coastal Management*. Report #2211. Coastal Resources Center, University of Rhode Island. Narragansett. USA.
- Wiryawan, B., B. Marsden, H.A. Susanto, A.K. Mahi, M. Ahmad, H. Poespitasari (Editor). 1998. *Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung*. Kerjasama Pemda Propinsi Lampung dengan Proyek Pesisir (Coastal Resources Center, University of Rhode Island dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor). Bandar Lampung. Indonesia.

MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana sudah ada seperti TPI & dempond - Adanya PSDPU-jaring irigasi, jaring rawa, tanggul banjir dll - UU No. 5/90 tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya - Tersedia Penyuluh Lapangan Penghijauan 20 org & Polisi Hutan 20 org - Inpres No. 5/93 tentang program penanggulangan kemiskinan - Kepres No. 82/84 tentang LKMD yang bertujuan untuk melatih tenaga KPN & P3MD di desa - Prioritas Pemda untuk mengembangkan pariwisata - Budaya masyarakat nelayan untuk menjaga laut sebagai sumber pe ng h i d u p a n - Tersedianya sarana dan prasarana alat-alat berat sebagai pendukung pelaksanaan program pe m b a n g u n a n - Telah ada ATRW Kabupaten, Perda No. 10/94 direvisi th. 99 - Telah ada DTR (Perda 13/99) baru berjalan 1 bln - Adanya petugas UPTPU yang dapat membantu pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan r u a n g - TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) telah dibentuk - UU No. 22/99 tentang Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar instansi sangat l e m a h - Dana , sarana, dan prasarana operasional masih kurang - Kualitas dan kuantitas SOM (staf) masih kurang - Laboratorium LH belum ada - Kurangnya pengawasan oleh personil terhadap peraturan yang terkait dengan pengairan - Pemeliharaan jaringan pengairan belum dilaksanakan dengan baik - Hukum/peraturan belum disosialisasikan dengan baik - Belum ada persepsi yang sama dalam memahami Inpres No. 5/93 - Pembinaan terhadap organisasi LKMD baru menyentuh pada persiapan SOM LKMD belum pada program aksi yang dapat memajukan LKMD sebagai mitra pemerintah - Belum adanya penataan ruang secara rinci untuk wilayah kawasan tertentu - Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran tata ruang sulit untuk di t e r a p k a n - Sulitnya koordinasi dengan pihak-pihak swasta terutama bagi para pengusaha sehingga menyulitkan untuk penataan/pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sumberdaya alam kelautan masih mungkin untuk dikembangkan baik untuk perikanan maupun p a r i w i s a t a - Teknologi penangkapan dan pengolahan hasil tangkapan relatif s e d e r h a n a - Prospek pemasaran hasil perikanan masih sangat baik - Masih ada daerah pengembangan irigasi (baru) untuk peningkatan produksi pertanian - Seni budaya masyarakat yang berbeda-beda dalam kelompok-kelompok masyarakat - Potensi air panas dan air terjun yang tersebar di sekitar gunung Rajabasa - Penataan wilayah pelabuhan Bakauheni berkaitan dengan pengembangan wilayah pesisir Kab. Lampung Selatan merupakan hinterland pulau Jawa untuk pengembangan industri - Mobilitas penduduk yang sangat cepat, perlu penataan ruang yang m e m a d a i - Lahan yang subur untuk pengembangan pertanian - Pelabuhan penyeberangan Bakauheni □ Merah - Pengelolaan KLTDC - Wisata pulau dan gunung Krakatau - Berpotensi untuk pengembangan burung walet 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan lingkungan yang makin p a r a h - Potensi konflik sosial masih tinggi - Tidak ada kesinambungan program - Rendahnya kesadaran masyarakat/ pengusaha terhadap lingkungan - Persepsi dan visi bagian lingkungan hidup belum sama - Kesulitan pembebasan tanah untuk pengembangan daerah irigasi, dll - Rusaknya DRS yang mengakibatkan kurangnya sumber air - Adanya banjir di daerah inti akibat rusaknya DRS - Adanya kegiatan tambak baik tradisional/semi teknis yang mengabaikan status lahan & dampak lingkungan khususnya hutan bakau - Penggarapan tanah timbul oleh m a s y a r a k a t - Adanya intrusi air laut - Kerusakan terumbu karang karena p e n g e b o m a n - Kawasan pariwisata dieksploitasi untuk pembenihan - Abrasi pantai - Reklamasi yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup - Sistim pemasaran hasil perikanan masih lemah - Status kepemilikan lahan masih ada yang tumpang tindih

Partisipan : 1. Dinas Perikanan 5. Dinas Pertanian 9. Dinas Tata Ruang
 2. Bagian Lingkungan Hidup 6. Dinas PMD 10. Bappeda
 3. Dinas Pengairan 7. Dinas Pariwisata 11. BPN
 4. Dinas Kehutanan 8. Dinas PU K 12. Camat

LAMPIRAN I (lanjutan)

MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 th 1997 - UU No. 5 th 1990 tentang KSDA dan ekosistemnya - UU No. 5 th 1983 tentang ZEE - PP 20 th 1990 tentang Pengendalian pencemaran air - Kepres No. 32 th 1990 - UU No. 9 tahun 1985 - Perda Tk. I no. 2 th 1991 - Perda Tk. II no. 23 th 1994 - UU No. 22 tahun 1999 - UU No. 5 th 1990 - PP no. 20 th 1990 - PP no. 35 th 1991 - Perda no. 12 th 1998 tentang persampahan - SK Bupati no. 9 th 1998 tentang Sistem Operasi Pengelolaan Lingkungan - Perda no. 12 th 1994 tentang RUTRW Lambar - Perda yang mengatur tentang Pengolahan Bahan Galian C - Peranan tokoh adat dan tokoh masyarakat masih tinggi - Adanya 3 orang petugas HRPN (Pesisir Selatan, Tengah dan Utara) ditambah 5 petugas fungsional pengamanan hutan - Mempunyai tenaga penyuluh pertanian 26 orang - Adanya 50 kelompok tani terlatih 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya biaya, sarana, dan prasarana operasional - Kualitas dan kuantitas SOM yang kurang memadai - Belum ada peraturan daerah tentang sempadan pantai - Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum <i>bottom-up</i> - Sistem pembinaan karier PNS belum baik - Frekwensi penyuluhan kebersihan lingkungan masih rendah - Belum tersosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Perda, SK Bupati - Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan penggalian Gol. C - Proyek perkebunan tidak dapat memenuhi kebutuhan petani - Terbatasnya waktu kegiatan padat karya - Koordinasi dengan Taman Nasional masih kurang - BPN hanya terdapat sampai di Tingkat Kabupaten - Pengaturan sempadan pantai (Kepres 32/90) belum di-PERDA-kan - Belum terpadunya kelembagaan di bidang pekerjaan umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya areal penangkapan ikan yang memungkinkan untuk masuknya investor - TNBS, Pulau Bertuah dan Pulau Pisang berpotensi untuk pariwisata - Potensi lahan pertanian yang masih luas - Kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan ada - Permintaan pasar ekspor terhadap komoditi perikanan : lobster dan ikan tuna cukup tinggi - Ada potensi pengembangan tanaman perkebunan (kopi, cengkeh, lada, dan nilam) - Adanya Repong Damar untuk Agrowisata - Pengembangan melinjo (Pesisir Selatan), sawo (Pesisir Tengah), duku (Pesisir Utara), durian cukup baik - Adanya program pengembangan daerah irigasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan SDM masyarakat masih rendah - Pemakaian racun oleh masyarakat dalam penangkapan ikan - Perambahan hutan - Pengeboman oleh nelayan luar - Pengambilan material bangunan dari laut sehingga mempercepat abrasi pantai - Adanya instansi terkait yang melakukan kegiatan melebihi kewenangannya - Pemasaran bahan baku bom/bius ikan yang sangat bebas - Penambangan bunga/batu karang - Penegakan hukum yang tidak tegas - Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya alam - Kemampuan permodalan dan keterampilan petani rendah - Adanya masyarakat yang tidak mengakui kawasan hutan HPT dan dianggap Tanah Marga - Pemilikan tanah melebihi batas maksimal, dan pemiliknnya banyak dari luar - Pemilikan tanah secara absente - Kurangnya potensi/volume air untuk irigasi

Partisipan :	1. Camat Wilayah Pesisir	7. Dinas Kebersihan
	2. B P N	8. Dinas Perikanan
H u k u m]	3. B a p p e d a	9. Pemda (Bagian
	4. Dinas Pertanian	10. Dinas Kehutanan
	5. D i p a r d a	11. Dinas Perkebunan
	6. Dinas PU kabupaten	

LAMPIRAN I (lanjutan)

MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - Perda tentang struktur dinas tata kota sudah ada - Ada perda tentang RIR, RTRW dan SK penentuan sempadan bangunan - Mitra kerja cukup banyak - Adanya komitmen pimpinan/ketua Bappeda tentang pelaksanaan program kerja - Perda dan UU tentang lingkungan hidup - UU No. 22/99 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/99 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah - Memiliki perda/peraturan-peraturan yang dapat mengatur masalah pantai - Konsep BLASA-UOP : Teluk Lampung akan dijadikan Water Front City - PHRI sebagai penyerap aspirasi anggota dalam rangka usaha-usahanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional alat-alat berat masih kurang - Kualitas SDM (staf) masih rendah - Kurangnya dana, sarana dan prasarana operasional - Masih kurangnya sosialisasi tujuan Proyek Pesisir bagi masyarakat asli daerah - Kurang koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir - Belum memiliki SDM yang menguasai masalah kelautan dan pantai - Penanganan kebijaksanaan reklamasi sangat dominan oleh Pemda Tk. I - Kejelasan perencanaan yang kurang memadai - Banyaknya rawa dan genangan air yang berakibat menjadi sarang nyamuk - Sulitnya koordinasi dan sosialisasi anggota PHRI - Fasilitas dana yang kurang mendukung/sulitnya penarikan iuran anggota PHRI 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan jalan di wilayah pinggiran kota - Penataan jaringan jalan lingkungan - Penataan area-area konservasi lahan - Penataan area komersial dengan headaan kemajuan kota - Potensi perairan Teluk Lampung - Adanya bantuan dana dari badan dunia - Pengembangan industri rumah tangga dari hasil laut sebagai ciri khas Lampung - Banyaknya masyarakat dan instansi memerlukan/ membutuhkan hasil Laut - Letak geografis yang strategis - Pemandangan pantai yang baik - Minat masyarakat yang ingin tinggal di tepi pantai cukup tinggi - Pengadaan pendidikan bagi pengurus usaha-usaha wisata - Menciptakan iklim sejuk dalam persaingan anggota (perang tarif) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran terhadap peraturan daerah yang masih tinggi - Reklamasi pantai merusak habitat - Penggunaan bom untuk kegiatan penangkapan di laut - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup - Adanya banjir akibat reklamasi pantai dan kurangnya penghijauan - Kurangnya minat investor untuk pengembangan pesisir - Terbatasnya lahan yang dapat menunjang pemindahan penduduk pantai - Kurangnya tenaga terampil yang menangani daerah pesisir - Berkembangnya kegiatan/ praktek prostitusi - Sarana yang dijadikan pemakai/konsumen narkoba - Citra masyarakat terhadap usaha wisata yang buruk

Partisipan :

1. Dinas PU Kota	6. Camat
2. Bagian Hukum	7. CV. Bumi Waras
3. Dinas Tata Kota	8. PT. Servitia Cemerlang
4. Dinas Perikanan	9. PT. Bina Bumi Segara
5. Bappeda	10. DPD PHRI

LAMPIRAN I (lanjutan)

MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN TULANG BAWANG

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya model tambah udang terpadu yang melibatkan banyak instansi terkait daerah, nasional, internasional - PT. DCD sebagai kawasan berikat - UU No. 23 th 97 mengenai lingkungan hidup - UU No. 22 tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah - PP 51 th 92 tentang Rmdal/ PP 27 / 99 - PP 20 th 90 tentang pengelolaan Limbah - UU No. 24 th 92 tentang penataan ruang - Adanya ATRWK Tulang Bawang - Adanya UU No. 9/85 bahwa 1% hasil budidaya (tambah) dapat ditarik - Kepres 39/80 tentang pemberantasan trawl - UU No. 9/85, tentang larangan nelayan menangkap ikan dengan menggunakan Bom, racun dan aliran listrik sehingga merusak kelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kemampuan SOM menghadapi era perdagangan bebas : <ul style="list-style-type: none"> - community development - manajemen internal - Pengembangan konsep kemitraan inti dengan plasma yang belum jelas aturannya di PT. DCD dari instansi formal - Model tambah plastik yang tingkat produksi pertambah relatif masih kecil - Sumberdaya manusia (staf) masih minim (kualitas dan kuantitas) - Peraturan perundang-undangan yang ada tidak punya kekuatan untuk menghentikan suatu perusahaan - Dalam perencanaan peran serta masyarakat masih rendah (masih bersifat sektoral) - Tata ruang wilayah belum diperdakan - Sarana dan prasarana operasional belum memadai - Perda mengenai PRD belum ada - Kurangnya tenaga teknis perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya model pengembangan TIR yang berkelanjutan secara biofisik dan sosek - Adanya pusat penelitian pengembangan hutan mangrove dan nipah - Pengembangan budidaya kerang - Ketersediaan sumberdaya wilayah pesisir (SDR), rawa, sungai dan Lebunng - Eksploitasi potensi perairan umum belum optimal - Kondisi lahan cocok untuk tanaman karet, kelapa sawit, kelapa dan tebu - Masih Luasnya lahan yang belum dimanfaatkan - Terdapat kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi - Banyak perairan umum baik buatan maupun alam, serta sungai untuk pengembangan budidaya keramba dan penangkaran - Adanya kerjasama yang baik antara LPTP (Lembaga Pengkajian & Teknologi Pertanian) BBL dengan Dinas Perikanan/Kabupaten - Areal sawah yang luas untuk mina padi - Limbah tapioka untuk pakan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran air Way T. Bawang & Way Mesuji yang masuk ke laut - Perambahan kawasan hutan mangrove di jalur hijau PT. DCD - Jaringan togog di Way T. Bawang dan Way Mesuji mengganggu alur lalu lintas kapal ekspor - Pihak swasta yang tidak peduli terhadap pencemaran lingkungan hidup - Lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup - Pemukiman ilegal di sekitar pantai - Kewenangan dalam perijinan masih didominasi oleh Propinsi dan Pusat - Banyak pembukaan hutan yang berakibat kurangnya debit air sungai di hulu - Kurangnya keterampilan masyarakat untuk mengelola tambak yang berwawasan lingkungan - Masuknya armada penangkapan berkekuatan besar di wilayah yang dimanfaatkan nelayan setempat yang hanya mempunyai armada kecil

Partisipan : 1. PT. DCD
 2. Bagian Lingkungan Hidup
 3. Dinas Perkebunan
 4. Dinas Perikanan
 5. BPN
 6. Bappeda
 7. Dinas PU Pengairan
 8. Bagian Program

LAMPIRAN I (lanjutan)

MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN TANGGAMUS

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 9 Th. 85 tentang perikanan - Perda No. 2 Th. 91 tentang perikanan dan kelompok nelayan - UU No. 22 tentang Otonomi Daerah - UU No. 2 Th. 97 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Tanggamus - UU No. 24 Th. 92 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pelaksanaan (PP s/d In. Men) - PERMENDAGRRI No. 9 Th. 82 tentang PSD - PP No. 6 Th. 88 tentang Koordinasi Instansi vertikal - UU No. 23 Th. 97 tentang Lingkungan Hidup - UU No. 9 Th. 79 tentang Kepariwisataaan - UU No. 2 Th. 97 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus dan Diparda - Program rehabilitasi kebun kelapa rakyat di Tugu Papak, Kacapura, Sidomulyo, Betung, Desa Terbaya, Kota Agung, Kp Way Gelang) - Tenaga penyuluh kehutanan (PLP/PLK) sekitar 80 orang - Telah ada Balai Taman Nasional (TNBBS) - Telah ada ATRW Kabupaten - Telah ada rencana pembuatan jalan dari Pemerihan ke Menggala - Ada rencana pembangunan jalan dari Way Nipah ke arah Tanjung Cina 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dana, sarana, dan prasarana operasional - Kualitas dan kuantitas SOM (staf) kurang memadai - Bidang pengairan sebagian besar kegiatannya masih dikelola oleh pengairan Propinsi - Koordinasi dan pengawasan di dalam menertibkan kegiatan perikanan belum berjalan dengan baik - Pelimpahan wewenang mengenai perizinan tentang industri belum ada - UU No. 8 Th. 82 belum ada Ppnya - Belum ada Perda tentang pembangunan & pengembangan usaha kepariwisataan - Pengusulan program masih ego-sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan hutan pantai di sepanjang pesisir pantai Teluk Semangka - Pembibitan bakau/budidaya tanaman bakau - Pemanfaatan TNBBS untuk wisata (flora, fauna) - Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga penyuluh (PLP/PLK) dan polisi hutan - Jumlah nelayan 3500 orang yang dapat mengelola potensi wilayah pesisir - Pengolahan kulit ikan pari untuk bahan industri, dan pengolahan kerang pantai menjadi kerajinan - Tersedianya sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan (perikanan laut dan darat, pariwisata) - Potensi obyek wisata cukup banyak dan beragam, seperti Desa Badak dan Pantai Karang Putih, dan Sedayu sebagai antisipasi jalur litas barat - Tanggamus dilewati oleh jalan lintas barat antara Bandar Lampung-Bengkulu, Jambi dll - Propinsi Lampung termasuk kelompok wilayah tujuan wisata - Tokoh-tokoh adat dapat diajak bekerjasama - Adanya potensi Batu Zeolit di Tengor dan Batu Andesit di Padang Ratu - Sabut kelapa untuk industri rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Harga hasil perkebunan, fluktuasinya tidak menentu, dan sistem pemasaran kurang terpola - Penebangan batang kelapa untuk bahan bangunan pengganti kayu, peremajaan oleh masyarakat kurang - Keadaan sosial ekonomi masyarakat di daerah pesisir pada umumnya masih rendah - Tingkat pendidikan dan pengetahuan fungsi hutan masih rendah - Pemanfaatan hutan lindung oleh masyarakat semakin luas, - Sulit untuk pembebasan tanah bagi kepentingan jalan, sarana irigasi dan bangunan - Langkanya benih dan species ikan sehingga menurunkan produksi hasil perikanan - Minimnya pengetahuan para nelayan dan petani ikan baik teknis maupun perundang-undangan - Kondisi alam labil (rawan banjir, rawan gempa) - Adanya kegiatan-kegiatan yang merusak seperti :pengeboman ikan, penambangan pasir - Belum adanya TPI dan banyaknya tengkulak - Adanya masyarakat yang mendirikan rumah di sekitar TNBBS - Belum selesainya proses Perda ATRW, sehingga proses sosialisasi belum efektif

Partisipan : 1. Dinas Perkebunan 4. Dinas Perikanan 7. Dinas Pariwisata
 2. Dinas Kehutanan 5. Dinas Perindustrian 8. Pemda
 3. Dinas PUK 6. Bappeda 9. Camat

LAMPIRAN I (lanjutan)

MATRIK KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 22 Th. 99 - Program P307 - Sudah ada tenaga pibina ternak - Ada 4 orang petugas PPL Pertanian - Adanya SK Bupati dan Instruksi Camat untuk program intensifikasi padi & palawija di semua desa di Lampung Timur - Adanya UU Perikanan - Adanya UU Lingkungan Hidup - Adanya UU Kehutanan - Adanya pemberian kredit kepada petani, nelayan dan petambak - Adanya program keterpaduan antar dinas dalam penanganan program kesejahteraan sosial - Adanya program pembinaan & pelatihan bagi tenaga kesejahteraan sosial (Kep. Mensos RI) - Adanya program pemukiman rehabilitasi sosial daerah kumuh - SK Mendikbud tentang penjabaran KK 94 tentang muatan lokal - SK Hakanwil tentang muatan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi antar instansi terkait - Sanksi terhadap pelanggar tidak tegas - Kurangnya biaya, maupun sarana, dan prasarana yang tersedia - Minimnya pengetahuan staf tentang lingkungan hidup - Kualitas dan kuantitas SOM (Staf) yang masih terbatas - Belum ada perda yang mengatur kawasan pantai secara terpadu - Belum disosialisasikannya UU pengairan secara meluas - Kurangnya tenaga lapangan untuk pendataan statistik, sarana untuk pengolahan data belum ada, dan Kantor statistik belum ada - Kurangnya sosialisasi UU Perikanan No. 9 Th. 85 - Kurangnya petugas lapangan BRI - Beberapa tempat belum terdapat puskesmas pembantu seperti Ds. Sriminosari - Sarana telekomunikasi belum ada - Sarana diagnosis medis masih kurang - Kurang tersedianya tenaga pembina medis - Kurangnya sarana penunjang dan buku pegangan guru - Belum adanya jalur telekomunikasi (telkom) - Jumlah personil aparat keamanan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya bahan tambang (Zeolit dan pasir kuarsa) yang belum dimanfaatkan - Adanya sumberdaya alam/laut yang sangat berpotensi - Home industri ikan asin dan penyamak kulit ikan pari serta pengusaha tambak - Potensi wilayah sangat menonjol di sektor perkebunan, pertanian - Panjang dan luasnya wilayah pesisir yang dapat dimanfaatkan - Adanya pengeboran minyak di pulau Segama oleh pusat yang merupakan wilayah Lampung Timur - Luasnya wilayah baku (5.187 Ha) dan wilayah fungsi (4.436 Ha) yang dapat dimanfaatkan menjadi daerah swasembada pangan - Sebagai wilayah penghasil ternak besar dan kecil - Adanya industri tepung ikan di Muara Gading Mas - Ikan pari siap dipasarkan (15 ton/bulan) - Tepung kulit kerang yang siap diekspor (30 ton/bulan) - Adanya bahan baku industri kaca - Jumlah petani tambak dan nelayan sangat besar yang berpotensi sebagai nasabah BRI - Pendapatan masyarakat nelayan/petambak cukup memadai untuk memperoleh pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Abrasi pantai - Belum jelasnya hak atas tanah - Gangguan hama penyakit di lahan pertanian - Tingginya limbah industri yang masuk ke wilayah pesisir - Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidupnya - Menurunnya hasil pendapatan nelayan akibat pengeboman di laut - Alih fungsi lahan sawah dan <i>greenbelt</i> ke tambak - Intrusi air laut - Perusakan terumbu karang oleh alat tangkap trawl - Pemakaian pestisida pada tambak yang tidak terkontrol - Pendangkalan PPI/muara sungai - Air bersih masih kurang - Penduduk yang tidak menetap memudahkan penyebaran penyakit - Hubungan seksual (aids, sipilis, dll) - Kesadaran sanitasi oleh masyarakat masih lemah - Timbulnya penyakit seperti malaria, demam berdarah - Terganggunya waktu belajar akibat musim ikan - Masyarakat heterogen, dan sering terjadinya kriminalitas (perompakan) - Sering terjadi gejolak antara nelayan maju & tradisional

Partisipan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat wilayah pesisir 2. Bapedalda 3. Bappeda 4. Dinas Pertambangan 5. Dinas PU Pengairan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dinas Peternakan 7. Dinas Pertanian 8. Dinas Statistik 9. Polsek 10. Koramil 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Dinas Kesehatan 12. Dinas Sosial 13. Depdikbud 14. BRI Unit Kuala 15. Dinas Perikanan 16. Dinas Perindustrian
---------------------	--	---	--

LAMPIRAN II

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik lembaga/instansi/dinas pemerintah dan non pemerintah, maupun perorangan. Terima kasih terutama disampaikan kepada:

Rokhmin Dahuri/DELP	Afruddin/HNSI Lampung	Budi Santoso/Antara
Alex Retraubun/DELP	Heri Hermiyatono/LPSM Yasadhana	Toha/Antara
Kem Lowry/ University of Hawaii	Agung/LPSM Yasadhana	Agus Suroso/Antara
Richard Volk/USAID - USA	Yusuf Kriswardi/LPSM Yasadhana	Maman Sudiawan/Republika
David Heesen/USAID - Indonesia	Theo Endarko/LPSM Yasadhana	Saparudin Siregar/Lampung Post
Priyanto Santoso/USAID-Indonesia	Verry Iwan S./LSM Alas Indonesia	Yunita/Lampung Post
Harris Hasyim/Bappeda Propinsi	Venny Marlinda/LSM Alas Indonesia	Sri Agustina/Lampung Post
Fahrizal Darminto/Bappeda Propinsi	Ivan Rayendra Bakar/LSM Alas Indonesia	Truti M./Lampung Express
Zaenal Abidin/Bappeda Propinsi	Rudy Akbarta/LSM Alas Indonesia	Ilham Djamhari/Media Indonesia
Mulyadi/Bappeda Propinsi	Iqbal Panji Putra/LSM Mitra Bentala	Ahmad Zulkani/Kompas
Rachmat Abdullah/Bapedalda Propinsi	Wandoyo/Mitra Bentala	Adi Kurniawan/Koridor
Helmi Mahmud/Diskan Propinsi	Rio Bertoni/Mitra Bentala	Purna/SKH Radar Lampung
Wan Edria Ekajaya/Diskan Propinsi	H. Guntur Gunawan/TVRI spk Lampung	Yetti/Trans Sumatera
Danaluddin Muchtar/PU Pengairan	Syafei Sikumbang/TVRI spk Lampung	Imam Untung/Gamma
Agus S. Subowo/PST/PU Pengairan	Amirul Khalid/TVRI spk Lampung	Zahrul Mutzaini/RRI Lampung
Sumarno/PU Pengairan	Herli Marjoni/TVRI spk Lampung	Syahrial/RRI Lampung
Darwin/PU Pengairan	Supriyono/TVRI spk Lampung	Noval Sagupala/RRI Lampung
Ermin/PU Pengairan	Hasan Basri/TVRI spk Lampung	Aluh Sipren/masyarakat/Way Batang
Edwin Bangsaratoe/PST/Diparda Propinsi	Hendri/TVRI spk Lampung	Pauzi H./masyarakat/Lemong
Lilis Muliawati/Diparda Propinsi	Ari Sobri/TVRI spk Lampung	Abulyazi/koperasi/Krui
Eman Hendrawan/Kanwil Perhubungan	Sujiharno/Balai Budidaya Laut Lampung	Zamhari/koperasi/Krui
Komar Effendi/PST/Kanwil Perhubungan	Philipus Hartono/Balai Budidaya Laut Lampung	A. Rusdi/nelayan/Pesisir Tengah
Yanto Riyanto/PST/Kanwil Parsenibud	Kurnianto/BKSDA	Rizwan/nelayan/Pesisir Tengah
S. Sinambela/PST/PMD Propinsi	Imam Muhadi/Dinsos Propinsi	Azhari/nelayan/Pesisir Tengah
M.A. Malau/PMD Propinsi	Sri Wardhani/Dinsos Propinsi	Akmaluddin/nelayan/Kampung Jawa
Mulyo Hartono/PST/Dishut Propinsi	Muhajir Utomo/Unila	Wastana/nelayan/Kampung Jawa
Usnijanto Oesin/PST/Kanwil PU Propinsi	Anshori Djausal/Unila	Alamsah/nelayan/Kampung Jawa
Alrasyid/PST/SBRLKT Way Seputih	Ali Ibrahim Hasyim/Unila	Jadri Junaidi/masyarakat/Malaya
Sri Depranoto/PST/TNI AL	Sutopo Gani Nugroho/Unila	Syamsul A./masyarakat/P. Penengahan
Abdul Gani/Polda Lampung	M. Akib/Unila	Helmi Saad/Capem/Bengkunat
Abdy Wasik Ali/PST/LSM Watala	Ari Damastuti/Unila	Anwar Mizdi/kecamatan/Krui
Tommy Indra/Gappindo Lampung	Heryandi/Unila	Arnas/masyarakat/Kuala
Ismail/Gappindo Lampung	Erna Rochana/Unila	Haryadi/Camat/Pesisir Utara
A. Yunani/HNSI Lampung	Syahrul Hasan/Dinas Pertambangan Propinsi	Wardhana/Tokoh Adat/Krui

LAMPIRAN II (lanjutan)

Amran/masyarakat/Tanjung Setia
Mulyadi/masyarakat/Tanjung Setia
Zulkarnain/masyarakat/Tanjung Setia
Christomort/DPRD Lampung Barat/Liwa
Habibullah/Capem/Karya Punggawa
Nurma Fuad/PKK/Krui
Suwasti YS/PKK/Krui
Sri Mulyati AR/PKK/Krui
Widiyawati/PKK/Krui
H. Amir/masyarakat/Tokoh Krui
Khairul Rizal/Camat/Pesisir Utara
Imanudin Aziz/Diparda Lampung Barat
Saiful Bahri/Diparda/Lampung Barat
Yanuar MZ/Camat/Pesisir Tengah
Fauzi/Camat/Pesisir Selatan
Lisdarto/BPN/Lampung Barat
Tanjung/Bag. Hukum/Lampung Barat
Saelan/BPN/Lampung Barat
Guntur H./Dishut/Lampung Barat
Zukra Amin/Capem/Lemong
O. Pakpahan/Bappeda/Lampung Barat
Sugeng Raharjo/PU - K/Lampung Barat
Tabrani Mahfi/Diperta/Lampung Barat
Zulkifli Iskak/Diskan/Lampung Barat
Rizvan/koperasi/Pesisir Tengah
Sodikin/koperasi/Pesisir Tengah
Dwi Wahyono/Diskan/Lampung Barat
Murdi Aji/PU-K/Lampung Barat
Fauzi Djafri/DKP/Lampung Barat
Imam Habibudin/BLH/Lampung Barat
Sudirman/Tapem/Lampung Barat
Naher/Kades/Kota Jawa
A. Zaukat Ali/Tokoh Adat/Pesisir Utara
Barzan/tokoh masyarakat/Krui
Nata/Diskan/Lampung Barat
Nora Wilyani/Bappeda/Lampung Barat
Rudiyanto/Bappeda/Lampung Barat
Indra Gunawan/Bappeda/Lampung Barat

K. Kusnadi/Diskan/Tanggamus
Umar Yusuf/PU - K/Tanggamus
Syaiful G./Tapem/Tanggamus
Marwan Amir/Camat/Cukuh Balak
F. Muntako/Camat/Wonosobo
Azhari Has/tokoh masyarakat/Tanggamus
Cahya/tokoh masyarakat/Tanggamus
Syuhaibi/Diparda/Tanggamus
Kamris Zaman/K. Program/Tanggamus
Helen Anggraini/Bappeda/Tanggamus
Abdul Rahman/Bappeda/Tanggamus
Relawan/Bappeda/Tanggamus
Mansyur A./Disbun/Tanggamus
Kayiyom/Disbun/Tanggamus
Johan Anwar/Bappeda/Tanggamus
Sudiro W./Bappeda/Tanggamus
Syafrial/Perindustrian/Tanggamus
Roni Witono/Bappeda/Tanggamus
Henri/Bappeda/Tanggamus
Gatot Susilo/Bappeda/Tanggamus
Firdaus Agustian/Bappeda/Tulang Bawang
Darwis/Bappeda/Tulang Bawang
M. Tulus/Bappeda/Tulang Bawang
R.A. Kennedy/Bappeda/f
Donis Gansi/Bappeda/Tulang Bawang
M. Saleh Usman/Pemda/Tulang Bawang
Setianto/Diskan/Tulang Bawang
MS Amin/PT. DCD/Tulang Bawang
Nur Wiyoto/PT. DCD/Tulang Bawang
Hanan DR/Distan/Tulang Bawang
Kahar Kurnen/BPN/Tulang Bawang
Zanuddin/PU Pengairan/Tulang Bawang
Oktria Vidya V./Bag. Program/Tulang Bawang
Kenedi/Diskan/Tulang Bawang
Husni Thamrin/Disbun/Tulang Bawang
Khaidir F. Ghani/Wartawan/Tulang Bawang
Nazaruddin/Gapensi/Tulang Bawang
Sangadjie/FK Parsenibud/Tulang Bawang

Nurmansyah/Pemuda/Tulang Bawang
Yusmanadi T./Pemuda/Tulang Bawang
Sayid Thera/Pemuda/Penunungan, Tulang Bawang
A. Fabil/masyarakat/Kampung Bugis
Suryadi/masyarakat/Gedong Aji
R. Nursiwan M./masyarakat/Gunung Ilir
Miswar Hadi/koperasi/Gedong aji
Patoni/masyarakat/Gunung Ilir
Saher/masyarakat/Bakung Ilir
Ribki/masyarakat/Bugis
Ibrahim/masyarakat/Pagar Dewa
Azwan/masyarakat/Cinjai
Dahlan/masyarakat/Cinjai
Rahmansyah/masyarakat/Teladas
A. Tamin Atiek/masyarakat/Menggala
Sukri Arsil/Kadinda/Tulang Bawang
Januri Mega/masyarakat/Kali Miring
Erwan Thaib/masyarakat/Menggala
Mirzal Saleh/Disnak/Lampung Timur
Utara/Distan/Lampung Timur
dr. Haru A./Diskes/Lampung Timur
dr. Handoko/Diskes/Lampung Timur
Sumarno/Statistik/Lampung Timur
R. Agus H./Bappeda/Lampung Timur
Isa Ansori/Bappeda/Lampung Timur
M. Yusuf/Pertambangan/Lampung Timur
Syahroni/PU Pengairan/Lampung Timur
Syahid Elkarim/Diskan/Lampung Timur
Habizar/Diskan/Lampung Timur
Sunarto/PU Pengairan/Lampung Timur
Badarudin/BRI Kuala/Lampung Timur
Jaman/P & K/Lampung Timur
A. Syukri Yusuf/P & K/Lampung Timur
Supoyo/Dinsos/Lampung Timur
A. Basri/Bappeda/Lampung Timur
Dewa Bagus Gede/Kapolsek /Lampung Timur
S. Subardi/Danramil/Lampung Timur
Bahromi Saad/Pertambangan/Lampung Timur

LAMPIRAN II (lanjutan)

Amrullah/Bapedalda/Lampung Timur	Junaidi Basrie/Camat/Padang Cermin	Ambo Ure/P. Sebesi/Lampung Selatan
R. Mansur/Bappeda/Lampung Timur	Musiran/Camat/Katibung	Sujono/P. Sebesi/Lampung Selatan
Hermansyah/Camat/Lab. Maringgai	Tantan S./Camat/Kalianda	Hamim/P. Sebesi/Lampung Selatan
M. Sarjan/Capem/Mataram Baru	Maliki Mucklis/Camat/Penengahan	Sahlani/P. Sebesi/Lampung Selatan
Helman Arief/Capem/Sri Bhawono	Taji Ahmad/Camat/Palas	Hasanuddin/P. Sebesi/Lampung Selatan
Isroni Mihradi/Capem/Gn. Pelindung	Tomsijiri/Tata Ruang/Lampung Selatan	Syaifulloh/P. Sebesi/Lampung Selatan
Bagus Suroyo/kecamatan/Melinting	Chabramin/Bappeda/Lampung Selatan	Muhammad Nur/P. Sebesi/Lampung Selatan
M. Salih/Kades/Sriminosari	Rozie Zien/Kades/Kr. Tunggal	Nuralim/P. Sebesi/Lampung Selatan
Muhamad/Kades/N. Agung	Agus Sani/masyarakat/Babaran	Mas Firman/Lurah/Kangkung
Syamsuddin/Kades/Wana	Sawaluddin/masyarakat/Tarahan	Suharto/Walikota/Bandar Lampung
Mawin Sukaralin/Sekdes/Mataram Baru	Agung/masyarakat/Tarahan	Madjani/masyarakat/Bandar Lampung
Gunawijaya/Kades/Lab. Maringgai	Niran/tokoh masyarakat/Lampung Selatan	M. Supandi/LKMD/Bandar Lampung
Sutrisno S./Kades/Karya Tani	Mulyadi/Kades/Way Gelang	Idrus Effendi/Camat/Tel. Betung Sel.
S. Haryosuseno/Kades/Sri Menanti	A. Rasudin Z/Kades/Ketapang	A. Rumbay/Camat/Tel. Betung Brt.
Amrudin/Sekdes/Pidada Jaya	Asidi/tokoh masyarakat/Lampung Selatan	Muzakki/Bappeda/Bandar Lampung
Nurhadi/Kades/Way Areng	Hirzan/masyarakat/Lampung Selatan	Harlin/PT. Servitia C./Bandar Lampung
Nur Hidayat/Staf desa/Keb. Damai	Fauzan/Bappeda/Lampung Selatan	Moh. Abbas/PT. Servitia C./Bandar Lampung
Sujarwo/Kades/Sri Bhawono	Suranto/Bappeda/Lampung Selatan	Firman/Lurah/Pesawahan
Daman/Kades/Waringin Jaya	Sayuti/Diperta/Lampung Selatan	A. Somad/tokoh masyarakat/Pesawahan
Selibis/Kades/Tebing	H. Djauhari/Kades Gebang/Lampung Selatan	Bambang K./PU - K/Bandar Lampung
Ismail Yahya/Kades/Raja Basa Baru	H. Jama`i/tokoh masyarakat/Gebang	Mariana Sofa/PT. BBS/Bandar Lampung
Hadi Suwarno/Kades/Karang Anyar	Maman Karman/Dishut/Lampung Selatan	Sepriana/PT. BBS/Bandar Lampung
Darwo Guwilo/Kades/Gading	Hilmiyati/PKT/Lampung Selatan	Nelda/Humas/Bandar Lampung
Guntoro/Kades/Pelindung Jaya	Ahmad Rusli/Bappeda/Lampung Selatan	A. Rahman M./Bappeda/Bandar Lampung
Tubujo/Kades/Tulung Pasik	Rizal Fauzi/Bappeda/Lampung Selatan	Rr. Diah/Bappeda/Bandar Lampung
A. Sanusi/Kades/Muara Gading Mas	Sabirin/Bappeda/Lampung Selatan	R. Smiatupang/Lurah/Way Lunik
Zulkifli Anwar/Bupati/Lampung Selatan	Muharam/Bappeda/Lampung Selatan	Hasman Hadi/PU - K/Bandar Lampung
Amreyza Anwar/eks Bupati/Lampung Selatan	Safarudin/Guru P. Sebesi/Lampung Selatan	Maidasari/Bappeda/Bandar Lampung
Rusdi Maliki/Bappeda/Lampung Selatan	Syaifulloh/Sekdes P. Sebesi/Lampung Selatan	Nawawi/Tata Kota/Bandar Lampung
Jamal Naser/Diskan/Lampung Selatan	Rahman/P. Sebesi/Lampung Selatan	Nila/Bappeda/Bandar Lampung
A. Karim/Diparda/Lampung Selatan	Sainan/P. Sebesi/Lampung Selatan	Sutarto, S/Diparda/Bandar Lampung
Asnil Noer/PKT/Lampung Selatan	Sahroni/P. Sebesi/Lampung Selatan	Etty Yuliarna/Bandar Lampung
Sunardi/PU - K/Lampung Selatan	Agus S./P. Sebesi/Lampung Selatan	Raban/PHRI/Bandar Lampung
Ismantayo/PU - K/Lampung Selatan	Muchtar S.S./P. Sebesi/Lampung Selatan	Rozi Maesa P./Diskan/Bandar Lampung
Sobiri Sodjad/PMD/Lampung Selatan	Ahyar Abu/P. Sebesi/Lampung Selatan	Junaidi/CV. Bumi Waras/Bandar Lampung
Raw Abu Hasan/BPN/Lampung Selatan	Jahrudin/P. Sebesi/Lampung Selatan	Opang S./Bappeda/Bandar Lampung
Sutaryo/BPN/Lampung Selatan	Nasran/P. Sebesi/Lampung Selatan	Erwin/Bag. Hukum/Bandar Lampung
A.M. Ronny/BLH/Lampung Selatan	Jawirak/P. Sebesi/Lampung Selatan	Khasrin A./Bappeda/Bandar Lampung

LAMPIRAN II (lanjutan)

Syamsuddin B./masyarakat/Kota Karang	Muhibin/masyarakat/Putih Doh	Zakaria/masyarakat/Karang Buah
Wetsu/masyarakat/Kota Karang	Zanial Thalib/masyarakat/Putih Doh	Herman/masyarakat/Karang Buah
Saman Hendar/Camat/Panjang	Aisar HM./masyarakat/Putih Doh	Ahyadi/masyarakat/Karang Buah
Fachruddin/Bappeda/Bandar Lampung	Muhtaran/masyarakat/Putih Doh	Asdani/masyarakat/Tanggamus
Suryadi/Bappeda/Bandar Lampung	Marmain/masyarakat/Putih Doh	Mukhtar/masyarakat/Tanggamus
Khenderi/Bappeda/Bandar Lampung	Saipul Anwar/masyarakat/Putih Doh	M. Nur/masyarakat/Tanggamus
Komsiyah/Bappeda/Bandar Lampung	Usman Hadi/masyarakat/Putih Doh	H. Suhadi/masyarakat/Tanggamus
Suwarto/Bappeda/Bandar Lampung	Zuhanni/masyarakat/Putih Doh	Muchlisin/masyarakat/Tanggamus
Umar Ali/DPRD Kota/Bandar Lampung	Sawilk/masyarakat/Putih Doh	Mardhatu/masyarakat/Tanggamus
Palgunadi/DPRD Kota/Bandar Lampung	Zahri/masyarakat/Putih Doh	Joni M./SPSI/Tanggamus
Joko Asmoro/DPRD Kota/Bandar Lampung	Khaidir/masyarakat/Putih Doh	Fajar S./Panthera Raflessia/Tanggamus
Kasman/DPRD Kota/Bandar Lampung	Sako Bangun/masyarakat/Putih Doh	Pandu/Panthera Raflessia/Tanggamus
Tjandra Tjaya/Bappeda/Bandar Lampung	A. Sajrin/masyarakat/Putih Doh	Iwan/Panthera Raflessia/Tanggamus
Madani/Bappeda/Bandar Lampung	Firdaus/masyarakat/Putih Doh	Phillemon/Panthera Raflessia/Tanggamus
Arif/Bappeda/Bandar Lampung	Pathullah/koperasi/Putih Doh	Irwan Effendi/masyarakat/Tanggamus
Marta Lena Sani/Bappeda/Bandar Lampung	Muzallif/masyarakat/Putih Doh	Slamat Riady/masyarakat/Pahawang
Ferry Yusticia/Sekretariat/Bandar Lampung	Bastari/masyarakat/Karang Buah	Taufik Effendi/masyarakat/Pahawang
Siti Hadijah/Bappeda/Bandar Lampung	Ahmadi/masyarakat/Karang Buah	Sarifudin/masyarakat/Pahawang
Ika Rawantina/Bappeda/Bandar Lampung	Nahrawi/masyarakat/Karang Buah	Bakri/masyarakat/Pahawang
Mudjiari/Bappeda/Bandar Lampung	A. Bustani/masyarakat/Karang Buah	H. Ahmad Akbar/masyarakat/Pahawang
Sri Suprapti/Bappeda/Bandar Lampung	Azuddin/masyarakat/Karang Buah	M. Syahril Karim/masyarakat/Pahawang
Melly Astuti/Bappeda/Bandar Lampung	Sarbini/masyarakat/Karang Buah	Wahdi/masyarakat/Pahawang
Ridwan/Sekretariat/Bandar Lampung	Hamdan Sani/masyarakat/Karang Buah	Baharudin/masyarakat/Pahawang
Saparjani/P & K/Bandar Lampung	Bukhari/masyarakat/Karang Buah	Sukisno/masyarakat/Pahawang
Budiono/Bappeda/Bandar Lampung	H. Alawasip/masyarakat/Karang Buah	Tim Penjaga Mercusuar/P. Segamat
Endang/Bappeda/Bandar Lampung	Burhanuddin/masyarakat/Karang Buah	Tim Ekspedisi Zooxanthellae V Lampung Barat/FDC-IPB
Suripno/BLH/Bandar Lampung	Ahyani/masyarakat/Karang Buah	CRMP Jakarta: Esthy S. Jonathan, Pahala Nainggolan.,
Morhali Said/Masyarakat/Putih Doh	Ramudin/masyarakat/Karang Buah	Tammy C., Dewi S., Vista Y., Tiene G., M. Yusuf, Kemal
S.K. Bangun S./masyarakat/Putih Doh	Dulhaheer/masyarakat/Karang Buah	Taruc, Jacob Rais, Kun Hidayat, Pasmus Legowo
H. Damanhuri/masyarakat/Putih Doh	Murdi/masyarakat/Karang Buah	CRMP/PKSPL-IPB: Yus Rustandi, Celly Catharina,
Hanafi/masyarakat/Putih Doh	Marhakim/masyarakat/Karang Buah	Pepen S. A., R.J. Moermanto, Burhanuddin, Nungki,
Ahmad Basri/masyarakat/Putih Doh	Fatulloh/masyarakat/Karang Buah	Ahmad Rizal, Frida, Vitri, Bambang Haryanto, Wawan.
Ahmad Sajri/masyarakat/Putih Doh	Zainuri/masyarakat/Karang Buah	Johnnes Tulungen/ CRMP Manado
Sayuti Syari/masyarakat/Putih Doh	Kahar/masyarakat/Karang Buah	Ramli Malik/ CRMP Kalimantan Timur
Zulfikar/masyarakat/Putih Doh	Dultalib/masyarakat/Karang Buah	CRMP Lampung: Hermawati P., Revita Meuthia,
Nurman Aris/masyarakat/Putih Doh	Soeb/masyarakat/Karang Buah	Susanna, Odi H., Yudi R., Afif K., Efta W., Sukatman
H. Heri/masyarakat/Putih Doh	Asmu'i/masyarakat/Karang Buah	
Munzier S./masyarakat/Putih Doh	Hamdani/masyarakat/Karang Buah	

LAMPIRAN III

TABEL KEGIATAN PROSES PENYUSUNAN RENSTRA PESISIR LAMPUNG

LOKASI	ACARA	TANGGAL	PENYELENGGARA	PESERTA	JUMLAH		
					PRIA	WANITA	TOTAL
Ruang Rapat Proyek Pesisir	Pelatihan Pra-Renstra	15 - Jun - 99	Proyek Pesisir	Bapedalda, Bappeda Tk. I, Proyek Pesisir Lampung	13	1	14
Ruang Rapat Proyek Pesisir	Pelatihan Pra-Renstra	17 - Jun - 99	Proyek Pesisir	LSM Watala, Mitra Bentala, Alas, Yasadhana, PP Lampung	14	2	16
Ruang Rapat Proyek Pesisir	Pelatihan Pra-Renstra	18 - Jun - 99	Proyek Pesisir	Mapala Unila, Tabloid Koridor, Bisnis Indonesia, LKBN Antara, PP Lampung	9	3	12
Bappeda Selatan Lampung	Pelatihan Pra-Renstra	21 - Jun - 99	Bappeda Lamsel	Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, BLH, Dinas PU	17	3	20
Ruang Sidang Bappeda Propinsi	Rapat Tim Kerja PST/Pembentukan Renstra	30 - Jun - 99	Proyek Pesisir	Bappeda Tk. I, Bupati Lamsel, Bapedalda Tk. I, Kanwil PU, Kanwil Hutbun, Kanwil Pansenbud, Kanwil Dephub, D. Perikanan, Ling. Hidup Lamsel, Bappeda Kota Bandar Lampung, PMD, Penda Lamtim, TNI-AL, D. Kehutanan, Bappeda Lambar, D. PU Pengairan, GARHT Seputih, HNSI, D. Pariwisata, Gappindo, Proyek Pesisir, LSM Mitra Bentala, Watala, PSL Unila	32	1	33
Bappeda Propinsi	Pembahasan Rencana Penyusunan Renstra Kawasan Pesisir Lampung	02 - Sep - 99	Bappeda	Bappeda Prop., Proyek Pesisir, D. Kehutanan Prop., Kanwil PU, D. Perikanan Prop., PKSPL IPB, Kanwil Dephub, PMD Prop., Kanwil Pansenbud, D. Pariwisata Prop., D. PU Pengairan Prop., Bapedalda Prop., Gappindo, DPD HNSI, TNI AL Panjang, LSM Mitra Bentala, Koridor	20	3	23
Gedung Kantor Propinsi Pusiban, Gubernur Lampung	Pelatihan Renstra / Rencana Strategis Pesisir, John P. Duff	09 - Sep - 99	Bappeda	FK Pansenbud, Bappeda (Propinsi, Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat), Dinas Perikanan Kab./kota, Kanwil (PU, Dephub, Dephutbun, Deparsenbud, Dinas Pariwisata (Lam-Ut, Lam-Sel), Dinas Kehutanan, PU Pengairan Propinsi, Think-tank Unila, PMD Propinsi, TNI-AL Panjang, YPBI-KBN Lampung, Gappindo, LSM (Walhi, Yasadhana, Mitra Bentala, Watala, Yamaha Indonesia, Yayasan Peduli), Pers (Koridor, LKBN Antara, MU Khatulistiwa), LBH, Universitas Tulang Bawang, DPD HNSI, Proyek Pesisir Lampung, PKSPL-IPB	80	9	89
Rafflesia, Hotel Sheraton	Pelatihan Renstra / Metode Renstra, John P. Duff	09 - Sep - 99	Proyek Pesisir	Bappeda Propinsi, Bapedalda Propinsi, Dinas Perikanan Prop., Dinas Kehutanan Prop., Forum Komunikasi Pansenbud, MBM Gamma, RRI, Watala, Mitra Bentala, PSC Unila, PKSPL-IPB, Proyek Pesisir	23	4	19

LAMPIRAN III (lanjutan)

LOKASI	ACARA	TANGGAL	PENYELENGGARA	PESERTA	JUMLAH		
					PRIA	WANITA	TOTAL
Ruang Rapat Proyek Pesisir	Rapat Teknis Renstra	20-Sept-99	Proyek Pesisir	Watala, Mitra Unila, Bentala, Dinas Pesisir Lampung, Perikanan Propinsi, Bappeda Propinsi,	8	2	10
Bappeda Lampung Barat	Rapat Teknis Pertemuan Renstra	30-Sept-99	Bappeda	Camat Pesisir Tengah, Bappeda, Camat Pesisir Utara, Camat Pesisir Selatan, Watala	8	1	9
Gedung Kec. Kruai Lampung Barat	Workshop untuk Renstra masyarakat	5-Okt-99	Proyek Pesisir	Kasi Pemerintahan, Capem Bengkunt, Lambar, Capem Karya Punggawa, Pesisir Tengah, Nelayan Kampung Jawa, Desa Malaya, Tokoh Masyarakat, Ibu-ibu PKK Kecamatan, Tim Renstra, Camat Pesisir Utara, DPRD Mina Pesona, Nelayan Desa Lemong, Warga Desa Tanjung Setia, Tokoh Adat, Warga Desa Tanjung Renstra	33	4	37
Aula Pemda Lampung Barat	Workshop untuk Renstra Pemerintah	6-Okt-99	Bappeda Lampung Barat	Camat Pesisir Tengah, Diparda, Selatan, Tokoh Nelayan, Bagian Hukum, Camat Pembantu Lemong, Camat Pesisir Selatan, PU-K, Camat Pembantu Karya Punggawa, Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Koperasi Mina Pesona Kruai, Dinas PRP, Lingh. Hidup, Tata Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Camat Pembantu Bengkunt, Tim Renstra, Tokoh Masyarakat Pesisir Utara, BPN, Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman	41	2	43
Aula Pemda Tanggamus	Workshop untuk Renstra Pemerintah	7-Okt-99	Bappeda Tanggamus	Camat Cukuh Balak, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Kasi Program, Bappeda, Camat Wonosobo, PUK, Dinas Kehutanan, TVRI, Tata Pemerintahan, Tokoh Masyarakat	32	1	33
Bappeda Tulang Bawang	Workshop untuk Renstra Pemerintah	11-Okt-99	Bappeda Tulang Bawang	Pemda TB, Dinas Pengairan, Dinas Perikanan, Bappeda Tim Renstra, PT. DCD, Propinsi, Dinas Penyusunan Program, BPN, Bappeda, Dinas Perkebunan	19	1	20
Ruang Pertemuan Rembulan	Workshop untuk Renstra Masyarakat	12-Okt-99	Proyek Pesisir	Gapensi, FK Parsenibud, Kampung Bugis, Masy. Gedong Aji, Koperasi nelayan, Warga Desa Linjai, Warga Desa Kadinda TB, Warga Kali Miring, Antara, Pemuda Ujung Gunung Ilir, Warga Desa Pagar Dewa, Warga Desa Menggala, Tim Renstra	28	0	28
Balai Kecamatan Labuhan Maringgai	Workshop untuk Renstra Pemerintah	14-Okt-99	Bappeda Lampung Timur	Bappeda Lampung Timur, Dinas Pertambangan, Pengairan Way Curup, BRI Kuala, PGK Rec. Lab. Maringgai, Dinsos, Kapolsek Lab. Maringgai, Bapedalda, Camat Lab. Maringgai, Camtu Baru, Camtu Srihawono, Camtu Gunung Pelindung, Kades N. Agung, Sekdes Harya Tani, Kades Sri Menanti, Sekdes Way Areng, Kades Tebing, Kades Raja Basa Baru, Kades Pelindung Jaya, Dinas Peternakan, Dinas Pengairan Harya Tani, Diskan, Dinas PU, Dinkes, Diperta, Statistik, Dinas PU, Cabdin Maringgai, Horamil Lab. Maringgai, Camtu Mataram Baru, Camtu Malinting, Kades Lab. Maringgai, Kades Tebing, Kades Waringin Jaya, Kades Anyar, Kades Gading, Kades Muara Gading Mas, Tim Renstra	45	0	45

LAMPIRAN III (lanjutan)

LOKASI	ACARA	TANGGAL	PENYELENGGARA	PESERTA	JUMLAH					
					PRIA	WANITA	TOTAL			
Rula Bappeda Lampung Selatan	Workshop untuk Renstra Pemerintah	19 - Okt - 99	Bappeda	Bupati LS, Bappeda LS, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas PHT, Dinas PU, PU Pengairan Palas, Dinas Pertanian, PMD, BPN, Bagian Lingkungan Hidup Setwilda LS, Camat (Padang Cermin, Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Penengahan, Palas), Dinas Tata Ruang, Kades (Gebang, Karang Tunggal, Ketapang), Tim Renstra	5	2	3	5	5	
Ruang Sidang DPRD Bandar Lampung	Workshop untuk Renstra Pemerintah dan Perusahaan	21 - Okt - 99	Bappeda	Bappeda, Lurah Kangkung, LKMD, Camat (Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Panjang), PT. Servitia Cemerlang, Lurah Psw, DPU Kota, PT BBS, Lurah Way Lunik, Humas Pemda, Dinas PU, Dinas Tata Kota, Bid. Penelitian, Diparda, Bid. Lingkungan Hidup, PHRI Lampung, TVRI, Dinas Perikanan, HNSI, CV. Bumi Waras, Bag. Hukum, DPRD Kota BL, Tim Renstra	5	5	1	4	6	9
Ruang Rapat Proyek Pesisir	Evaluasi Tim Kerja Renstra	26 - Okt - 99	Proyek Pesisir	Tim Kerja Renstra (Bappeda Propinsi, Bapedalda Propinsi, Dinas Kehutanan Prop. Dinas Perikanan Propinsi, PSL Unita, LSM Watala, LSM Mitra Bentala, Proyek Pesisir)	1	0	1	1	1	
Rumah Hades Putih Doh	Workshop untuk Renstra Masyarakat	2 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Masyarakat Cukuh Balak (Petani, Nelayan, Pedagang), Koperasi nelayan, Tim Renstra	3	4	0	3	4	
Pulau Tabuan	Workshop untuk Renstra Masyarakat	3 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Masyarakat Desa Karang Buah dan Desa Sawang Balak (Petani, Nelayan), Tim Renstra	3	7	0	3	7	
LSM Pratala	Workshop untuk Renstra Masyarakat	4 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Masyarakat Kota Agung (Petani, Nelayan), LSM Pratala, SPSI Tanggamus, LSM Yasadhana, Tim Renstra	2	4	0	2	4	
Pulau Pahawang	Workshop untuk Renstra Masyarakat	5 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Masyarakat Pulau Pahawang, Tim Renstra	1	5	0	1	5	
Rula Bapedalda	Diskusi Lesson Learned & Profiling Renstra	11 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Bapedalda, PHSPL-IPB, University of Hawaii, Dinas Perikanan, Bappeda Kota Bandar Lampung, LSM (Watala, Bentala, Bappeda Propinsi Proyek Pesisir)	1	2	3	1	5	
Halianda Resort	Analisis Data Renstra	15 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Tim Renstra (Proyek Pesisir, LSM Watala, LSM Mitra Bentala, PSL Unita, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Perikanan Propinsi, Bapedalda Propinsi), Proyek Pesisir	1	3	3	1	6	
Halianda Resort	Analisis Data Renstra	16 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Tim Renstra (Proyek Pesisir, LSM Watala, LSM Mitra Bentala, PSL Unita, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Perikanan Propinsi, Bapedalda Propinsi), Proyek Pesisir	1	3	3	1	6	
Halianda Resort	Analisis Data Renstra	17 - Nov - 99	Proyek Pesisir	Tim Renstra (Proyek Pesisir, LSM Watala, LSM Mitra Bentala, PSL Unita, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Perikanan Propinsi, Bapedalda Propinsi), Proyek Pesisir	1	3	3	1	6	

LAMPIRAN III (lanjutan)

LOKASI	ACARA	TANGGAL	PENYELENGGARA	PESERTA	JUMLAH		
					PRIA	WANITA	TOTAL
Pulau Sebesi	Workshop untuk Renstra Masyarakat	22 - N o p 99	Proyek Pesisir	Masyarakat Pulau Sebesi, Tim Renstra	29	0	29
Pulau Sebesi	Workshop untuk Renstra Masyarakat	23 - N o v - 99	Proyek Pesisir	Masyarakat Pulau Sebesi, Tim Renstra	29	0	29
Pulau Segamat	Survei lapangan	25 - N o p - 99	Proyek Pesisir	Masyarakat, Penjaga Kawasan, Tim Renstra	9	1	10
Sheraton Hotel	Menganalisis Data Renstra	27 - N o p - 99	Proyek Pesisir	Tim Renstra (Bappeda Prop, Bapedalda Prop, Dinas Kehutanan Prop, Dinas Perikanan Prop, LSM Mitra Bentala, LSM Watala, Proyek Pesisir), Proyek Pesisir	8	3	11
Bappeda Propinsi	Rapat PST (Tim Pengarah)	3 - D e s - 99	Bappeda	Unila, Tim Pantai Timur, Bappeda, Bapedalda, Gappindo, Hanwil Perhubungan, Dinas Perikanan Prop, TNI-AL Panjang, PWI Lampung, Sumatera Post, Koridor, Dinas PU Pengairan Prop, LSM Watala, HNSI Lampung, TVRI SPK Lampung, Proyek Pesisir	27	5	32
Proyek Pesisir	Membuat Draft Renstra	4 - J a n - 00	Proyek Pesisir	Bapedalda Prop, Diskan Prop, Bappeda Prop, PSL Unila, LSM Mitra Bentala, LSM Watala, Proyek Pesisir	9	1	10
Proyek Pesisir	Rapat Tim Kerja Renstra	8 - F e b - 00	Proyek Pesisir	Bappeda Prop, Bapedalda Prop, Diskan Prop, LSM Watala, Proyek Pesisir	8	1	9
Hotel Salak Bogor	Rapat dengan Tim Pembelajaran PKSP - IPB	25 - F e b - 00	Proyek Pesisir	PKSP - IPB, Proyek Pesisir	5	1	6
Hotel Mambruk Ranyer-Jabar	Penyelesaian Draft Renstra	26 - M a r - 00 s/d 29-Mar-00	Proyek Pesisir	Proyek Pesisir, Tim Kerja Renstra, PKSP-IPB	15	3	18
Hotel Kartika	Workshop Draft Renstra	7 - A p r - 00	Bappeda	Bappeda Prop, Bapedalda Prop, Dinas (Perikanan, Pariwisata, Kehutanan, PU Pengairan) Prop, Bappeda Kota/Kab se Prop Lampung, Dinas (Perikanan, Pariwisata, Kehutanan, PU) Kota/Kab se Prop Lampung, LSM Prop Lampung, Media Massa (cetak dan elektronik)	69	10	79

DAFTAR ISTILAH

Action planning/ Rencana Aksi/ Tindakan:

Suatu perencanaan jangka pendek, satu atau dua tahun, yang memuat rincian kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan lebih rinci, lengkap dengan rincian-rincian anggaran biaya, yang diusulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang, biasanya diusulkan melalui DUP/ DIP (Daftar Isian Proyek).

Agroindustri:

Kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri mencakup Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Peralatan dan Mesin Pertanian, dan Industri Jasa Sektor Pertanian.

AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan):

Berdasarkan PP No.27 tahun 1999 didefinisikan sebagai hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

ANDAL (Analisis dampak lingkungan):

Berdasarkan PP No.27 tahun 1999 didefinisikan sebagai telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. ANDAL merupakan suatu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain studi kelayakan teknis dan studi kelayakan ekonomis.

Akuakultur:

Pemeliharaan tanaman atau hewan yang hidup dalam air, seperti budidaya ikan, budidaya rumput laut, dan budidaya udang.

Bagan:

Alat tangkap yang menetap (bagan tancap) atau berpindah (bagan apung),

dipasang malam hari menggunakan jaring, dan lampu (patromak) sebagai alat penarik ikan supaya berkumpul di bawah lampu.

Best Practice/Working model/Desa Binaan:

Suatu inisiatif pembuatan model pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu di suatu kawasan (desa) berbasis kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Budidaya Laut (mariculture):

Pemeliharaan secara artifisial/buatan dari hewan-hewan laut dan estuari seperti ikan, moluska, udang-udangan atau alga laut, rumput laut, mutiara, dan lain-lain.

Contingency plan:

Serangkaian tindakan penanggulangan yang direncanakan sebelumnya untuk meringankan kerusakan karena kecelakaan (tumpahan minyak, pusaran angin/siklon, atau bencana alam lain).

Degradasi:

Kerusakan, penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas/kegiatan manusia.

Demersal:

Ikan yang hidup dan mencari makan dekat atau di dasar perairan.

Ekosistem:

Suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka; suatu sistem fungsi dan interaksi yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungannya.

Erosi (dikenal juga sebagai abrasi):

Pengikisan batuan padat/tanah serta perpindahannya yang disebabkan oleh angin, air, atau es. Pada peristiwa pengikisan tanah, erosi menyebabkan hilangnya permukaan tanah yang banyak mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk hidup.

Estuari:

Daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan dengan pertemuan sungai dengan pantai.

Habitat:

Tempat tinggal, dengan kondisi lingkungan yang khas, bagi spesies atau komunitas. Misalnya tepi pantai, dasar laut, dan sebagainya.

Indikator:

Suatu ukuran bagaimana suatu kemajuan atau kinerja digambarkan dengan melihat tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu pengidentifikasian/tolok ukur yang sangat penting untuk evaluasi penyesuaian.

Intrusi:

Arti harfiahnya adalah masuk secara paksa. Istilah ini sering digunakan tentang proses masuknya air laut ke daratan sehingga air tanah yang berada jauh dari laut terasa payau atau asin.

Isu:

Isu pengelolaan - mencakup potensi dan masalah dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Isu-isu ditentukan sebagai kondisi hasil akhir atau dampak yang ingin diubah oleh *stakeholders* atau masyarakat.

Jalur hijau:

Suatu jalur vegetasi sepanjang perbatasan zona peralihan pesisir, yang memisahkan suatu tipe daerah sumberdaya dari lainnya; dikenal orang dengan jalur hijau (*green belt*) yang ditumbuhi mangrove.

Kekeruhan:

Berkurangnya kejernihan air karena adanya benda-benda yang melayang; suatu ukuran mengenai banyaknya bahan tersuspensi dalam air.

Lamun:

Sejenis ilalang laut yang hidup di dasar laut berpasir, tidak begitu dalam dimana sinar matahari masih dapat menembus dasar hingga memungkinkan untuk berfotosintesis.

Landsat TM:

Satelit Amerika Serikat yang mengelilingi bumi tanpa awak, yang mengirimkan citra multispektrum (kisaran 0,4 - 1,1 um) dari spektrum elektromagnetik ke stasiun penerima di bumi. Data digital dan atau citra yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri bumi dan sumberdaya.

Management Plan/ Rencana Pengelolaan:

Suatu pengumpulan informasi secara sistematis dan pengembangan strategi atau aksi spesifik yang akan menghasilkan keluaran yang diharapkan.

Mangrove:

Komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Contoh mangrove sejati : Api-api (*Avicennia* spp.), bakau (*Rhizophora* spp.).

Pelagis:

Mampu hidup di segala tempat mulai permukaan sampai dasar di kolom air laut. Tidak terbatas hidup di dasar perairan.

Peran Serta Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (bukan perencana profesional) dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengurus, dan mengubah rencana secara komprehensif.

Perencanaan/Renstra:

Suatu proses untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan di masa datang; berisi strategi-strategi yang harus dilakukan untuk mencapai sesuai dengan visi yang diinginkan oleh *stakeholders* dalam jangka waktu menengah (10 - 15 tahun).

Pulau Kecil:

Suatu pulau dengan luas 10.000 km² atau kurang dan mempunyai penduduk 500.000 orang atau kurang (Bell et al, 1990 *dalam* Dahuri, 1999).

Rehabilitasi:

Proses mengembalikan ekosistem atau populasi yang telah rusak ke kondisi tidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi semula.

Salinitas:

Derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air. Ditentukan dengan cara pengukuran densitas larutan dengan salinometer, dengan cara titrasi, atau pengukur konduktivitas elektrik larutan.

Sasaran/Kebijakan/Policy/Objective:

Suatu pernyataan yang spesifik tentang bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sasaran juga mencerminkan hasil yang diharapkan melalui strategi yang di kembangkan guna mencapai tujuan.

Sistem Informasi Geografis (SIG):

Suatu kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta data geografi yang dirancang secara efisien untuk menangkap, menyimpan, memutakhirkan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan seluruh bentuk informasi yang mengacu pada lokasi geografis.

Silviculture:

Suatu bentuk dari *agroforestry* yang merupakan pengkombinasian dari kegiatan budidaya ikan dengan penanaman hutan bakau pada suatu lokasi yang juga di kenal sebagai tambak tumpang sari.

Stakeholders:

Setiap orang, lembaga atau bisnis, swasta atau publik, yang peduli atau merupakan target dari sebuah sektor, sumberdaya atau lokasi dari wilayah pesisir.

Strategi:

Suatu pendekatan yang spesifik untuk mencapai sasaran, yang meliputi sejumlah aksi yang umum untuk mencapai sasaran.

Terumbu karang:

Karang adalah jenis hewan laut berukuran kecil yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni. Hewan ini menghasilkan deposit berupa kalsium karbonat yang terakumulasi menjadi terumbu.

Tujuan (Goal):

Pernyataan umum yang mencerminkan situasi atau hasil yang diinginkan.

Visi (Wawasan):

Pernyataan yang disepakati bersama pihak-pihak yang berkepentingan dan merupakan landasan untuk membangun sesuatu yang di cita-citakan dimasa depan.

Watershed/DAS (Daerah Aliran Sungai):

Suatu wilayah yang telah ditetapkan secara geografis tempat seluruh air mengalir melalui sistem tertentu yaitu sungai, aliran air, atau badan air lainnya.

Wilayah Pesisir:

Daerah pertemuan lingkungan daratan dan lingkungan laut. Ke arah laut wilayah ini meliputi 12 mil pantai dan kearah darat sampai ke wilayah dimana pengaruh fenomena lingkungan laut masih dirasakan atau dijumpai.

Zona Ekonomi Eksklusif:

Zona maritim yang berdekatan dengan atau yang membentang 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur wilayah laut - kewenangan diberikan secara internasional-negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumberdaya alam di zona tersebut.



INDEKS

- A** abrasi 31, 80
administrasi Lampung Barat 80
air tanah 34, 35, 42, 80
Akua Kultur 64, 79
alat tangkap, 39, 40, 79
angin 9
api-api (*Avicennia alba*, *Avicennia marina*) 11, 80
arahana pengembangan lahan pertanian 64
Action Planning 79
Agro Industri 16, 79
Amdal 27, 34, 79
Andal 79
- B** bagan 5, 10, 16, 31, 79
bakau (*Rhizophora stylosa*) 11
Bakauheni 9, 10
Bandar Lampung, 2, 9, 14, 17, 31, 69
bakau (*Rhizophora stylosa*) 11
bangau tontong (*Leptoptilus javanicus*) 11
banjir 22, 35, 41, 42
Barringtonia 29
batuan 5, 11, 80
BOD 11, tabel 12, 26, tabel 28
budidaya mutiara 16, 39, 40
budidaya udang, 15, 79
Bukit Barisan 9, 13, 29, 32, 36
buta-butana (*Bruguiera parviflora*, *Excoecaria agallocha*) 11
- C** cagar alam laut 13, 14, 17, 36
COD 16
coliform 35
- D** daerah aliran sungai (DAS) 34, 36
debit air 36
degradasi 31, 32, 42
- E** erosi 11, 12, 30
ekosistem 1, 10, 30, 33, 36
fringing reefs 31
- G** garis pantai 31, 36
gelombang 9, 11
gempa 20, 31, 41
geologi 12
- H** hutan mangrove 11, 27, 28
hutan rawa 36
intrusi 17, 42
- K** Kabupaten Lampung Barat 2, 43, 70
Kabupaten Lampung Selatan 17, 41
Kabupaten Lampung Timur 17, 43
Kabupaten Tanggamus 2, 65
Kabupaten Tulang Bawang 2, 20, 68
kawasan konservasi 13, 37
Kalianda 9, 10, 32, 39
kekeruhan, 16, 33
kepedulian masyarakat 34, 35, 44
Kepulauan Krakatau 13, 70
kerang mutiara 28, 39, 40
ketapang 12
Krui 12
kualitas air 15, 30, 33, 42
- L** Labuhan Maringgai 12
limbah industri 16, 30, 31, 34
LIT (Line Intercept Transect) 14
Lamun 12, 20, 29, 32
- M** mangrove 11
MBV, serangan 15
Metro 2
mutiara, budidaya/pemeliharaan 12, 16, 28, 39
obyek wisata bahari, 17, 38
- P** Padang Cermin 12
pariwisata 11, 31, 32, 33, 38, 39
pariwisata bahari 38, 39
pasang surut 1
patahan 41, 42
patch reefs 31
pemanfaatan sumberdaya pesisir 27
pengeboman 26
penyebaran penduduk 14
pengelolaan wilayah pesisir 2, 5, 16, 24, 25
pencemaran perairan 14
pengembangan lahan pertanian 45
penyu 12, 31, 33, 36
perikanan tangkap 39, 41
perikanan budidaya 39, 40
perkebunan kelapa 14
PMDN 16
PMA 16
program transmigrasi 14
prokasih 16
pulau-pulau kecil, 11, 17, 20
peran serta masyarakat 33, 36

R Rawa Kandis 13
Rawa Pacing 13
Rawa Sragi 15, 42
reboisasi 13, 27
reklamasi 31, 33
reklamasi pantai 14, 31
rencana strategis 24, i
rencana tata ruang wilayah (RTRW) 17, 28, 29

S sanitasi lingkungan 78
satwa liar, 37
sedimentasi 12, 16, 31
sumberdaya ikan 62
sungai besar 16

T Taman Nasional Bukit Barisan 29, 41
Taman Nasional Way Kambas 14, 29, 36
tambak inti rakyat 13, 39, 41
tambak intensif 39
Tanjung Cina 13, 31, 36
Tanjung Keramat 14, 36
Teluk Lampung 28, 30, 37
Teluk Semangka 24, 31, 36
terumbu karang 29, 31, 32
TPI 14
topografi 1
Tulang Bawang, suaka marga satwa 12, 13, 16

U udang windu/tiger prawn (*Penaeus monodon*) 15
Undang-undang Lingkungan 20

WZ
Way Kanan 2
Way Penet 36
Way Sekampung 17, 36, 41
Way Seputih 36
wisatawan, 11, 31, 32
zona pemanfaatan 44